

repository.ub.ac.id

**ANALISIS PROSES KEBIJAKAN LUAR NEGERI CINA DALAM
PELARANGAN SEBAGIAN IMPOR LIMBAH PADAT PADA JANUARI
2018**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Prasyarat Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Minat Utama *International
Security and Peace*

Disusun Oleh :

ADITA OCTAVIANA

145120407111027



**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

MALANG

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PROSES KEBIJAKAN LUAR NEGERI CINA DALAM
PELARANGAN SEBAGIAN IMPOR LIMBAH PADAT PADA JANUARI
2018**

SKRIPSI

Disusun Oleh :


Adita Octaviana

NIM. 145120407111027


Telah disetujui oleh dosen pembimbing :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Achmad Fathoni K, S.IP., MA

NIK. 2009068201231001


Irza Khurun'in, S.IP., MA.

NIK. 2017109105132001

Mengetahui,

Ketua Prodi Hubungan Internasional

Universitas Brawijaya



Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.Devst

NIP. 197802202010121001

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PROSES KEBIJAKAN LUAR NEGERI CINA DALAM PELARANGAN SEBAGIAN IMPOR LIMBAH PADAT PADA JANUARI 2018

SKRIPSI

Disusun Oleh :
Adita Octaviana
NIM. 145120407111027

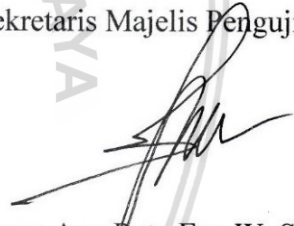
Telah diuji dan dinyatakan **LULUS** dalam ujian Sarjana
pada tanggal 18 Juli 2018

Tim Penguji :

Ketua Majelis Penguji

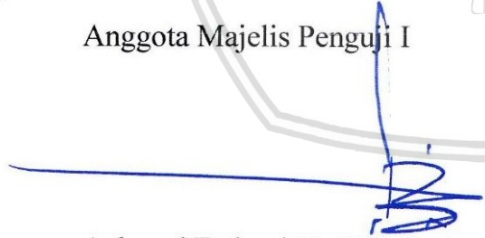
Sekretaris Majelis Penguji



M. Riza Hanafi, S.IP., MIA
NIK. 2011028002071001


Dewa Ayu Putu Eva W, S.IP., M.Si
NIP. 2013098708022001

Anggota Majelis Penguji I

Anggota Majelis Penguji II


Achmad Fathoni K, S.IP., MA
NIK. 2009068201231001


Irza Khurun'in, S.IP., MA.
NIK. 2017109105132001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak
NIK. 196908141994021001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Adita Octaviana

NIM : 145120407111027

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS PROSES KEBIJAKAN LUAR NEGERI CINA DALAM PELARANGAN SEBAGIAN IMPOR LIMBAH PADAT PADA JANUARI 2018”** adalah benar-benar karya dari penulis. Segala hal yang bukan merupakan cipta karya penulis dalam skripsi terlampir telah ditandai oleh catatan kaki dan tertuang dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian terbukti bahwa pernyataan yang saya nyatakan tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik yaitu berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 11 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,



Adita Octaviana

145120407111027

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Proses Kebijakan Luar Negeri Cina Dalam Pelarangan Sebagian Impor Limbah Padat Pada Januari 2018”**. Penulisan skripsi ini berisi tentang bagaimana proses pengambilan kebijakan luar negeri Cina dalam melarang impor sebagian limbah padat pada Januari 2018 dilihat dari pengambil kebijakan di level individu menggunakan teori poliheuristik.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang selalu dijadikan tuntunan dan panutan, serta selalu melindungi, memberikan anugerah-Nya berupa kekuatan, kesabaran, kesempatan, tempat berkeluh kesah dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar dan selesai pada waktunya.
2. Orang tua dan adik yang menjadi sumber ancaman dan tekanan, memberikan kekuatan dan keyakinan dan mereka yang tiada hentinya mengingatkan hingga memberikan doa, bantuan, saran, semangat, motivasi kepada penulis agar segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Achmad Fathoni Kurniawan, S.IP., MA selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah mengarahkan dan membantu penulis dalam penyelesaian

perkuliahan dalam 7 semester ini. Dan juga terima kasih atas waktu, kesabaran, bimbingan, arahan, masukan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Irza Khurun'in, S.IP., MA selaku Dosen Pembimbing kedua penulis yang telah membantu, meluangkan waktu dan membagi pemikirannya dengan penulis untuk menyelesaikan revisi penelitian ini.
5. Bapak M. Riza Hanafi, S.IP., MA selaku ketua majelis penguji dan Ibu Dewa Ayu Putu Eva Wishanti, S.IP., M.Si selaku sekretaris majelis penguji ujian komprehensif skripsi penulis yang memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penulisan skripsi ini.
6. Rosa Dwi Kirana selaku sahabat yang telah menemani perjuangan penulis mulai dari awal hingga akhir dan menjadi sahabat yang selalu mendengarkan curhatan serta memberikan saran bagi penulisan skripsi ini.
7. Kawan-kawan HI-mates yaitu Ayu, Hayu dan Nana yang selalu membantu, mengingatkan dan menjadi motivasi penulis agar segera menyelesaikan tulisan ini.
8. Ihsan Chairdiansyah dan R. Ipik Veradiba selaku dosen pembimbing ketiga penulis yang memberikan masukan hingga teori untuk menyempurnakan skripsi ini.
9. Anthea Reynda Fauztina selaku sahabat yang tidak lelah untuk mengingatkan penulis agar fokus dalam mengerjakan skripsi dengan mengesampingkan kegiatan komunitas penulis.
10. Big Family of Acakers, Atni, Bayu, Fravista, Galang, Helda, Karina, Lelyta, Nisa, Sandra dan Uzy yang telah menjadi tempat berkeluh kesah serta menghibur penulis ketika penat dalam menulis skripsi ini.

11. Nikita Nastiti Fadila selaku sahabat yang telah mengantarkan penulis mencari tandatangan ACC dosen pembimbing hingga ke Surabaya.
12. Aghnia Imani Arifiyanti, sahabat yang selalu sabar dan menjadi ibu ketika penulis mencurhatkan segala keluh kesah saat penulisan skripsi ini.
13. Sinyo, Hera dan Derry yang telah memberikan supportnya baik dari jauh atau dekat dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Nekomamushi, kucing kesayangan penulis yang telah menemani penulis di rumah dalam pengerjaan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi pelepas stres dan penat ku dengan waktu yang singkat itu. Rest in peace, Neko.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan pemakluman, saran dan kritik yang membangun sehingga mampu memberikan kualitas yang lebih baik untuk tulisan ini. Penulis mengharapkan agar penulisan ini dapat bermanfaat bagi semua jurusan dan mahasiswa lain.

Malang, 11 Agustus 2018

Penulis

ABSTRAK

Analisis Proses Kebijakan Luar Negeri Cina Dalam Pelarangan Sebagian Impor Limbah Padat Pada Januari 2018

Cina merupakan negara pengimpor limbah padat terbesar di dunia sejak 3 dekade yang lalu. Pada tahun 2016 saja, Cina mengimpor 7,3 juta ton yang bernilai 3,7 milyar dolar AS apabila dikalkulasikan sekitar 56% total impor sampah dunia. Impor limbah padat digunakan untuk menunjang industri daur ulang dan energi ramah lingkungan. Namun pada Januari 2018 Cina mengubah kebijakannya dengan melarang impor 24 jenis limbah padat. Hal ini dikarenakan limbah padat memberikan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat di Cina. Tulisan ini menjelaskan proses pengambilan kebijakan oleh Presiden Xi Jinping selaku aktor utama menggunakan teori poliheuristik. Dalam teori ini Presiden Xi Jinping mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu pilihan alternatif, dimensi-dimensi terkait dan implikasi. Dari analisis penulis tersebut pilihan kebijakan *partial ban* adalah pilihan yang paling rasional untuk diambil oleh Cina dengan kalkulasi *cost* paling rendah dan *benefit* yang paling tinggi.

Kata Kunci : Cina, Kebijakan Luar Negeri, Impor Limbah Padat, Teori Poliheuristik.

ABSTRACT

China's Foreign Policy Making Process on Solid Waste Partial Ban in January 2018

China is a largest importer of solid waste in the world since 3 decades. In 2016, China imported 7,3 million tons that has value of USD 3,7 billion similar to 56% of solid waste worldwide in calculation. Solid waste import bolsters up recycling markets and environmental renewable energy. However in January 2018 China has change its policy to ban 24 types of solid waste. The reason is it gives impact toward environment and public health in China. This paper analyzing the process of foreign policy making which Xi Jinping as the dominant actor through polyheuristic theory. Xi Jinping decided this policy by considering several aspects that is alternative options, dimensions related to, and implications. From the analysis, partial ban policy is the most rational choice to be taken by China which has lowest calculation and highest benefit.

Key Words : *China, Foreign Policy, Solid Waste Import, Polyheuristic Theory.*

Daftar Isi

DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penulisan.....	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Studi Terdahulu.....	14
2.2 Definisi Konseptual	19
2.2.1 Kebijakan Luar Negeri.....	19
2.3 Definisi Operasional	24
2.4 Alur Pemikiran.....	32
2.5 Argumen Utama	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	34
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.4 Teknik Analisa Data	34
3.5 Sistematika Penelitian.....	35
BAB IV GAMBARAN UMUM	37
4.1 Cina dalam industrialisasi limbah padat	37
4.2 Perkembangan limbah padat Cina.....	44
4.3 Kebijakan pengelolaan limbah padat Cina.....	48
4.4 Kebijakan larangan impor limbah padat Cina.....	51
BAB V ANALISIS PROSES PENGAMBILAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI CINA DALAM PELARANGAN IMPOR LIMBAH PADAT CINA PADA JANUARI 2018	58
5.1 Identifikasi <i>decisions matrix</i> dari pembuat kebijakan.....	59
5.1.1 Alternatif	60

5.1.2 <i>Dimensions</i>	66
5.1.3 <i>Implications</i>	75
5.2 Pengaplikasian kalkulasi Poliheuristik ke dalam matriks kebijakan.....	92
5.2.1 <i>Ultimate Decisions</i>	93
BAB VI PENUTUP	98
6.1 Kesimpulan	98
6.2 Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data kontribusi industri limbah dan daur ulang limbah terhadap perekonomian Cina

Tabel 1.2 Data tentang 24 jenis limbah yang dilarang

Tabel 2.1 Operasionalisasi konsep

Tabel 2.2 Tabel sumber dan jenis limbah padat

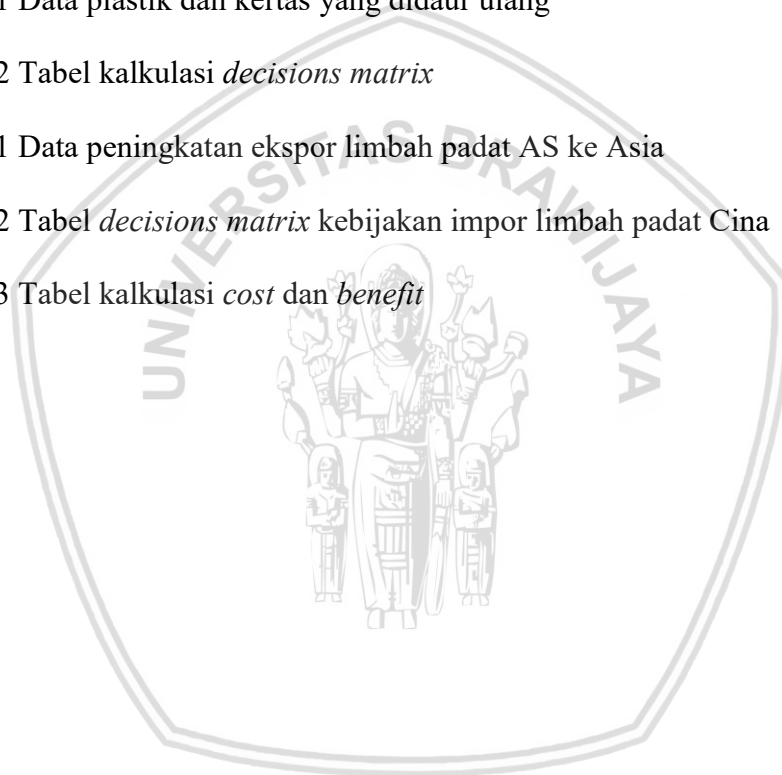
Tabel 4.1 Data plastik dan kertas yang didaur ulang

Tabel 4.2 Tabel kalkulasi *decisions matrix*

Tabel 5.1 Data peningkatan ekspor limbah padat AS ke Asia

Tabel 5.2 Tabel *decisions matrix* kebijakan impor limbah padat Cina

Tabel 5.3 Tabel kalkulasi *cost* dan *benefit*



DAFTAR GAMBAR

Grafik 4.1 Skema perdagangan limbah antar negara maju dan berkembang

Grafik 4.2 *Top 10 issuers of green bonds Jan-Nov 2017*



DAFTAR SINGKATAN

CPC	<i>Chinese Communist Party</i>
SEPA	<i>The State Environmental Protection Administration</i>
UNEP	<i>United Nations of Environmental Protection</i>
WTO	<i>World Trade Organization</i>



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pada 1 Januari 2018 Cina telah mengeluarkan kebijakan pelarangan 24 jenis limbah padat, menarik untuk mengkaji hal tersebut mengingat Cina telah mengimpor limbah padat selama 30 tahun. Impor limbah padat di Cina digunakan untuk berbagai hal seperti bahan baku industri daur ulang dan teknologi insinerasi. Setelah adanya penerapan kebijakan pelarangan sebagian impor limbah padat atau secara spesifik 24 jenis limbah padat tersebut, Kementerian Perlindungan Lingkungan Cina menyebutkan bahwa terjadi penurunan kuantitas impor limbah padat sebesar 57 persen pada satu semester pertama 2018 atau awal penerapan kebijakan itu diberlakukan.¹

Dilihat dari sejarahnya Cina telah melakukan impor sampah dari negara-negara lain sejak beberapa puluh tahun yang lalu.² Hal ini dapat dilihat dimana pada saat itu produksi plastik secara global telah mengalami peningkatan secara pesat. Jumlah plastik yang diproduksi dalam 10 tahun terakhir sama dengan semua plastik yang di produksi selama 30 tahun sebelumnya dari 1,5 juta metrik ton (Mt) pada tahun 1950 menjadi 288 Mt pada tahun 2012.³ Impor sampah jenis plastik mengalami peningkatan

¹ Xinhua, *China imports less solid waste in Q1*, Online, diakses dari

http://www.xinhuanet.com/english/2018-06/18/c_137262282.htm pada 9 Agustus 2018

² Collective Responsibility, *Plastic Waste in China*, The Collective, 25 November 2015, diakses dari <http://www.coresponsibility.com/plastic-waste-in-china/> pada 28 Februari 2018.

³ https://www.iswa.org/.../TFGWM_Report_GRM_Plastic_Chi...

secara signifikan.⁴ Selain meningkatnya jumlah plastik yang di produksi Cina juga menjadi pengimpor sampah plastik internasional terbesar di dunia.⁵

Tahun 1998 hingga tahun 2008 impor limbah padat rata-rata mengalami peningkatan. Sedangkan pada tahun 2008 ke tahun 2009 mengalami penurunan dan setelah itu meningkat kembali. Jepang adalah negara eksportir limbah plastik terbesar di Cina pada tahun 2016 dengan nilai sebesar 38% yang disusul oleh AS (31%), Jerman (17%) dan Australia (14%).⁶ Selain plastik Cina juga mengimpor limbah padat lainnya, menurut data Trading Economic Cina terdapat peningkatan mulai Februari 2016 sebesar 1,6 milyar dolar AS hingga Januari 2017 menjadi 1,8 milyar dolar.⁷ Impor limbah padat Cina rata-rata pada tahun 2014 hingga 2017 adalah 1,8 milyar dolar AS. Impor limbah padat tersebut termasuk limbah plastik, kertas maupun limbah logam dari barang-barang bekas. Selama ini Cina melakukan impor barang bekas untuk diolah kembali atau di daur ulang, lalu dijadikan barang manufaktur dan di ekspor kembali ke negara-negara lain⁸.

Industri pengelolaan limbah dunia merupakan industri yang masih tumbuh secara signifikan. PBB memprediksi industri ini akan tumbuh

⁴ Anonim, diakses dari <https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/line/hs92/import/chn/show/3915/1995.2016/> pada 27 Januari 2018.

⁵ Ibid.

⁶ https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/chn/show/3915/2016/ diakses pada 1 Februari 2018.

⁷ Trading Economics, *China Data of Import Solid Waste*. Online. Diakses dari <https://tradingeconomics.com/china/imports-of-solid-wastewaste-plastics-waste-paper> pada 01 Februari 2018.

⁸ Op.cit, Jenny Wilen.

hingga 66% pada tahun 2050.⁹ Hal ini dimotori oleh pertumbuhan urbanisasi di dunia. Negara maju mengandalkan negara Cina sebagai negara tujuan surplus limbah mereka. Pada tahun 2012 Cina telah meraup \$107,5 milyar, angka ini awalnya diprediksi akan tumbuh hingga mencapai \$156 milyar pada tahun 2018.¹⁰ Namun prediksi yang dikeluarkan oleh BBC *research* pada tahun 2014 tersebut belum melibatkan isu atau wacana tentang larangan impor limbah padat yang akhirnya terjadi pada tahun 2018.

Tabel 1.1 Data kontribusi industri limbah dan daur ulang limbah terhadap perekonomian Cina

Tahun	Kontribusi terhadap perekonomian Cina
2012	\$ 107,5 Milyar
2013	\$ 102,8 Milyar

Sumber : World Bank

Tabel diatas menjelaskan berapa nilai akumulasi total per tahun dilihat dari industri limbah Cina secara keseluruhan. Jika melihat GDP Cina pada tahun 2012 menurut data World Bank adalah \$8,5 triliyun. Apabila dikalkulasikan industri sampah mempunyai 1,2 % dari GDP Cina tahun 2012 yaitu \$8,561 triliyun tersebut.¹¹

Terdapat beberapa keuntungan dari adanya daur ulang sampah *foreign garbage* di Cina, yaitu Cina dapat dimanfaatkan untuk

⁹ Becky Davis, Lilian Ding. Mail & Guardian : *China's waste import ban upends global recycling industry*. Online. Diakses dari <https://mg.co.za/article/2018-01-21-chinas-waste-import-ban-upends-global-recycling-industry> pada 1 Agustus 2018

¹⁰ Jason Chen, Global markets, *a BBC Research Report*, Online, Diakses dari <https://www.bccresearch.com/market-research/environment/recycling-markets-china-env009b.html> pada 1 Agustus 2018.

¹¹ World Bank, *China GDP Data*, Online. Diakses dari <https://data.worldbank.org/country/china> pada 1

menghasilkan listrik dari limbah sampah dengan alat bernama insinerator sampah-sampah akan dibakar ke dalam alat tersebut dan dari pembakaran itu tidak menghasilkan emisi karbon yang berlebihan.¹² Di distrik Chaoyang Beijing terdapat 178 insinerator yang mampu menghasilkan listrik untuk 140.000 rumah.¹³ Ini merupakan salah satu hal yang menyebabkan adanya permintaan plastik daur ulang yang tinggi dari produsen dan pabrik Cina. Selain itu, kelangkaan bahan baku plastik adalah hal lain yang menyebabkan permintaan limbah.¹⁴ Dapat dilihat dari adanya pergeseran produksi plastik dari barat ke Asia yaitu sebesar 24 % produksi plastik dunia terdapat di Cina. Selain itu, apabila menggunakan sampah dalam negeri sendiri tidak memiliki kualitas sebaik sampah-sampah dari negara maju.¹⁵ Oleh karena itu, selama ini pemerintah melakukan impor sampah dari negara lain.

Keuntungan didapatkan dari kedua pihak dalam melakukan perdagangan sampah, eksportir mendapat pengembalian sisa limbah mereka dan importir mendapat akses ke persediaan bahan daur ulang secara stabil, lebih murah dan lebih sedikit energi mentah dari domestik.¹⁶

¹² Rob Scmitz, *The Burning Problems's of China Garbage*, National Public Radio, diakses dari <https://www.npr.org/sections/parallels/2017/02/20/515814016/the-burning-problem-of-Cinas-garbage> pada 01 Februari 2018

¹³ Ibid.

¹⁴ Seng Li Peng, *China's plastic demand to rise as foreign garbage ban to curb recycled supply*, Environment, Reuters, diakses dari <https://www.reuters.com/article/us-china-plastics-demand/chinas-plastic-demand-to-rise-as-foreign-garbage-ban-to-curb-recycled-supply-idUSKCN1BO0J8> diakses pada 1 Februari 2018.

¹⁵ Op.cit, Rob Scmitz.

¹⁶ D.D, *Why Cina is sick of foreign garbage*, The Economist, dalam <https://www.economist.com/blogs/economist-explains/2017/08/economist-explains-8> diakses pada 17 Januari 2018.

Berbagai permasalahan pun muncul di Cina meskipun terdapat keuntungan ekonomi dari impor sampah tersebut. Salah satunya adalah sampah impor yang berada di Utara Cina menumpuk, penumpukan terjadi karena banyaknya sampah tidak sepadan dengan masyarakat yang mampu memilah sampah tersebut. Masyarakat lokal hanya memakai teknik kasar dan fasilitas yang kurang dalam memilah atau mengelola sampah tersebut.¹⁷ Beberapa penelitian melaporkan kadar logam beracun yang tinggi seperti timbal (pb), kadmium (Cd), merkuri (Hg), tembaga (Cu) dan sebagainya, dan polutan organik seperti hidrokarbon aromatik polisiklik (PAH), bifenil poliklorinat (PCB), dan diuvin dibenzo-poxox / dibenzofurans (PCBB / Fs) telah mencemari lingkungan dimana masyarakat mengelola sampah.¹⁸ Dengan menghirup langsung, paparan kulit dan asupan makanan dan air secara oral, pekerja dan penduduk setempat mungkin terpengaruh oleh kontaminan beracun ini.¹⁹ Karena hal tersebut, sampah menumpuk dan menyebabkan kontaminasi terhadap sungai dan lahan-lahan pertanian, dan kesehatan pekerja yang menjadi buruk.²⁰

Di daerah Guiyu Cina, tingkat paparan dioksin manusia hampir 10-15 kali lebih tinggi daripada standar maksimum dari WTO. Anak-anak yang berada di tempat daur ulang seperti itu memiliki kadar Pb dan Cd darah yang jauh lebih tinggi. Sekitar 70,8% anak-anak memiliki kadar pb

¹⁷ Lin Wei, Thesis, *Present status of e-waste disposal and recycling in China*, 2012, diakses dari <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029612006081> pada 25 Februari 2018.

¹⁸ Ibid, lin wei. Hal.4

¹⁹ Ibid, lin wei. Hal. 4

²⁰ Ibid, lin wei Hal 5.

darah lebih dari 10 ug / dL dan 20,1% anak-anak memiliki kadar Cd darah lebih dari 2 ug / L.²¹ Dalam kadar tinggi tersebut berpotensi meningkatkan dan menyebabkan penyakit pernapasan, infeksi kulit, leukimia dan penyakit serius lain.²² Masalah ini yang menjadi fokus pemerintah Cina dalam melihat industri daur ulang sampah.

Selain itu, berbagai kritikan terhadap pemerintah Cina muncul melalui berbagai cara. Misalnya pada tahun 2002 pemerintah Cina mendapatkan kritikan dengan tersebarnya dokumentasi bahwa pekerja di Provinsi Guangdong membuang sisa kandungan berbahaya ke sungai. Selain itu, adanya film berjudul *Plastics Cina* yang menceritakan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh industri daur ulang plastik.²³

Hal ini menarik untuk menjadi fokus penelitian penulis bahwa limbah-limbah tersebut mempunyai keuntungan tetapi dilain sisi membawa kerugian. Pemerintah Cina selama ini melakukan impor limbah asing, untuk digunakan memenuhi permintaan domestiknya. Tetapi berbagai masalah muncul yang pada akhirnya pemerintah Cina melakukan pelarangan terhadap beberapa jenis limbah padat.

Pemerintah Cina melarang 24 jenis atau kategori limbah padat, padahal beberapa produk dari limbah tersebut akan menunjang energi ramah lingkungan yang menjadi fokus kebijakan Presiden Xi Jinping saat

²¹ Zheng L, Wu K, Li Y, et al. *Blood lead and cadmium levels and relevant factors among children from an e-waste recycling town in China* [J]. Environmental Research. 2008, 108(1): 15-20

²² Lin Wei, Op.cit hal 4.

²³ Ibid.

ini. Berikut adalah beberapa jenis limbah padat yang dilarang masuk ke

Cina, yaitu :

Tabel 1.2 Data tentang 24 jenis limbah padat yang dilarang

No.	Kelas	Kode	Jenis
1.	<i>Vanadium Slag</i>	2619	Kerak
			Sampah (Selain terak butiran)
			Scalings dan limbah lainnya dari pembuatan besi dan baja
			Yang mengandung arsen, logam atau senyawanya.
2.	Limbah plastik dari kebutuhan rumah tangga	3915	limbah wol atau bulu hewan halus atau kasar
			Limbah plastik
			<i>Parings</i>
			Skrap plastik
			Limbah benang
3.	Limbah Kertas yang belum di sortir	4707	Kertas belum di sortir
4.	Limbah Berbahan Tekstil	5103;5104;5202;5505;6310	Garnetted Stock (Wool, bulu hewan)
			<i>Waste (noils, yarn waste, and garnetted stock) of man-made fibres.</i>
			Kain baru atau bekas
			Benang bekas
			Tali pengikat
			Tali dan Kabel
			Barang tenunan dari benang

Sumber : Data dari Nota World Trade Organization (WTO)

Berangkat dari kondisi tersebut, maka menarik meneliti tentang kebijakan lingkungan Cina. Pertama, Cina merupakan pengimpor terbesar sampah dunia. Kedua, dari kebijakan itu kita dapat melihat dampak untuk Cina yaitu apakah Cina lebih mempertahankan fokus kebijakan

pemerintah Cina yang ramah lingkungan atau menghilangkan sampah-sampah asing dengan menghentikan industri daur ulang sampah itu sendiri. Kebijakan tersebut memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap industri daur ulang di Cina, tetapi di lain sisi pemerintah Cina ingin membuat lingkungan mereka bersih dari limbah asing.

Berbagai upaya kebijakan telah dijalankan oleh pemerintah Cina, hal ini dapat dilihat dari mulai tahun 2011 pemerintah melalui Kementerian Lingkungan dan empat kementerian lainnya melakukan tindakan untuk membuat rincian daftar impor limbah padat dan meminta pemerintah daerah untuk memperkuat penegakan hukum mengenai hal itu.²⁴ Pada tahun 2013 pemerintah Cina meluncurkan *Operation Green Fence*, yaitu sebuah kampanye untuk melarang impor limbah ilegal dan berkualitas rendah melalui inspeksi kapal kontainer.²⁵ Tahun 2014, Kementerian Lingkungan Hidup kembali mengeluarkan pengumuman tentang pengelolaan limbah padat, serta mengkritik kelalaian pejabat setempat yang korupsi terkait pengelolaan limbah sampah.²⁶

Hingga pertengahan tahun 2017 kemarin, pemerintah mengumumkan kebijakan larang impor 24 jenis limbah padat. Inti dari kebijakan Cina sudah cukup melakukan impor barang bekas dan akhir tahun 2017 pemerintah Cina memberitahu WTO atau *World Trade Organization* bahwa Cina akan memberhentikan penerimaan sebagian

²⁴ MEP, *Solid Waste Import Management Measures*, 8 April 2011, diakses dari http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/bl/201105/t20110520_210978.htm pada 4 Februari 2018.

²⁵ Ibid.

²⁶ MEP, *Strengthen the system of construction and clean up the 'pass'*, 3 April 2014, diakses dari http://jcj.mep.gov.cn/mtgz/201403/t20140303_268671.html pada 17 Januari 2018.

besar plastik daur ulang, kertas, tekstil dan produk lainnya dari luar negeri.²⁷ Dengan dikeluarkannya kebijakan mengenai larangan impor sampah oleh Pemerintah Cina, masyarakat atau penduduk Cina menyambut baik keputusan tersebut. Di sisi lain, mayoritas masyarakat Cina dikejutkan oleh fakta bahwa Cina telah mengimpor limbah secara legal selama bertahun-tahun.²⁸

Dasar larangan dari kebijakan pelarangan sebagian limbah tersebut mengacu pada *Law of the People's Republic of China on the prevention & control of environmental pollution by solid waste*.²⁹ Dalam dokumen resmi dijelaskan bahwa Cina ingin menstandarisasi manajemen impor limbah padat dan mencegah pencemaran lingkungan agar tidak berkepanjangan.³⁰ Agen pemerintahan yang turut ikut serta dalam pembuatan kebijakan adalah Kementerian Perlindungan Lingkungan, Kementerian Perdagangan, *National Development & Reform Commission*, dan *General Administration of Customs*.³¹

Kebijakan pelarangan sebagian impor 24 jenis limbah padat itu berlaku mulai 1 Januari 2018.³² Keputusan itu dinyatakan sebagai bagian dari kampanye melawan *foreign garbage* yang membahayakan kesehatan

²⁷ Adam Minter, *Cina's War on Foreign Garbage*, Bloomberg View on Environment, dalam <https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-07-20/Cina-s-war-on-foreign-garbage> diakses pada 17 Januari 2018.

²⁸ Diplomat, Ibid.

²⁹ Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic of China, *Announcement on Adjusting the Catalogue of Imported Waste Management*, diakses dari http://www.mep.gov.cn/gkml/sthjbgw/sthjbgg/201804/t20180419_434911.htm?COLLCC=3045522796& pada 1 Agustus 2018

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

³² Dokumen WTO, diakses dari https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=237688&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True pada 17 Februari 2018

masyarakat dan lingkungan.³³ Keputusan itu berbeda dengan tindakan pemerintah Cina sebelumnya, bahwa kebijakan diambil langsung oleh Presiden Xi Jinping sendiri.³⁴ Pada saat Pertemuan Komite Utama Grup Shenzhen ke-34 atau *The 34th Meeting of the Central Committee of the Shenzhen Restructuring Group* yang diadakan khusus untuk memeriksa dan menyetujui implementasi rencana kebijakan larangan *foreign garbage* ke Cina, serta untuk mempromosikan reformasi sistem pengelolaan terbaru untuk impor limbah padat Cina.³⁵ Pertemuan tersebut menggarisbawahi bahwa semua departemen dan wilayah di berbagai daerah harus melaksanakan reformasi dan penerapan dari pemerintah pusat.³⁶

Selain itu dalam pidato Presiden Xi Jinping pada saat Communist Party of China (CPC) National Congress ke-19 (18 Oktober 2017) bagian ke 9 yaitu *Speeding up Reform of the System for Developing an Ecological Civilization and Building a Beautiful China* artikel 2³⁷,

“We will strengthen the control of soil pollution and the restoration of polluted soil, intensify the prevention and control of agricultural pollution from non-point sources, and take measures to improve rural living environments. We will improve the treatment of solid waste and garbage.”

Pandangan Cina terhadap isu lingkungan saat ini dapat dilihat politik lingkungan di Cina, Cina mencoba menerapkan *environmental*

³³ Ibid.

³⁴ Charlotte Gao, *The Diplomat : Cina ‘Urgently’ Bans Foreign Trash Imports*, Online. Diakses dari <https://thediplomat.com/2017/07/Cina-urgently-bans-foreign-trash-imports/> pada 17 Februari 2018

³⁵ http://www.mep.gov.cn/xxgk/hjyw/201704/t20170419_411714.shtml

³⁶ MEP, Ibid.

³⁷ China Daily, *Full Text of Xi Jinping’s report at 19th CPC National Congress* 4 November 2017, diakses dari http://www.chinadaily.com.cn/china/19thcpcnationalcongress/2017-11/04/content_34115212.htm pada 19 Februari 2018

diplomacy.³⁸ Bahwa Cina saat ini berfokus partisipasi dan kepatuhan pada rezim internasional, mengambil peran dalam politik lingkungan baik level regional atau transnasional. Dunia internasional telah secara bertahap mengakui pentingnya partisipasi Cina dalam pembangunan tata kelola lingkungan global dan penerimaan norma-norma internasional. Terdapat peningkatan yang signifikan dilihat dari reformasi sektor lingkungan baik dalam tingkat multilateral, bilateral, dan non pemerintah. Hal ini secara nyata dapat dilihat dari keikutsertaan Cina beberapa tahun terakhir ini yaitu mengikuti *Paris Agreement*, UNFCCC, dan TPP. Partisipasinya dalam negosiasi lingkungan internasional dan penandatanganan perjanjian lingkungan lain telah mengubah pembuatan kebijakan terkait lingkungan dan turut mengubah persepsi pembuat kebijakan.³⁹

Presiden Xi Jinping sangat berpengaruh penting dalam pengambilan kebijakan luar negeri khususnya dalam hal impor limbah ini, hal ini dapat dilihat dari proses pengambilan kebijakan di Cina yang terpusat. Presiden Xi termasuk didalam jajaran eksekutif atau di dalam sistem politik Cina sering disebut Politburo. Presiden Xi juga menjadi pemimpin tunggal dari Kongres Partai Chinese Communist Party (CPC) setiap tahunnya. Apabila dilihat dalam kasus ini, pembuatan kebijakan diambil pada saat Kongres Nasional Partai CPC tetapi untuk administrasi dan kategorisasi akan di kelola oleh Kementerian Perlindungan Lingkungan atau MEP. Selain itu,

³⁸ Fengshi Wu, *Environmental Politics in China: An issue area in review*, Journal of Chinese Political Science/Association of Chinese Political Studies, diakses dari <https://search.proquest.com/docview/225427668/FD810027931D46D2PQ/1?accountid=46437> pada 1 Agustus 2018

³⁹ Ibid, hal 393.

Presiden Xi Jinping mempunyai *power* yang kuat di pemerintahan Cina. Mulai dari konsep dan kebijakan pembangunan domestik, ekologi, pertahanan nasional, kampanye korupsi hingga kebijakan luar negeri memang dibawah instruksi langsung Presiden Xi Jinping.⁴⁰

Tulisan ini akan diteliti menggunakan Teori Poliheuristik yang mana penulis akan menganalisis level individu pembuat kebijakan. Alasan digunakannya teori poliheuristik karena penulis melihat sistem pengambilan kebijakan di Cina yang terpusat dan aktor yang berpengaruh adalah Presiden Xi Jinping. Teori poliheuristik mencoba mengintegrasikan antara kognitif individu dengan *rational choice* pembuat kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang dan data diatas, penulis melihat fenomena ini memiliki urgensi untuk diteliti karena perubahan kebijakan Cina dengan cara melarang impor sampah bekas untuk di daur ulang, faktanya Cina telah menjadi negara importir utama sampah dari negara lain dalam kurun waktu 3 dekade terakhir dan berusaha menggunakan sampah-sampah itu guna menunjang kebijakan ramah lingkungan Cina. Secara berturut-turut Cina melakukan impor, hingga pada akhirnya pemerintah melakukan pembuatan kebijakan terkait larangan 24 tipe limbah untuk masuk ke negara itu. Penulis akan mencoba menganalisis Cina dengan menggunakan teori Poliheuristik dengan tujuan melihat proses pengambilan kebijakan luar negeri Cina dalam impor limbah padat.

⁴⁰ Michael D. Swaine, *China Leadership Monitor*, diakses dari <https://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/clm48ms.pdf> pada 19 Februari 2018

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana proses pengambilan kebijakan pemerintah Cina dalam pelarangan sebagian impor limbah padat pada Januari 2018?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui proses pengambilan kebijakan pemerintah Cina dalam melarang sebagian impor limbah padat Januari 2018 dengan menggunakan teori Poliheuristik.
- b. Untuk mengetahui proses pengambilan kebijakan melalui 2 tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi dan tahap kedua adalah pengaplikasian.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Praktis : Menambah wawasan pembaca untuk lebih memahami bagaimana proses pengambilan kebijakan pemerintah Cina dalam melarang impor limbah padat tahun 2018.
- b. Manfaat Teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmiah terhadap perkembangan teoritis ilmu sosial, khususnya ilmu hubungan internasional, salah satunya dapat memberikan manfaat untuk pembaca yang hendak melakukan penelitian dengan fokus penelitian yang sama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Studi Terdahulu

Studi terdahulu memiliki fungsi yakni digunakan sebagai referensi atau acuan yang digunakan oleh penelitian-penelitian selanjutnya. Pada penelitian ini penulis akan menggunakan berbagai studi terdahulu guna mendukung penelitian penulis. Studi terdahulu yang digunakan oleh penulis memiliki persamaan isu, namun memiliki perbedaan. Letak perbedaannya yakni pada teori atau konsep yang digunakan. Kemudian, memiliki persamaan yakni persamaan pada penggunaan teori atau konsep namun berbeda pada isu atau fenomena yang diteliti.

Studi terdahulu yang digunakan penulis untuk membantu penelitian ini adalah jurnal penelitian dari Lin Wei dan Yangsheng Liu dengan judul *Present status of e-waste disposal and recycling in Cina* yang dilakukan pada tahun 2012.⁴¹ Jurnal ini menjelaskan tentang status industri limbah elektronik dan sistem peraturan yang ada di Cina.

Dalam perkembangan sains dan teknologi, terjadi pula peningkatan konsumsi produk listrik dan elektronik di seluruh dunia. Perkembangan dari peralatan elektronik juga terbilang cukup pesat ketika muncul berbagai fungsi dan desain-desain baru yang mendorong setiap individu membeli produk elektronik terbaru. Hal ini yang menyebabkan peningkatan limbah elektronik. Pada tahun 2010 secara global limbah elektronik yang dihasilkan sebesar 40 juta ton per tahun, sementara Cina diperkirakan memproduksi sekitar 2,3 juta ton. Selain memproduksi elektronik, Cina merupakan salah satu penerima e-waste terbesar dan

⁴¹ Op.cit, Lin Wei.

produk elektronik bekas dari negara maju. Tetapi munculah masalah ketika terdapat sebuah laporan dari UNEP, bahwa sekitar 70% limbah elektronik dikirim secara ilegal ke Cina setiap tahunnya.

Limbah elektronik terkadang mengandung racun dan beberapa zat berbahaya. Ketika penanganan dan pengelolaan limbah-limbah elektronik tersebut dilakukan dengan cara yang salah, maka akan menimbulkan beberapa dampak berbahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Akibatnya pemerintah Cina memberikan perhatian lebih pada isu-isu HAM, ilmuwan dan masyarakat umum yang menangani limbah tersebut.

Berbeda dengan aliran limbah domestik Cina, terdapat tiga tujuan limbah-limbah elektronik domestik (yang dihasilkan) di Cina. Pertama limbah elektronik domestik akan masuk ke pasar barang bekas, karena mayoritas orang Cina lebih suka menyimpan peralatan rumah tangga lama mereka di rumah atau kantor daripada membuangnya. Apabila terdapat penawaran harga yang menurut si penjual baik, ia akan bersedia menjual limbah elektronik yang tidak terpakai itu. Kedua limbah elektronik mungkin akan disumbangkan untuk orang-orang miskin di Cina barat, tetapi hal tersebut diatur oleh peraturan tertentu sehingga tindakan untuk alih-limbah itu dilarang. Ketiga limbah elektronik bisa didaur ulang oleh perusahaan swasta untuk bahan baku, caranya membeli limbah elektronik di pengguna rumah tangga dengan harga relatif rendah, namun perusahaan swasta juga tidak memiliki fasilitas pembuangan (TPA) yang profesional dan memenuhi standar. Hal seperti inilah yang pada akhirnya mencemari lingkungan terutama disebabkan oleh saluran pembuangan limbah elektronik.

Dalam jurnal Lin Wei dijelaskan juga bahwa terdapat sektor daur ulang di Cina yang tidak formal. Seperti di Guiyu, sebuah kota yang menjadi tempat daur ulang limbah elektronik memiliki populasi sekitar 150.000 orang dan hampir 100.000 diantaranya adalah buruh yang terlibat dalam operasi daur ulang limbah elektronik, serta buruh-buruh tersebut diberi upah sangat rendah. Buruh-buruh tersebut masih menggunakan banyak teknik primitif yang kasar seperti membongkar peralatan elektronik, pemanasan dan pengangkatan komponen secara manual dari papan cetak, mengelupas kabel dan dibakar untuk dipulihkan menjadi logam, mencairkan plastik, pencucian asam limbah elektronik untuk memulihkan logam mulia.

Akibatnya timbul dampak lingkungan dan kesehatan dari teknik atau metode yang konvensional, dimana mereka menghasilkan banyak logam berat beracun dan polutan organik ke tempat kerja dan lingkungan sekitar. Beberapa penelitian telah melaporkan kadar logam berat yang tinggi, seperti timbal (Pb), kadmium (Cd), Merkuri (Hg), Tembaga (Cu) dan polutan organik seperti polisiklik (PAH), bifenil poliklorinat (PCB), dan diuvin benzo-poxox / dibenzofurans (PCBB / Fs) di udara, air, tanah dan sedimen yang terpapar di lingkungan pekerja.

Dalam jurnal Lin Wei, juga memaparkan tentang kebijakan pengelolaan limbah elektronik di Cina melalui berbagai undang-undang, peraturan, kebijakan, standar, dan panduan teknis untuk mengelola daur ulang limbah elektronik di Cina.

Perbedaan penelitian Lin Wei dengan penelitian penulis adalah kasus yang digunakan dimana penulis akan meneliti kebijakan larangan impor limbah padat Cina sedangkan Lin Wei lebih fokus meneliti mengenai status/keadaan dari tempat pembuangan dan daur ulang limbah elektronik di Cina. Sedangkan persamaan

dengan penelitian ini adalah kasus yang digunakan yakni sama-sama meneliti tentang industri dan pengelolaan (daur ulang) sampah di Cina.

Studi terdahulu yang kedua yakni dari Alex Mintz dengan jurnal yang berjudul "*How do leaders make decisions?: A poliheuristic Perspective*" dalam jurnal tersebut dijelaskan mengenai fenomena kasus bagaimana proses pembuatan kebijakan luar negeri Turki dalam menolak bantuan Amerika Serikat dalam penempatan 62.000 tentara AS ke Turki hal ini dalam menanggapi serangan terhadap Irak.⁴² Keputusan tersebut ditolak oleh pemerintah Turki karena oposisi publik lebih kuat, meskipun terdapat tawaran lagi dari Amerika Serikat atas bantuan ekonomi yang cukup besar yaitu sekitar 30 milyar dolar Amerika Serikat dalam bentuk hibah dan jaminan pinjaman. Selain itu Amerika Serikat juga memberikan tekanan terhadap Uni Eropa untuk menerima Turki ke dalam kawasan tersebut.

Meskipun banyak keuntungan yang akan di dapat dari tawaran Amerika Serikat, parlemen Turki memilih untuk tidak mengambil tawaran tersebut. Langkah parlemen Turki merupakan salah satu contoh penggunaan prinsip non kompensasi teori poliheuristik dari pengambil kebijakan yaitu pemimpin negara dan politisi lain. Meskipun skor yang sangat tinggi pada dimensi bantuan ekonomi, dan skor yang rendah pada dimensi politik yaitu opini publik tidak memberi kompensasi atas manfaat ekonomi yang diharapkan, sehingga tidak disetujui oleh parlemen. Dalam istilah non kompensasi, tidak ada efek substitusi atau pertukaran antara dimensi politik dan ekonomi dari keputusan tersebut.

Begitu keputusan untuk menolak keputusan tersebut dikeluarkan oleh Turki, pemerintah Turki melakukan evaluasi terhadap alternatif yang tersisa dan

⁴² Alex Mintz, 2014, *Journal of Conflict Resolution*, Vol. 48, No 1 How do leaders make decisions? : A polyheuristic theory. Feb 2004. Online diakses dari www.jstor.org/stable/3176265

melanjutkan ke tahapan kedua. Yaitu berupaya untuk meminimalkan biaya yang banyak dan memaksimalkan keuntungan. Salah satu variabel dari teori poliheuristik adalah menghindari kerugian politik non kompensif. Beberapa kerugian itu dalam kasus Turki adalah ancaman terhadap kelangsungan pemimpin, penurunan dukungan publik secara signifikan, penurunan popularitas, prospek masa depan dalam pemilihan selanjutnya, ancaman terhadap rezim, tantangan internal atau eksternal terhadap rezim, potensi runtuhnya koalisi, ancaman terhadap kekuatan politik, martabat, kehormatan hingga legitimasi pemimpin, demonstrasi dan sebagainya.

Dalam jurnal Alex Mintz, dijelaskan mengenai apa teori poliheuristik dalam pengambilan kebijakan dalam level individu, bahwa individu akan bermain dalam 2 proses tahapan, tahapan pertama dengan mengidentifikasi alternatif, dimensi dan implikasi. Tahapan kedua mengaplikasikan kalkulasi poliheuristik terhadap *decisions matrix*.

Perbedaan dari jurnal Alex Mintz dengan penelitian penulis adalah Alex melihat dari kebijakan Turki dalam menolak bantuan Amerika Serikat dalam pemberian pasukan dan bantuan ekonomi, sedangkan penulis melihat proses pengambilan kebijakan Cina dalam larangan impor limbah padat. Sedangkan persamaan dengan penelitian ini adalah teori yang digunakan yakni sama-sama menggunakan teori Poliheuristik milik Alex Mintz. Kontribusi yang diberikan oleh studi terdahulu kedua ini adalah dapat membantu penulis dalam memahami teori proses pengambilan kebijakan di level individu yang dicetuskan oleh Alex Mintz menggunakan 2 proses tahapan.⁴³

⁴³ Ibid.

2.2 Definisi Konseptual

2.2.1 Kebijakan Luar Negeri

Ketika melakukan hubungan dengan negara lain, suatu negara memerlukan kerangka politik dan kebijakan yang pasti sebagai cara untuk mencapai kepentingan nasionalnya dalam sistem internasional. Maka dari itu suatu negara memerlukan adanya kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri secara umum dapat dikatakan merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara atau komunitas politik lainnya dalam hubungan dengan negara dan aktor bukan negara di dunia internasional.⁴⁴

Menurut K.J Holsti kebijakan luar negeri dapat diartikan sebagai instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di suatu negara berdaulat untuk menjalin hubungan dengan aktor-aktor lainnya dalam politik dunia internasional demi mencapai tujuan nasionalnya.⁴⁵ Hal ini berarti keputusan negara dalam mengeluarkan suatu kebijakan luar negeri didasarkan pada kondisi domestik negara karena menyangkut kepentingan yang hendak dicapai serta kondisi eksternal negara dalam sistem internasional.

Mirip dengan pendefinisian kebijakan luar negeri K.J Holsti, Mark R. Amstutz, mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai tindakan eksplisit dan implisit dari pejabat pemerintah untuk merancang kepentingan nasional negaranya agar dapat mempromosikan kepentingan nasional tersebut, melampaui batas-batas teritorial suatu negara.⁴⁶ Definisi Amstutz lebih

⁴⁴Abubakar Eby Hara. Pengantar Analisa Politik Luar Negeri dari Realisme Sampai Konstruktivisme, Bandung: Nuansa, 2011, Hal.15

⁴⁵ K.J Holsti, *National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy*, University of British Columbia, 2012. Hal. 222.

⁴⁶ Mark R, Amstutz. *International Conflict and Cooperation: A Introduction to World Politicts*. Dubuque, Brown dan Benchmark. Hal. 146.

menekankan pada kebijakan luar negeri sebagai alat suatu negara yang dirancang oleh pemerintahnya untuk mencapai kepentingan nasionalnya melampaui teritorial negara.

Sedangkan menurut Charles Hermann kebijakan luar negeri didefinisikan sebagai tindakan-tindakan resmi para pembuat keputusan yang berwenang dalam pemerintah suatu negara ataupun lembaga-lembaga mereka, yang dimaksud oleh para pembuat keputusan untuk mempengaruhi perilaku aktor internasional di luar negara mereka.⁴⁷ Pendefinisian menurut Herman lebih berfokus pada kebijakan luar negeri digunakan oleh pihak pembuat kebijakan untuk dapat merubah dan mempengaruhi perilaku-perilaku aktor internasionalnya sehingga sesuai dengan tujuan pembuat kebijakan.

Kebijakan luar negeri menurut James N. Rosenau adalah sebuah upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya.⁴⁸ Menurut kebijakan luar negeri merupakan fenomena yang sangat luas dan kompleks. Hal itu terjadi karena melibatkan kehidupan internal dan kebutuhan eksternal contohnya adalah aspirasi, atribut nasional, konflik, kapabilitas, aktivitas yang dibertujuan untuk mencapai identitas sosial, hukum dan geografi suatu Negara sebagai negara bangsa. Bagi Rosenau pengambilan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh 3 hal utama yaitu faktor eksternal (internasional), faktor structural (domestik) dan faktor pemimpin (individu). Model adaptif Rosenau

⁴⁷ Richard W Mansbach dan Kristen L. Rafferty, Pengantar Politik Global: Introduction to Global Politics, terj. Asmat Asnawi, 2010. Bandung: Nusa Media, hal. 411.

⁴⁸ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochmad Yani. 2011. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA. Hal. 48-49

terdapat tiga variabel yakni *external change*, *struktural (internal) change* dan *leadership* dengan berbagai indikator

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan luar negeri merupakan cerminan politik domestik negara yang digunakan oleh aktor pembuat kebijakan untuk mencapai kepentingan nasional negara dalam level internasional dimana kebijakan ini dijadikan pedoman dan respon negara dalam hubungannya dengan aktor-aktor lain dalam sistem internasional.

2.2.2 Teori Poliheuristik

Teori Poliheuristik adalah teori yang melihat bagaimana pengaruh individu dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Di dalam teori ini terdapat 2 pemikiran utama dalam pengambilan kebijakan politik khususnya dalam pengambilan kebijakan luar negeri yaitu *rational choice school* dan *the cognitive psychology school*. Teori poliheuristik termasuk di dalam pemikiran psikologi kognitif, dimana pemimpin menyederhanakan masalah melalui 2 tahap utama.⁴⁹

Teori Poliheuristik (Alex Mintz) merupakan teori dimana pemimpin suatu negara membuat keputusan dengan cara 2 tahap.⁵⁰ Dengan cara menyederhanakan masalah dengan menggunakan kognisi atau dengan kata lain heuristik. Kemudian pemimpin negara mengevaluasi alternatif yang tersisa dengan menggunakan perhitungan keuntungan dan kerugian yang diperoleh. Pertimbangan pada tahap pertama yang digunakan oleh para pemimpin adalah menghindari kerugian secara politik (prinsip non-

⁴⁹ Alex Mintz, 2005, *International Studies Perspectives, Utilizing Poliheuristic Theory to Explain and Predict Foreign Policy and National Security Decisions*, Hal 1, Online, diakses dari <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1528-3577.2005.00195.x/>

⁵⁰ Ibid hal.2

kompensasi) dan membuang alternatif yang berpotensi membahayakan para pemimpin negara akan di hindari atau dibuang secara langsung.⁵¹

Teori ini memiliki prinsip non-kompensatori yaitu bahwa setiap politisi atau pemimpin negara akan menghindari memilih alternatif atau opsi kebijakan yang akan mempunyai dampak langsung terhadap mereka, misalnya adalah efek politis. Situasi politik luar negeri yang rumit sering disederhanakan dengan menggunakan prinsip pengambilan kebijakan dengan menggunakan prinsip non-kompensatori. Secara khusus apabila alternatif misalnya *use of force*, *sanctions*, dan *do nothing* tidak dapat diterima dalam dimensi utama (dimensi politik), maka kalkulasi yang tinggi pada dimensi lain (misalnya ekonomi) tidak dapat mengimbangi, dan maka dari itu alternatif akan dihilangkan. Para pemimpin politik akan memperhitungkan faktor dan konsekuensi politik dengan mengukur keberhasilan dan kegagalan, *cost & benefit*, keuntungan kerugian, resiko dan *rewards* dalam politik. Dengan menggunakan prinsip non-kompensatori maka pemimpin berusaha menghindari hal yang tidak diinginkan dalam dunia politik, misalnya persaingan antar partai politik, bahkan dalam satu partai dan segala bentuk persaingan dalam hal politik.⁵²

Teori ini menjembatani antara Kebijakan yang di ambil dari kognitif individu dengan pilihan rasional.⁵³ Inti dari teori ini adalah prinsip non-kompensasi, dengan tahap pertama dari proses keputusan poliheuristik (prinsip non kompensatori) berhubungan dengan *cognitive school*, sedangkan

⁵¹ Ibid hal.3

⁵² Ibid hal.3

⁵³ Ibid hal.4

tahap kedua sesuai dengan *rational school*.⁵⁴ Pemikiran utama dari teori Poliheuristik ini ada 2, yaitu pertama pemimpin menggunakan lebih dari satu keputusan dalam perjalanan mengambil satu keputusan yang akan dikeluarkan. Secara khusus, pembuat kebijakan akan menggunakan 2 proses seperti yang dikatakan di awal yaitu menggunakan prinsip non-kompensasi dan menghindari kerugian yang lebih banyak dalam menyeleksi pilihan-pilihan atau alternatif yang sesuai dengan kebijakan. Pada akhirnya menggunakan peraturan keputusan analitik pada tahap kedua dari proses pengambilan kebijakan. Kedua, pemimpin atau pembuat kebijakan mengevaluasi keuntungan dan kerugian dalam segi politik domestik, inti dari tahap kedua adalah diambilnya kebijakan terakhir.

Teori Poliheuristik ini telah digunakan untuk menganalisis kebijakan yang dibuat oleh pemimpin negara-negara lain baik dalam pemerintahan demokratis dan non-demokratis.⁵⁵ Tahapan dari teori Poliheuristik ada 2 langkah utama, yaitu pertama mengidentifikasi matriks keputusan atau kebijakan pemimpin misalnya kumpulan dari pilihan-pilihan, dimensi, dan implikasi dari setiap alternatif pada setiap dimensi. Kedua, menerapkan perhitungan Teori Poliheuristik ke matriks keputusan untuk menjelaskan atau memprediksi pilihan utama. Teori Poliheuristik adalah teori yang bisa berlaku untuk kebijakan keamanan nasional, kebijakan luar negeri, kebijakan ekonomi, serta kebijakan domestik.

Terdapat beberapa perbedaan teori poliheuristik dengan teori lainnya seperti pilihan rasional maupun pendekatan kognitif. Konsep pilihan rasional

⁵⁴ Ibid hal.6

⁵⁵ Ibid hal 6

menekankan pada koherensi logika internal dengan *high prediction power*. Pemikiran utama dari konsep pilihan rasional adalah setiap manusia pasti mempunyai tujuan dan pada saat membuat kebijakan mereka (pembuat kebijakan) akan membuat pilihan diantara alternatif dengan tujuan memaksimalkan pilihan. Pilihan tersebut dikatakan rasional ketika pilihan tersebut saling terkoneksi dan saling berkaitan (transitif).⁵⁶

Dalam pendekatan kognitif mempunyai pemikiran utama bahwa proses pengambilan kebijakan tidak sempurna dan saling di pengaruhi oleh distorsi berbagai kognisi. Dan teori poliheuristik muncul untuk mencoba memperbaiki dengan memasukkan beberapa elemen dan pilihan rasional. Pemikiran utama teori poliheuristik adalah pembuatan kebijakan luar negeri dasarnya adalah melalui 2 tahapan utama. Faktor kognitif dan politik adalah hal penting pada tahap pertama. Sedangkan di tahapan kedua lebih ke pemaksimalan dalam membuat pilihan terakhir. Jadi prinsip dari teori poliheuristik adalah berbasis dimensi, non kompensatori, dan menggunakan 2 tahapan proses utama.

2.3 Definisi Operasional

Dalam sub bab ini penulis akan mengoperasionalisasikan teori dan variabel dalam Teori Poliheuristik yang dicetuskan oleh Alex Mintz. Penulis menggunakan teori Poliheuristik dikarenakan teori ini cocok untuk menjelaskan bagaimana pemimpin negara di Cina yaitu Presiden Xi Jinping sebagai sebuah aktor yang membuat kebijakan mengenai larangan impor limbah padat tahun 2018. Dengan mengoperasionalisasikan gambaran umum

⁵⁶ Ibid hal.128

mengenai isu yang menjadi fokus yaitu pemerintah Cina mengambil kebijakan larangan limbah impor padat dalam kegiatan impor sampahnya. Gambaran ini diharapkan akan mempermudah penulis untuk menganalisa tahapan-tahapan pengambilan keputusan Cina yaitu mengimplementasikan Kebijakan Larangan Impor Limbah Padat kepada negara-negara yang melakukan perdagangan limbah.

Dalam Teori Poliheuristik Alex Mintz dibagi menjadi 2 proses tahapan utama yaitu yang pertama identifikasi alternatif dan kedua mengaplikasikan kalkulasi Poliheuristik ke dalam *decision matrix*.⁵⁷ *Decision Matrix* terdiri dari serangkaian alternatif atau opsi-opsi yang dimiliki oleh pemimpin, dimensi atau kriteria kebijakan, dan penilaian implikasi masing-masing dimensi dalam setiap alternatif yang dibuat. *Weights* atau bobot (tingkat kepentingan kebijakan) dapat ditambahkan dalam matriks secara opsional.

Pertama, dalam proses identifikasi dapat dilihat dari 3 aspek yaitu identifikasi alternatif, identifikasi dimensi dan identifikasi implikasi. Dalam mengidentifikasi aspek alternatif dapat diidentifikasi opsi-opsi atau alternatif yang relevan terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemimpin. Misalnya dalam hal terorisme, terdapat opsi *Do Nothing*, *Use Force*, dan *Apply Sanctions*. Lalu terdapat keputusan yang dilanjutkan oleh pemimpin negara dalam menangani terorisme, misalnya melanjutkan *Terrorist Attacks*, *Temporarily Halt Attacks*, atau *Stop Attacks*. Dalam aspek kedua, dilakukan identifikasi dimensi-dimensi yang relevan dalam mengevaluasi alternatif dalam matriks. Misalnya dalam kasus terorisme diatas, pemimpin mengambil

⁵⁷ Alex Mintz, *A poliheuristic Perspective*, *Journal of Conflict Resolution*.

kebijakan *Use of Force* dimensi yang dilihat adalah dimensi politik, militer, ekonomi dan diplomatik. Di aspek ketiga kita melihat bahwa setiap tindakan alternatif memiliki implikasi pada setiap dimensi. Misalnya dalam kasus terorisme diatas, dalam memilih *Use of Force* atau penggunaan kekerasan akan memberikan implikasi atau konsekuensi terhadap dimensi militer, ekonomi, politik dan diplomatik.

Dalam tahapan pertama, menurut Alex Mintz dapat ditambahkan indikator *Ratings* dan *Weights*, tetapi hal tersebut tergantung kasus dan opsional untuk digunakan. Karena dalam pemberian nilai seperti dari 10 (adalah sangat buruk) sampai 110 (sangat bagus), maka harus terdapat ukuran tertentu bagaimana penulis memberikan ukuran 10 hingga 110 tersebut. Begitu pula dengan perhitungan bobot dari setiap dimensi. Penulis tidak memakai indikator *ratings* dan *weights* dalam melihat kebijakan yang akan dianalisa dikarenakan penulis melihat kasus dan proses kebijakan luar negeri dari luar dan karena penelitian ini bukan termasuk penelitian lapangan.

Tabel 2.1 Contoh tabel *Decision Matrix*

Dimensions	Alternatives				Weight
	Do Nothing	Apply Sanctions	Containment	Use Force	
Military	Implications	Implications	Implications	Implications	Add
Economic	Implications	Implications	Implications	Implications	Add
Political	Implications	Implications	Implications	Implications	Add
Diplomatic	Implications	Implications	Implications	Implications	Add
Final Choice:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Final Decision

FIG. 1. A Decision Matrix for the Use of Force Example

Sumber : *Integrating Cognitive and Rational* by Alex Mintz

Gambar tabel diatas merupakan contoh *Decisions Matrix* atau matriks kebijakan oleh pembuat kebijakan atau pemimpin negara dalam kasus terorisme. Dalam tahapan kedua yaitu pengaplikasian kalkulasi ke dalam *decision matrix*, teori poliheuristik memprediksi bahwa alternatif yang memiliki nilai sangat negatif pada dimensi politik akan dibuang, sementara alternatif yang tersisa akan dievaluasi berdasarkan perhitungan rasional. Berdasarkan prosedur poliheuristik analisis akan menghilangkan pertimbangan alternatif yang berbahaya untuk posisi pemimpin.

Pada tahapan kedua, presiden juga mempertimbangkan dimensi yang paling penting untuk mengambil keputusan yang strategis. Dari sini akan terlihat bagaimana teori poliheuristik menjelaskan dan memprediksi keputusan pemimpin. Seperti kasus yang sudah dijelaskan di atas dalam respon penanganan kasus terorisme, yaitu memilih menggunakan kekerasan, bernegosiasi untuk mencapai kedamaian, menghindari pengiriman pasukan, menerapkan sanksi atau tidak melakukan apa-apa.⁵⁸

Dalam kasus yang penulis ambil yaitu kebijakan Presiden Xi Jinping dalam kebijakan larangan impor limbah padat tahun 2018, indikator pertama yang dilihat adalah alternatif atau opsi-opsi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Cina. Opsi pertama yaitu tidak menerima limbah, melarang semua limbah padat dari negara lain masuk ke negara Cina. Menerima sebagian, yaitu menerima sebagian limbah padat yang berpengaruh terhadap masalah yang dihadapi oleh Cina. Menerima semua limbah, yaitu

⁵⁸ Alex Mintz, *Applied Decision Analysis : Utilizing Poliheuristic Theory to Explain and Predict Foreign Policy and National Security Decisions. A symposium*. Diakses dari <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1528-3577.2005.00195.x> pada 28 Februari 2018

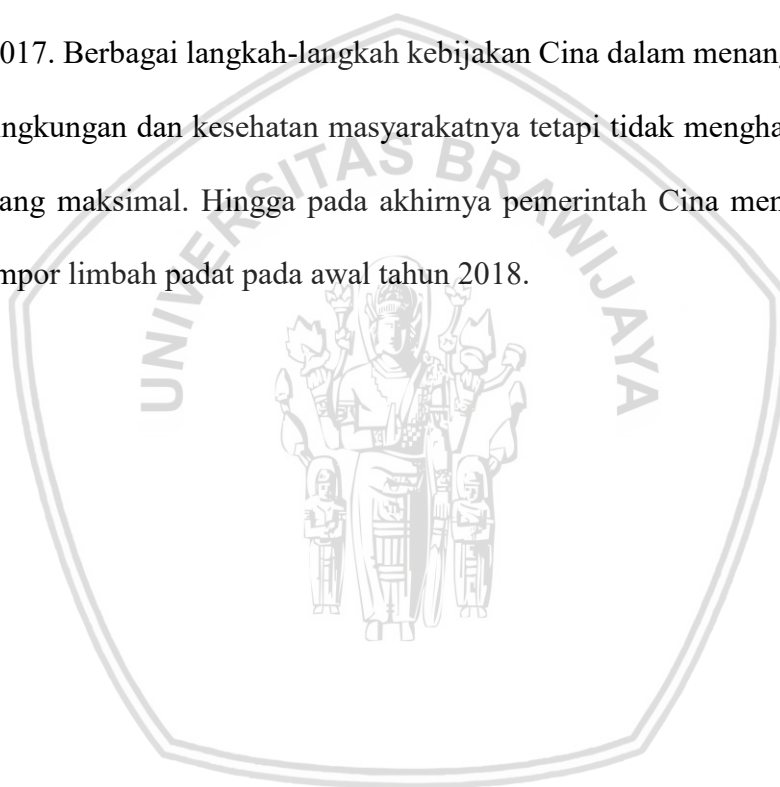
tidak melarang semua limbah padat dari negara lain untuk masuk ke wilayah Cina.

Indikator kedua adalah *dimension*. Dalam kasus Cina dalam hal limbah atau sampah yang mempengaruhi kesehatan penduduk dan lingkungan Cina, dimensi yang dipengaruhi apabila presiden Xi Jinping melakukan kebijakan tertentu adalah dimensi ekonomi, diplomatik hingga lingkungan. Indikator ketiga adalah implikasi dari setiap dimensi yang terkena efek dari kebijakan tersebut. Dalam kasus Cina, kebijakan memberikan efek terhadap lingkungan, yaitu mengurangi limbah-limbah yang masuk ke negara Cina yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan kesehatan. Dalam dimensi ekonomi, yaitu hilangnya total nilai impor limbah padat Cina. Dalam dimensi diplomatik, yaitu akan berpengaruh terhadap hubungan negara Cina dengan negara-negara pengekspor limbah.

Dalam tahapan kedua Teori Poliheuristik, yaitu pengaplikasian kalkulasi Poliheuristik ke dalam *Decisions Matrix*. Presiden memilih dari alternatif yang tersisa, yaitu alternatif yang memiliki keuntungan paling tinggi untuk semua dimensi. Dalam kasus Cina, keputusan terakhir yang dipilih adalah kombinasi antara membuang *total ban* dan *no ban*, dan akhirnya pada tahapan kedua memilih *partial ban* sebagai alternatif yang paling memiliki keuntungan paling maksimum. Dengan melihat *cost and benefit* sehingga menghasilkan *ultimate decision* atau kebijakan akhir, Pemerintah pusat di Cina yang memenuhi kriteria sebagai aktor yang dominan adalah Xi Jinping. Meskipun dalam *National People Congress* terdapat Bea Cukai Cina, Kementerian Perlindungan Lingkungan,

Kementerian Keamanan Publik Cina, Inspeksi dan Karantina Cina, tetapi dalam pilihan keputusan yang diambil oleh Cina dalam menerapkan kebijakan larangan impor limbah padat tahun 2018 adalah Xi Jinping.

Apabila dilihat dari kasus ini dapat dijelaskan bahwa pada akhirnya pemerintah Cina memilih membuat kebijakan yang melarang 24 jenis limbah padat tahun 2018, dan secara resmi di implementasikan setelah melalui proses panjang berbagai upaya sejak tahun 2011 seperti hingga 2017. Berbagai langkah-langkah kebijakan Cina dalam menangani masalah lingkungan dan kesehatan masyarakatnya tetapi tidak menghasilkan solusi yang maksimal. Hingga pada akhirnya pemerintah Cina memberhentikan impor limbah padat pada awal tahun 2018.



Tabel 2.2 Operasionalisasi Konsep
(Tahapan Identifikasi *Decisions Matrix*)

Teori	2 level process	Variabel	Indikator	Operasionalisasi
Teori Poliheuristik dalam Pembuatan Kebijakan Luar negeri (Alex Mintz)	Identifikasi <i>decisions matrix</i> dari pembuat kebijakan	<i>Alternatives</i>	Pilihan-pilihan kebijakan terhadap masalah yang dihadapi	Pemerintah Cina melalui Presiden Xi Jinping sebagai aktor dominan yang secara rasional mengambil kebijakan mempunyai 3 pilihan yaitu : menerima limbah, menerima sebagian limbah, tidak menerima.
		<i>Dimensions</i>	Dimensi yang berhubungan dengan masalah seperti dimensi ekonomi, diplomatik, lingkungan	Presiden Xi Jinping melihat dimensi terkait alternatif kebijakan. Setiap kebijakan akan mempengaruhi dimensi ekonomi, diplomatik, dan lingkungan.
		<i>Implications</i>	Dampak yang ditimbulkan apabila alternatif dan dimensi di kalkulasikan	Setiap dimensi lingkungan, ekonomi, dan politik yang terlibat dalam kebijakan tersebut mempunyai konsekuensi masing-masing.

	Pengaplikasian kalkulasi Poliheuristik ke dalam matriks kebijakan	<i>Ultimate Decisions</i>	Tahapan dalam membuang alternatif yang tidak layak pada fase pertama dan memilih alternatif terbaik yang dapat diterima sebagai kebijakan luar negeri	Kebijakan yang diambil oleh presiden Xi Jinping adalah mengeluarkan kebijakan untuk melarang 24 jenis/kategori limbah padat pada tahun 2018 dengan mempertimbangkan jenis limbah padat yang menyebabkan kontaminasi di wilayah Cina.
--	---	---------------------------	---	--

Sumber : Olahan Penulis

2.4 Alur Pemikiran

Bagan 2.1 Alur pemikiran peneliti

Cina merupakan importir terbesar di dunia dalam bidang impor limbah dari negara-negara asing, seperti Amerika, Inggris, Jepang dan sebagainya. Pada tahun 2016, Cina mengimpor **7,3 juta ton** yang bernilai 3,7 milyar dolar AS (dikalkulasikan senilai 56% total impor sampah dunia)



Impor limbah padat menyebabkan **masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat** di Cina. Hal ini karena limbah padat yang di impor terkadang **mengandung zat berbahaya** seperti timbal (pb), merkuri yang memperanguhi lingkungan dan masyarakat.



Presiden Xi Jinping mengambil kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut dengan melarang 24 jenis limbah padat



Bagaimana proses pengambilan kebijakan luar negeri Cina dalam larangan impor limbah padat tahun 2018?



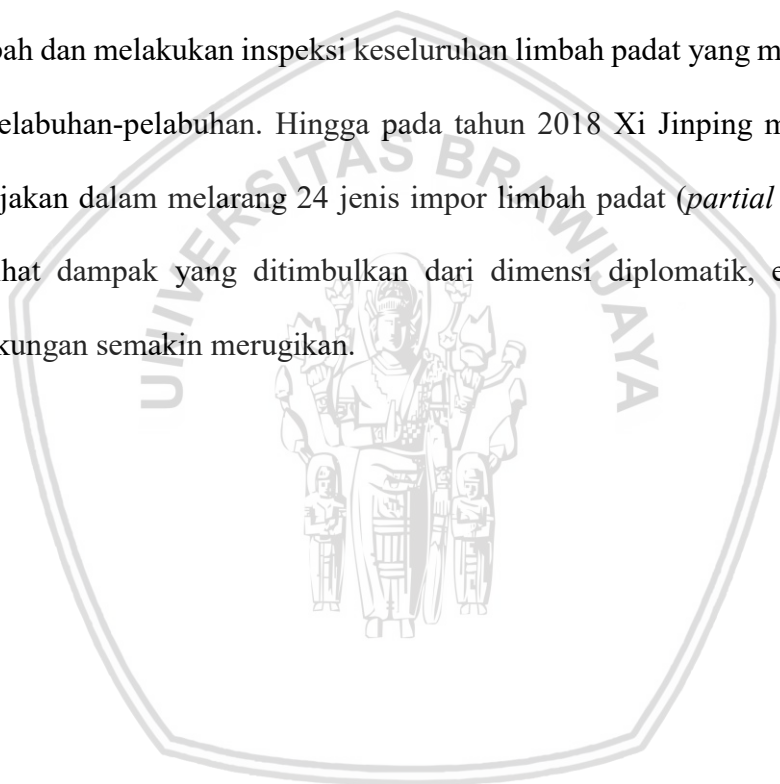
Teori Poliheuristik dalam Pengambilan Kebijakan Luar Negeri (Alex Mintz)

Presiden atau *decision maker* melalui 2 tahapan proses dalam pengambilan keputusan yaitu :

1. Identifikasi *Decisions Matriks*
2. Pengaplikasian kalkulasi polheuristik ke dalam matriks

2.5 Argumen Utama

Berdasarkan dari penjelasan mengenai *decision making process* dalam level individu yang dijelaskan oleh Alex Mintz muncul hipotesa penulis bahwa dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri Cina terhadap larangan impor limbah padat Cina ini, Presiden Xi Jinping melihat proses dalam 2 tahap. Tahap yang pertama bagaimana Xi Jinping memiliki alternatif kebijakan dengan dilakukan kebijakan bertahap yaitu pada tahun 2013 Cina menerima sebagian limbah dan melakukan inspeksi keseluruhan limbah padat yang masuk ke Cina di pelabuhan-pelabuhan. Hingga pada tahun 2018 Xi Jinping mengeluarkan kebijakan dalam melarang 24 jenis impor limbah padat (*partial ban*) dengan melihat dampak yang ditimbulkan dari dimensi diplomatik, ekonomi dan lingkungan semakin merugikan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diambil oleh penulis, maka penelitian termasuk pada jenis penelitian deskriptif dimana penulis berusaha untuk menjelaskan mengenai proses pengambilan kebijakan luar negeri Cina dalam larangan impor limbah padat Cina.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana proses pengambilan kebijakan luar negeri Cina dalam larangan impor limbah padat tahun 2018 akhirnya diberlakukan dimana penulis akan mengkaji dan mengidentifikasi tahapan dan upaya kebijakan dari pemerintah Cina pada akhirnya memilih kebijakan tersebut.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yakni menggunakan data sekunder yakni dengan cara melakukan studi pustaka. Informasi yang diperoleh berasal dari buku, jurnal, koran, dokumen resmi, dokumen-dokumen serta internet yang sekiranya dapat mendukung penelitian ini. Dikarenakan data yang diperoleh merupakan data sekunder maka selanjutnya penulis akan melakukan analisis dengan menggunakan teori dan konsep sesuai.

3.4 Teknik Analisa Data

Data-data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini akan diolah menggunakan teknik analisa kualitatif dengan cara interpretasi data sekunder yang telah didapat kemudian dihubungkan dengan teori dan variabel yang digunakan penulis sehingga diperoleh argumen yang tepat.

3.5 Sistematika Penelitian

Dalam rangka memberikan gambaran sistematis dan terperinci dalam penelitian ini, skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab sesuai dengan kebutuhan analisis penelitian.

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama dalam skripsi ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab dua dalam skripsi ini meliputi studi terdahulu dimana studi terdahulu ini dimaksudkan untuk menjadi acuan penulis dalam melaksanakan penelitian. Kemudian, definisi konseptual dimana dalam sub bab ini menjelaskan mengenai konsep atau teori yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis studi kasus yang telah ditentukan. Definisi operasional dimana dalam sub bab ini menjelaskan mengenai fenomena yang dipilih dalam penelitian yang kemudian dihubungkan dengan konsep atau teori. Sehingga memudahkan peneliti untuk menghubungkan variabel dan data yang akan diuji, tingkat analisa, hipotesa serta alur pemikiran penulis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ketiga dalam skripsi ini meliputi jenis penelitian yang dipilih, ruang lingkup penelitian yang berfungsi untuk memberikan batasan terhadap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Bab keempat dalam skripsi ini yakni menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai fenomena yang sedang diteliti. Khususnya menggambarkan mengenai gambaran umum Xi Jinping, Dinamika industri daur ulang limbah di Cina, serta kebijakan impor limbah padat di Cina.

BAB V ANALISA PROSES PENGAMBILAN KEBIJAKAN CINA DALAM LARANGAN IMPOR LIMBAH PADAT TAHUN 2018

Bab kelima dalam skripsi ini menjelaskan mengenai analisa penulis terhadap judul penelitian yakni analisis proses pengambilan kebijakan luar negeri Cina dalam larangan impor limbah padat tahun 2018 dimana teori atau konsep yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis fenomena tersebut dengan menggunakan teori poliheuristik yang memiliki keterkaitan dengan pengambilan kebijakan luar negeri suatu Negara dari level individu. Dimana teori yang digunakan oleh penulis merupakan teori yang dikemukakan oleh Alex Mintz.

BAB VI PENUTUP

Bab keenam dalam skripsi ini berisikan mengenai saran dan kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

Sebelum membahas secara spesifik mengenai proses kebijakan luar negeri Cina dalam melarang impor limbah padat, dalam bab ini penulis akan memaparkan gambaran secara umum mengenai bagaimana limbah padat di Cina dan impor limbah padat di Cina itu sendiri. Selanjutnya penulis akan memaparkan mengenai upaya kebijakan pemerintah Cina secara kronologis dalam melihat impor limbah padat. Akan dijelaskan pula bagaimana pengambilan kebijakan luar negeri Cina. Gambaran umum ini akan menjadi landasan untuk memahami permasalahan impor limbah padat Cina sehingga Cina mengeluarkan kebijakan larangan impor limbah padat dari negara lain. Pembahasan permasalahan yang ada di eksternal dan internal Cina membantu menganalisis secara mendalam mengapa Cina mengeluarkan kebijakan tersebut yang akan dibahas dalam bab selanjutnya.

4.1 Cina dalam industrialisasi limbah padat

Isu lingkungan hidup saat ini telah menjadi topik bahasan yang banyak diperbincangkan dan mendapat perhatian khusus oleh semua kalangan baik dari level individu rumah tangga sampai dengan level global karena berkaitan erat dengan masalah *global warming* yang dihasilkan dari kegiatan industri yang semakin berkembang, pencemaran air laut oleh limbah pabrik serta polusi lainnya. Isu lingkungan hidup juga tidak menutup kemungkinan berhubungan dengan limbah-limbah padat di dunia.

Di seluruh dunia, tingkat limbah makin meningkat. Pada tahun 2012, kota-kota di dunia menghasilkan 1,3 miliar ton limbah padat per tahunnya atau sekitar 1,2

kilogram per orang per hari.⁵⁹ Dengan pertumbuhan penduduk yang cepat serta urbanisasi, pemborosan terhadap sampah perkotaan diperkirakan akan meningkat menjadi 2,2 miliar ton pada tahun 2025.⁶⁰ Selama ini salah satu aktor yang berperan dalam mengelola limbah dunia adalah World Bank dengan cara mendanai dan memberi saran mengenai proyek untuk mengolah limbah padat dengan menggunakan beragam produk dan layanan, termasuk memberi pinjaman, pembiayaan pembangunan, maupun memberikan penasehat teknis.⁶¹ Sejak tahun 2000, World Bank telah memberikan lebih dari 4,7 miliar kepada lebih dari 340 program pengelolaan limbah padat di enam kawasan seperti Asia Timur dan Pasifik. Cina juga termasuk salah satu negara yang menerima program insetif berbasis hasil yang selama ini telah menunjang pemisahan sampah rumah tangga. Selain mencoba mengelola limbah rumah tangganya, Cina juga menerima limbah padat dari negara-negara lain yang secara langsung Cina melakukan perdagangan limbah. Limbah-limbah padat penting salah satunya bagi industri di Cina, digunakan sebagai bahan baku industri daur ulangnya ketika ia membutuhkan bahan baku yang tidak ada dari negaranya atau bahan baku yang murah.

Hal ini juga dapat dilihat dari kondisi limbah padat dunia, perdagangan limbah global adalah perdagangan limbah antar negara untuk menindaklanjuti limbah-limbah dari negara asal dengan cara dirawat secara lebih lanjut, dibuang, atau didaur ulang. Negara-negara yang memproduksi limbah padat banyak dikembangkan untuk kebutuhan ekonomi dan lebih ke arah industrial. Dalam Laporan *World Bank*

⁵⁹ World Bank, 2018, *Solid Waste Management*, diakses dari <http://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/brief/solid-waste-management> pada 16 Mei 2018

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid

: *A Global Review of Solid Waste Management*, secara umum semakin tinggi perkembangan ekonomi dan tingkat urbanisasi, semakin besar jumlah limbah pada yang dihasilkan.⁶²

Dalam tulisan Daniel Hoornweg yang meninjau kembali tentang pengelolaan limbah padat dunia dari *The World Bank (What a Waste : A global review of Solid Waste Management)* dijelaskan bahwa terdapat kategori limbah di dunia. Kategori itu dilihat dari sumber limbah, sumber sektor limbah, dan jenis limbah padatnya. Misal dari sumber-sumber limbah terdapat limbah rumah tangga (residensial), industrial, komersil, institusi, jasa-jasa, konstruksi, limbah proses, limbah medis, limbah pertanian. Sedangkan dilihat sumber limbah per sektor misalnya dari sumber limbah yang berasal dari institusi itu terdapat limbah dari sekolah, rumah sakit (bukan limbah medis), penjara/lapas, gedung-gedung pemerintah, dan bandara. Dari dua pengkategorian tersebut muncul jenis-jenis limbah padat, misal seperti kertas, plastik, kayu, kaca, logam, limbah elektronik dan lainnya. Keterangan dapat dilihat di tabel di bawah mengenai pengkategorian limbah padat.⁶³

⁶² World Bank Report, *What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management*, World Bank: 8-13. Urban Development. Diakses dari siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387-1334852610766/Chap3.pdf pada 16 Mei 2018

⁶³ Daniel Hoornweg and Perinaz Bhada-Tata, 2012, *Urban Development Series Knowledge Paper*, diakses dari https://siteresources.worldbank.org/.../Resources/.../What_a_Waste2012_Final.pdf pada 22 Mei 2018

Tabel 4.1 Sumber dan tipe-tipe limbah padat

Source	Typical Waste Generators	Types of Solid Wastes
Residential	Single and multifamily dwellings	Food wastes, paper, cardboard, plastics, textiles, leather, yard wastes, wood, glass, metals, ashes, special wastes (e.g., bulky items, consumer electronics, white goods, batteries, oil, tires), and household hazardous wastes (e.g., paints, aerosols, gas tanks, waste containing mercury, motor oil, cleaning agents), e-wastes (e.g., computers, phones, TVs)
Industrial	Light and heavy manufacturing, fabrication, construction sites, power and chemical plants (excluding specific process wastes if the municipality does not oversee their collection)	Housekeeping wastes, packaging, food wastes, construction and demolition materials, hazardous wastes, ashes, special wastes
Commercial	Stores, hotels, restaurants, markets, office buildings	Paper, cardboard, plastics, wood, food wastes, glass, metals, special wastes, hazardous wastes, e-wastes
Institutional	Schools, hospitals (non-medical waste), prisons, government buildings, airports	Same as commercial
Construction and Demolition	New construction sites, road repair, renovation sites, demolition of buildings	Wood, steel, concrete, dirt, bricks, tiles
Municipal Services	Street cleaning, landscaping, parks, beaches, other recreational areas, water and wastewater treatment plants	Street sweepings; landscape and tree trimmings; general wastes from parks, beaches, and other recreational areas, sludge
All of the above should be included as municipal solid waste. Industrial, commercial, and institutional (ICI) wastes are often grouped together and usually represent more than 50% of MSW. C&D waste is often treated separately; if well managed it can be disposed separately. The items below are usually considered MSW if the municipality oversees their collection and disposal.		
Process	Heavy and light manufacturing, refineries, chemical plants, power plants, mineral extraction and processing	Industrial process wastes, scrap materials, off-specification products, slag, tailings
Medical waste	Hospitals, nursing homes, clinics	Infectious wastes (bandages, gloves, cultures, swabs, blood and body fluids), hazardous wastes (sharps, instruments, chemicals), radioactive waste from cancer therapies, pharmaceutical waste
Agricultural	Crops, orchards, vineyards, dairies, feedlots, farms	Spoiled food wastes, agricultural wastes (e.g., rice husks, cotton stalks, coconut shells, coffee waste), hazardous wastes (e.g., pesticides)

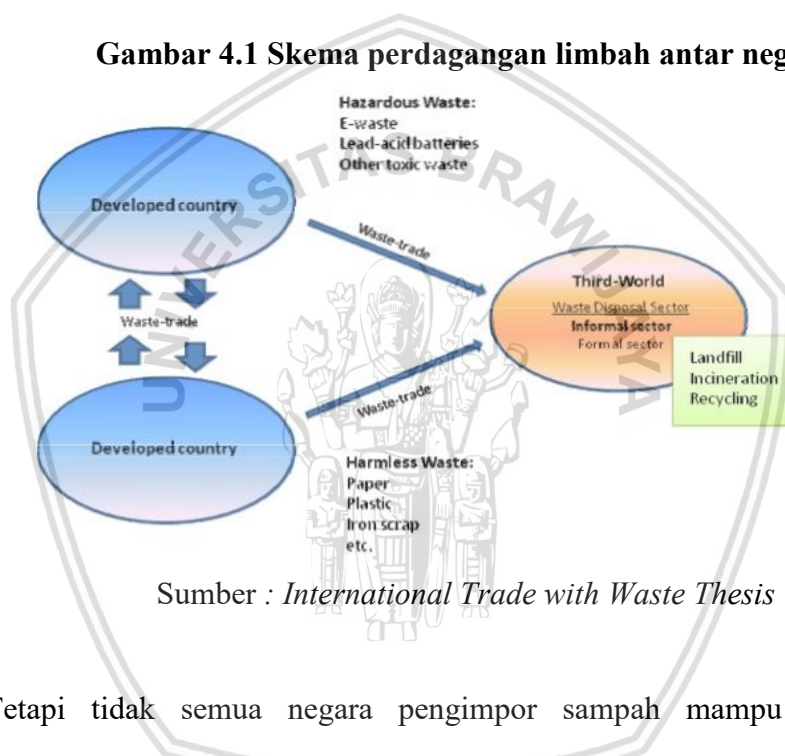
Sumber : *Urban Development Series Knowledge Paper*

Limbah-limbah padat tersebut di perdagangan oleh beberapa negara. Contoh negara yang melakukan perdagangan limbah padat adalah Cina, AS, Jerman, Inggris, Australia dan masih banyak lagi.⁶⁴ Manfaat dari adanya perdagangan atau impor sampah di dunia memungkinkan terjadinya impor dari negara-negara maju yang mempunyai sampah industri yang tinggi ke negara

⁶⁴ People's Daily Online, 2018, *China's an on imported waste to have huge impact on global recycling industry*, diakses dari <http://en.people.cn/n3/2018/0103/c90000-9311150.html> pada 26 Mei 2018

berkembang. Mekanisme perdagangan tersebut dijelaskan dalam sebuah tesis berjudul “International Trade with Waste”,⁶⁵ Sebagian besar perdagangan limbah dunia berpindah dari satu negara maju ke negara maju lainnya. Tetapi sebagian besar limbah juga berasal dari negara maju ke negara dunia ketiga. Ada tiga cara bagi negara pengimpor untuk menangani limbah tersebut dengan cara ditempatkan ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir), di insinerasi (pembakaran sampah secara ramah lingkungan), dan di daur ulang.⁶⁶

Gambar 4.1 Skema perdagangan limbah antar negara



Sumber : *International Trade with Waste Thesis*

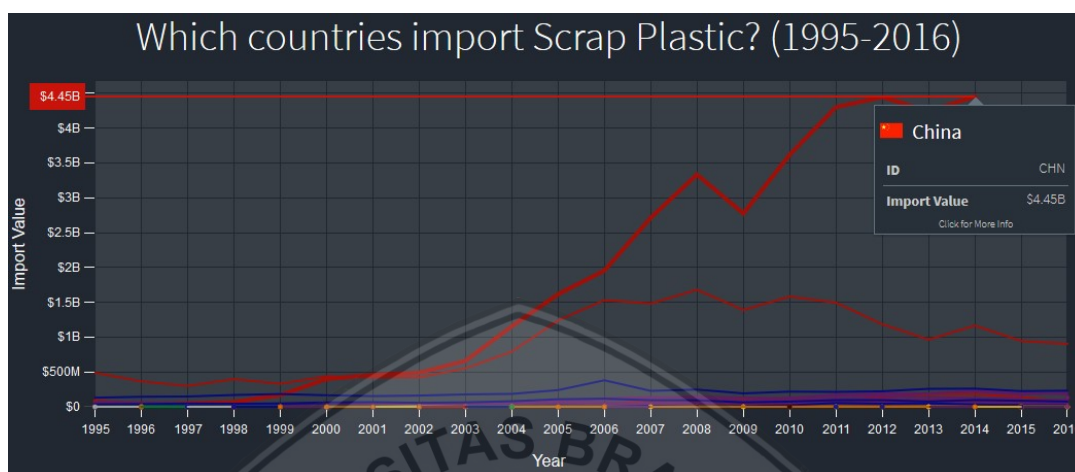
Tetapi tidak semua negara pengimpor sampah mampu menangani penumpukan sampah yang terjadi. Salah satu contoh negara yang melakukan impor adalah Cina. Dengan adanya perdagangan sampah khususnya limbah padat di Cina, muncul berbagai masalah yang harus di respon oleh pemerintah Cina melalui kebijakan yang akan dijelaskan pada sub-bab selanjutnya.

⁶⁵ Jenny Willen, Uppsala University, Department of Economics, Thesis : *International Trade with Waste*, Online, Diakses dari <https://www.diva-portal.org/smash/get/.../FULLTEXT01.pdf> pada 28 Mei 2018

⁶⁶ Ibid Hal.4-5

Berikut adalah data menurut WTO yaitu mengenai data impor plastik Cina yang mengalami peningkatan pertahunnya mulai 1995 hingga 2016 :

Grafik 4.1 Data Impor Plastik Cina tahun 1995-2016



Sumber : Laporan WTO

Cina memulai impor limbah padat mulai tahun 1980-an, karena pada tahun itu negara Cina mengalami kekurangan bahan baku dan impor dianggap sebagai salah satu yang paling efektif untuk menunjang industri di Cina.⁶⁷ Hal ini juga diungkapkan oleh Guo Jing sebagai kepala Departemen Internasional di Kementerian Perlindungan Lingkungan Cina, bahwasanya sampah impor berperan dalam menutupi kekurangan sumber daya di masa lalu.⁶⁸ Terjadi peningkatan secara terus menerus mulai tahun 1995 hingga pada tahun 2014, yaitu dengan nilai 75,190,305 pada tahun 2014.

Tahun 1980-1990an pabrik pabrik di Cina hanya memiliki sedikit pilihan untuk bahan mentah. Adanya monopoli sumber daya alam oleh negara menyebabkan perusahaan swasta ataupun usaha kecil kesulitan. Negara mampu

⁶⁷ People's Daily Online, 2018, *China firmly says no to foreign waste*, diakses dari <http://en.people.cn/n3/2018/0328/c90000-9442858.html> pada 2 Juni 2018

⁶⁸ Liangyu, 2017, *China intensifies waste management*, diakses dari http://www.xinhuanet.com/english/2017-12/29/c_136860097.htm diakses pada 8 Juni 2018.

melakukan pertambangan, membuka sumur minyak atau membuat operasi penerbangan tapi tidak untuk perusahaan swasta. Jadi pertengahan 1980-an para pengusaha mulai mengimpor daur ulang yang tidak diinginkan oleh negara di dunia dan menjualnya dengan harga diskon.⁶⁹ Industri daur ulang makin menguntungkan ketika bahan daur ulang yang diimpor adalah stok untuk lebih dari separuh produksi kertas Cina, sementara impor skrap mungkin telah menyumbang sepertiga dari produksi tembaga.⁷⁰ Industri daur ulang mempekerjakan 1,5 juta orang, dan secara tidak langsung mendukung 10 juta pekerjaan lain.

Pada tahun 2011, bisnis daur ulang yang ditujukan untuk jenis logam non-besi memberi kontribusi sebesar 64 milyar US dollar per tahun. Hal ini tidak hanya bagus untuk perekonomian Cina pada saat itu, melainkan bagus untuk lingkungan Cina. Dimana antara 2002 dan 2011, sektor daur ulang limbah aluminium Cina menghemat 350 miliar kilowatt jam listrik dan mencegah pembentukan 522 juta metrik ton karbondioksida.⁷¹ Untuk negara yang mencoba mengurangi polusi udara dan emisi gas rumah kaca, hal ini adalah keuntungan yang besar meskipun masih ada perusahaan atau industri daur ulang yang kotor dan mencemari lingkungan. Tetapi dibandingkan dengan membuka pertambangan, kilang minyak dan penerbangan maka industri daur ulang tetap menjadi opsi yang cukup baik dan ramah lingkungan.

⁶⁹ Bussiness Time, 2018, *As China bans foreign trash, S-E Asia profits*, Online, diakses dari <https://www.businesstimes.com.sg/government-economy/as-china-bans-foreign-trash-s-e-asia-profits> diakses pada 8 Juni 2018.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid.

4.2 Perkembangan limbah padat Cina

Dalam melihat perkembangan limbah padat Cina, kita bisa melihat bahwa secara keuntungan dengan adanya industri daur ulang ini telah mempekerjakan lebih banyak orang daripada industri lain, kecuali pertanian.⁷² Limbah padat yang diimpor ke Cina diolah menjadi energi listrik, plastik dan kertas daur ulang. Daur ulang dan pengolahan limbah adalah industri dengan potensi pertumbuhan yang sangat besar di Cina, terutama apabila ditunjang dengan teknologi dan ahli-ahli dari luar negeri.

Cina akan terus menjadi tujuan utama dunia untuk limbah dalam jangka pendek, dengan adanya perlambatan manufaktur, pasar komoditas murah, aturan yang diketatkan oleh pemerintah, dan program daur ulang domestik yang lebih diatur harus mengurangi limbah impor dari waktu ke waktu. Sebaliknya permintaan Cina untuk teknologi dan konsultan dari luar negeri akan meningkat untuk mengatasi polusi yang merajalela di negara tersebut.⁷³

Saat ini perkembangan industri daur ulang Cina sedang tidak baik, selain adanya pembatasan impor, karena perekonomian Cina yang sangat pesat. Pada tahun 2012, terjadi penurunan tenaga kerja di negara tersebut untuk pertama kalinya. Akibatnya biaya meningkat, terutama untuk bisnis padat karya dan manufaktur.

Beberapa limbah-limbah padat tersebut di daur ulang menjadi beberapa barang tertentu. Salah satu data yang penulis temukan adalah limbah padat khususnya

⁷² Dezan Shira & Associates, *Prospect for China's Recycling Industry*, Online, diakses dari <https://www.chinabusinessreview.com/trash-or-treasure-prospects-for-chinas-recycling-industry/> pada 10 Juni 2018

⁷³ Ibid

plastik dan kertas. Lebih jelasnya akan penulis gambarkan dalam sebuah tabel dibawah ini.

Tabel 4.2 Jenis plastik dan kertas yang di daur ulang

Tipe Bahan	Pasar	Hasil daur ulang	Diekspor/penjelasan
Kertas – News & PAM	Kertas Koran	Koran; papan kemasan/kemasan kertas	-
Kertas – Kardus	Kemasan	Papan kemasan; kemasan kertas	-
Kertas – Mixed Paper Board	Dipilah menjadi bahan produksi untuk kemasan atau kertas koran	Koran; papan kemasan/kemasan kertas	Inggris, beberapa kawasan Eropa dan Asia Timur
Botol Plastik – Clear PET	Kemasan makanan – bukan makanan; serat tekstil	Nampan; wadah minuman; bahan baku plastik	Eropa (botol) & Asia (serat tekstil)
Botol Plastik – Clear HDPE	Kemasan; bahan otomotif; hortikultura	Botol susu HDPE; pipa konstruksi kemasan botol, sistem pengelolaan air, pot tanaman, kaleng penyiram; kantong tas	Indonesia dan Malaysia
Botol plastik – Diwarnai PET	Kemasan	Kemasan; pasar serat	-
Botol Plastik – coloured HDPE	Hortikultura, konstruksi dan produk otomotif	Tempat air; Kaleng penyiram air; pipa; sistem perairan; bantalan rel kereta; produk kayu plastik lainnya	-
Botol plastik – campuran polimer	Dipilah menjadi kemasan, konstruksi, dan beberapa	Lembaran kertas, botol PET, kemasan minuman, karung, tas; pipa; produk	-

	menjadi aplikasi otomotif	hortikultura (pot tanaman)	
Plastik - PVC	Tidak ada permintaan pasar	Dibuang ke TPA, tidak bisa dipakai untuk insinerasi juga.	-
Plastik - PS	Tidak ada permintaan pasar	Insinerasi, dibuang ke TPA	Nampan benih; dan pot tanaman
Plastik PTT - PP	Kemasan buka makanan, DIY, hortikultura	Tempat air; Kaleng penyiram air; pipa; sistem perairan; bantalan rel kereta; produk kayu plastik lainnya	
Plastik PTT - clear PTT	Tidak ada pasar yang memisahkan antara PET dan PTT	Plastik PET	-
Plastik PTT - EPS	Tidak dikumpulkan oleh otoritas lokal karena dapat mencemari bahan lain seperti kertas dan kartu	Insinerasi; SRF (solid recovered fuel), di TPA	-
Plastik - LDPE	Kemasan Tas/karung	Di daur ulang jadi tas/karung, damp proof; pipa	-

Sumber : *Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP)*⁷⁴

Kontribusi limbah padat yang diimpor ke Cina terhadap industri daur ulang dapat dilihat industri dalam negeri misalnya perusahaan-perusahaan daur ulang logam bekas. Sekitar 20 persen impor skrap tembaga disumbang dari impor bahan-

⁷⁴ WRAP, *The facts: China's tighter restriction on waste imports*, diakses dari <http://resource.co/sites/default/files/China%20-%20fact%20sheet.pdf>

bahan dari negara lain. Pemerintah Cina sebelumnya telah menyetujui pendirian sejumlah perusahaan daur ulang besi tua di wilayah pesisir seperti Tianjin, Fujian, dan Guangdong. Namun salah satu ketua pusat pengumpulan impor benda padat yaitu Shang, hal ini akan memberikan tekanan besar terhadap perusahaan karena mengakibatkan kurangnya bahan baku.⁷⁵

Selain itu, Cina memanfaatkan limbah plastik untuk listrik dengan alat bernama insinerator, sampah-sampah akan dibakar ke dalam alat tersebut dan dari pembakaran itu tidak menghasilkan emisi karbon yang berlebihan.⁷⁶ Di distrik Chaoyang Beijing terdapat 178 insinerator yang mampu menghasilkan listrik untuk 140.000 rumah.⁷⁷ Ini merupakan salah satu hal yang menyebabkan adanya permintaan plastik daur ulang yang tinggi dari produsen dan pabrik Cina. Selain itu, kelangkaan bahan baku plastik adalah hal lain yang menyebabkan permintaan limbah.⁷⁸ Dapat dilihat dari adanya pergeseran produksi plastik dari barat ke Asia yaitu sebesar 24 % produksi plastik dunia terdapat di Cina. Selain itu, apabila menggunakan sampah dalam negeri sendiri tidak memiliki kualitas sebaik sampah-sampah dari negara maju.⁷⁹ Oleh karena itu, selama ini pemerintah melakukan impor sampah dari negara lain.

⁷⁵ Muyu Xu Reuter Staff, Reuters, *China scrap metal firms face pressure from import curbs: official*, diakses dari <https://www.reuters.com/article/us-china-metals-scrap/china-scrap-metal-firms-face-pressure-from-import-curbs-official-idUSKBN1HX0MK> pada 10 Juni 2018

⁷⁶ Rob Scmitz, *The Burning Problems's of China Garbage*, National Public Radio, diakses dari <https://www.npr.org/sections/parallels/2017/02/20/515814016/the-burning-problem-of-Cinas-garbage> pada 01 Februari 2018

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Seng Li Peng, *China's plastic demand to rise as foreign garbage ban to curb recycled supply*, Environment, Reuters, diakses dari <https://www.reuters.com/article/us-china-plastics-demand/chinas-plastic-demand-to-rise-as-foreign-garbage-ban-to-curb-recycled-supply-idUSKCN1BO0J8> pada 10 Juni 2018

⁷⁹ Op.cit, Rob Scmitz.

Keuntungan didapatkan dari kedua pihak dalam melakukan perdagangan sampah, eksportir mendapat pengembalian sisa limbah mereka dan importir mendapat akses ke persediaan bahan daur ulang secara stabil, lebih murah dan lebih sedikit energi mentah dari domestik.⁸⁰

4.3 Kebijakan pengelolaan limbah padat Cina

Melihat dari progresivitas kebijakan mengenai limbah padat di Cina, dimulai tahun 2005 dengan dikeluarkannya *Renewable Energy Law* oleh SEPA (*the State Environmental Protection Administration*). Latar belakang keluarnya UU energi terbarukan Cina adalah melihat dari perkembangan ekonomi yang pesat di seluruh Cina telah menghasilkan peningkatan dalam konsumsi energi yang mengarah terhadap peningkatan emisi dan kekurangan daya.⁸¹ Menyadari hal tersebut Cina merancang UU Energi Terbarukan (*Renewable Energy Law*) pada tahun 2005 Cina dan ditandatangani oleh Presiden Hu Jintao. Tujuan umum dari pembuatan UU tersebut adalah membantu melindungi lingkungan, mencegah kekurangan energi, hingga mengurangi ketergantungan pada negara yang diimpor.

Isi dari UU Energi terbarukan adalah mewajibkan operator jaringan listrik Cina untuk membeli sumber daya dari produsen energi terbarukan. Selain itu, UU itu juga menawarkan insentif keuangan seperti dana nasional untuk mendorong pengembangan energi terbarukan dan diskon pinjam serta preferensi pajak untuk proyek-proyek yang berhubungan dengan energi terbarukan pula.⁸² UU *renewable*

⁸⁰ D.D, *Why Cina is sick of foreign garbage*, The Economist, dalam <https://www.economist.com/blogs/economist-explains/2017/08/economist-explains-8> diakses pada 17 Januari 2018.

⁸¹ Renewable Energy World, 2005, *China Passes Renewable Energy Law*, diakses dari <https://www.renewableenergyworld.com/articles/2005/03/china-passes-renewable-energy-law-23531.html> pada tanggal 24 April 2018.

⁸² Ibid.

energy dirancang untuk membantu melindungi lingkungan, mencegah kekurangan energi, dan mengurangi ketergantungan pada negara yang diimpor.

Kemudian pada tahun 2007, pemerintah Cina melalui Kementerian Perdagangan Cina mengumumkan Hukum mengenai pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah padat.⁸³ UU ini terdiri dari ketentuan umum, pengawasan pengolahan dan pengendalian pencemaran lingkungan oleh limbah padat, bab III pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan, bab IV Ketentuan khusus tentang pencegahan dan pengendalian lingkungan, bab V Tanggung jawab hukum dan bab VI ketentuan tambahan.⁸⁴ Hal ini juga diperkuat oleh data yang ditujukan kepada Parlemen dan Dewan Eropa pada tahun 2007.

Data tersebut menunjukan 2 pokok utama pembahasan yaitu pertama mengenai Peraturan Cina tentang Administrasi Impor dan Ekspor Limbah Padat. Dan kedua mengenai rekomendasi untuk anggota Uni Eropa tentang prosedur dalam mengekspor limbah padat ke Cina.⁸⁵ Dalam bagian pertama dijelaskan bahwa limbah padat yang berasal dari luar Cina dilarang dengan sengaja dibuang ke Cina, serta Cina juga melarang impor limbah padat yang tidak dapat digunakan sebagai bahan mentah atau diolah secara ramah lingkungan. Bagian kedua menjelaskan tentang bagaimana SEPA atau (*the State Environmental Protection Administration*) menjadi otoritas yang ditunjuk untuk mengelola impor limbah

⁸³ Ministry of Commerce, 2007, *Law of the People's Republic of China on Prevention and Control of Environmental Pollution by Solid Waste*, diakses dari <http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/policyrelease/internationalpolicy/200703/20070304471567.html> pada 8 Juni 2018

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Anonim, 2007, *China's Position Paper (Amended version)*, diakses dari <http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/135377.htm>. Pada 10 Juni 2018

padat. Bagian ketiga menjelaskan bahwa limbah padat impor harus memenuhi standar perlindungan lingkungan nasional Cina dan memenuhi pemeriksaan mutu dan pemeriksaan yang dilakukan oleh departemen karantina nasional. Bagian keempat menjelaskan berbagai persyaratan impor yang masuk ke Cina harus memiliki sertifikat atau lisensi tertentu.⁸⁶

Hingga pada akhirnya tahun 2013 muncul yang disebut dengan Green Fence Operation. Operasi *Green Fence* ini bertujuan untuk membatasi jumlah daur ulang yang terkontaminasi dan limbah yang dikirim ke Cina.⁸⁷ Operasi ini tidak membuat peraturan baru melainkan menegakkan peraturan yang dibuat pemerintah Cina melalui berbagai kementerian yang bersangkutan pada tahun 2011. Seperti yang dicantumkan pada pasal 12, yaitu :

“ In the process of importing solid waste, measures shall be taken to prevent it [imports] from spread[ing] seepage and leakage or other measures to prevent pollution of [the] environment. ”

Bahwa pemerintah Cina menemukan beberapa pelanggaran yang terjadi dalam impor limbah padat dengan menunjukkan foto sampah, sisa makanan dan bahan dibawah standar yang telah ditentukan yang sengaja dikirim ke Cina.⁸⁸ Operasi ini sangat mempengaruhi pasar ekspor karena menyebabkan negara-negara yang melakukan ekspor ke Cina kebingungan kemana membuang limbah daur ulangnya, terutama untuk kertas dan plastik daur ulang. Cina dalam operasi ini melakukan inspeksi oleh bea cukai untuk membatasi jumlah bahan yang tidak dapat

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Will Flower, 2016, *What Operation Green Fence has Meant for Recycling*, diakses dari <http://www.waste360.com/business/what-operation-green-fence-has-meant-recycling> pada 28 Mei 2018.

⁸⁸ Ibid

di daur ulang.⁸⁹ Pada operasi ini juga terdapat pembatasan kontaminasi sebesar 0,3% tetapi pada praktiknya dihitung sebesar 5%. Pada sub-bab selanjutnya akan dijelaskan mengenai proses pengambilan kebijakan pelarangan impor limbah padat pada tahun 2018.

4.4 Kebijakan larangan impor limbah padat Cina

Proses perumusan kebijakan luar negeri Cina untuk larangan impor limbah padat bisa dilihat kronologis pada awal tahun 2017 dimana pemerintah Cina mengumumkan aksi *National Sword*. *National sword* merupakan aksi dengan tujuan untuk menghentikan tindakan penyelundupan, karena adanya kelompok kelompok tertentu yang menggunakan izin ilegal untuk mengimpor limbah padat. Tindakannya yaitu dengan melakukan pemeriksaan inspeksi bal-bal plastik kelas rendah serta kertas dengan kadar air tinggi. Inspeksi ini dilakukan oleh administrasi umum Bea Cukai Cina, yang menargetkan *foreign garbage* atau limbah asing termasuk plastik, limbah industri, elektronik, dan limbah rumah tangga lainnya.

Aksi penegakan diperkuat pada aktivitas yang kriminal yang memungkinkan penipuan untuk Cina. Pada bulan Februari, Cina menahan 90 tersangka dan menyita 22.100 metrik ton bahan skrap asing. Awal April pemerintah Cina petugas bea cukai diyakini memeriksa setiap kontainer memasuki negara di pelabuhan tertentu, yang menyebabkan penundaan untuk pengirim barang. Hal ini mengindikasikan bahwa aksi kampanye *National Sword* juga digunakan untuk menilai kualitas material secara keseluruhan, bukan hanya legalitas izin yang digunakan untuk mengimpor muatan.

⁸⁹ Jerry Powell, 2013, *Operation Green Fence is deeply affecting export markets*, diakses dari <https://resource-recycling.com/recycling/2013/04/12/operation-green-fence-is-deeply-affecting-export-markets/> pada 28 Mei 2018.

Pada saat Presiden Xi Jinping menghadiri *The 34th meeting of the Central Leading Group for Comprehensively Deepening Reforms*, ia menekankan pengawasan terhadap pelaksanaan reformasi masalah di Cina secara keseluruhan. Pertemuan ini merupakan formulasi kebijakan dan badan pelaksana yang di bentuk dibawah Politburo Partai Komunis Cina. Badan ini telah dibentuk pada sidang paripurna ke 3 Cina pada November 2013. Keanggotaanya terdiri dari pemangku kepentingan yaitu Presiden Xi Jinping dan jajarannya. Pertemuan itu dihadiri oleh Li Keqiang (*prime minister*) dan Liu Yunshan yang secara struktural mereka adalah anggota Komite Tetap dari Biro Politik Partai Komunis dan wakil kepala kelompok.⁹⁰ Reformasi masalah di Cina tersebut juga mencakup reformasi lingkungan.

Tugas utama *Leading group* ini adalah menentukan pedoman kebijakan untuk mereformasi sistem ekonomi, politik, budaya, sosial, etika dan pembangunan partai untuk mengatasi masalah reformasi jangka panjang, serta untuk memandu badan-badan terkait reformasi BPK di tingkat pusat dan daerah serta mengawasi pelaksanaan rencana reformasi. Kelompok ini memiliki kemampuan untuk mendorong kebijakan melewati birokrasi dan membantu Sekretaris Jenderal Xi Jinping mengkonsolidasikan kekuasaannya atas aparat pemerintah Cina, seperti dewan negara dan Perdana Menteri. Kelompok ini setidaknya terdiri dari pejabat wakil pemimpin nasional (dalam hirarki resmi). Sebagian besar anggotanya juga anggota Politburo sebuah badan pembuat keputusan yang beranggotakan 25 orang. Pada saat pertemuan ke 34 tahun 2017, salah satu delegasi merekomendasikan

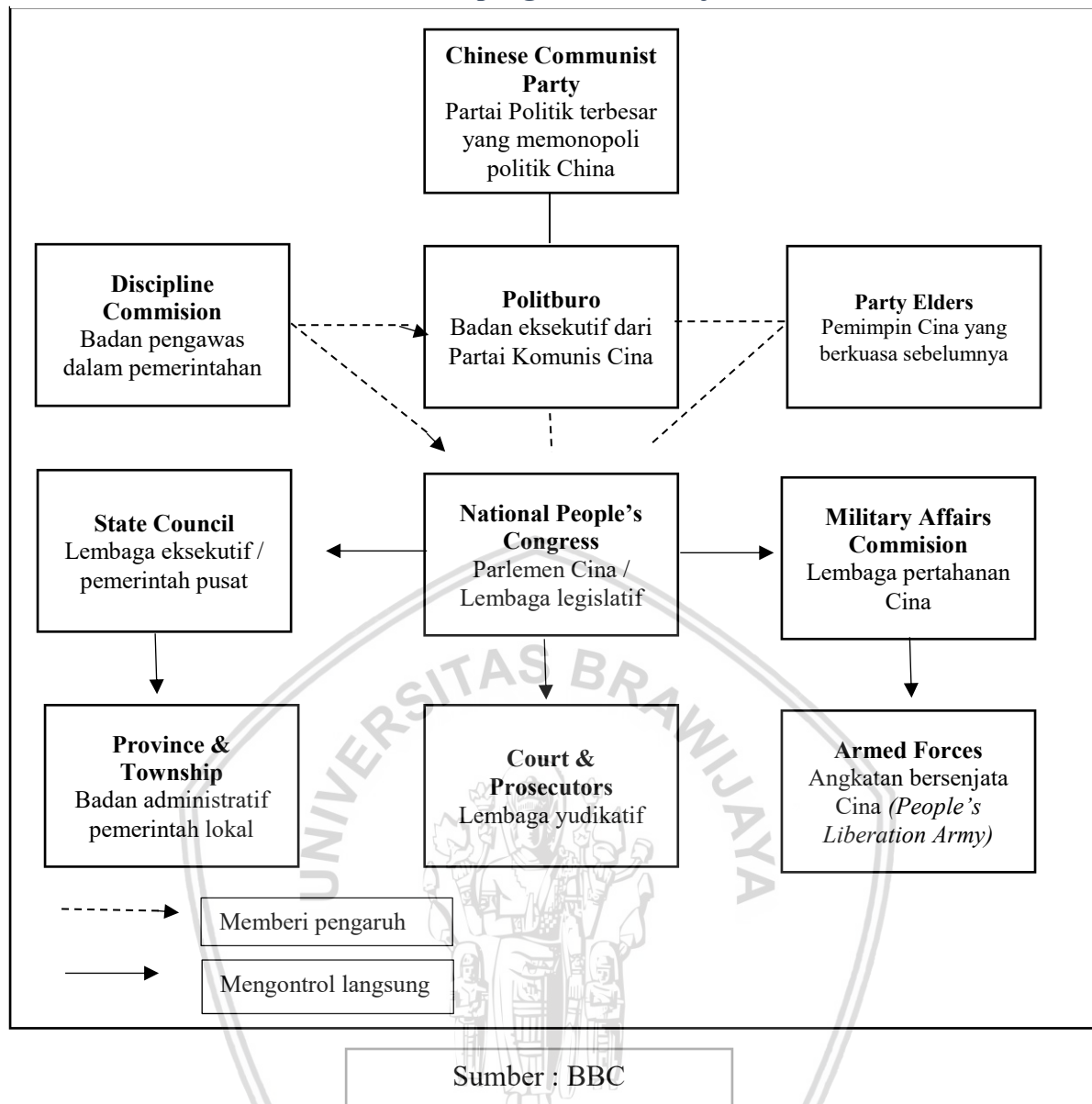
⁹⁰ Zhangrui, CCTV, *Xi demands enhanced supervision over reform efforts*, diakses dari <http://english.cctv.com/2017/04/18/ARTINHuQg6O5QNBAvLXALW8P170418.shtml> pada 18 Juni 2018

bahwa peraturan harus ditingkatkan untuk secara signifikan mengurangi kategori dan volume impor limbah. Hal ini juga menunjukkan bahwa proposal penegakan hukum dalam impor limbah padat disetujui oleh Presiden Xi Jinping.

Latar belakang munculnya aksi National Sword Cina adalah sebagai akibat penyelundupan dan mengimpor limbah padat yang telah terkontaminasi. Pada pertengahan Juni terjadi inspeksi di pabrik daerah provinsi Guangdong Cina. Bea Cukai Kota Shantou, Kementerian Perlindungan Lingkungan Hidup, inspeksi dan karantina menyita 85.000 ton plastik dan logam bekas dengan nilai 1 miliar RMB (146,5 juta US dollar). Tanggal 18 Juli 2017, Cina memberikan notifikasi kepada WTO bahwa ia akan membatasi impor jenis-jenis tertentu seperti plastik PET, PE, PVC dan PS, tekstil dan *slag vanadium* pada akhir tahun nanti. Pada akhirnya awal 2018 pembatasan impor pun diberlakukan.

Melihat proses fenomena pembuatan kebijakan tersebut, kita juga dapat melihat dari struktur pengambilan kebijakan luar negeri Cina dibawah ini. Pembuatan kebijakan di Cina kurang lebih mirip dengan negara-negara besar lainnya. Suatu kebijakan baru diusulkan, dirancang, disalurkan untuk konsultasi, dan diperiksa kembali sebelum kemudian diimplementasikan. Namun untuk memahami bagaimana pemerintah Cina bekerja dalam mengambil suatu kebijakan akan menjadi rumit dan sulit karena informasi-informasi terkait kepemimpinan dan pengambilan kebijakan di Cina seringkali dirahaskan. Selanjutnya akan penulis jelaskan mengenai proses pengambilan kebijakan di Cina melalui sebuah bagan.

Gambar 4.2 Proses pengambilan kebijakan di Cina



⁹¹ BBC News, *How China is Ruled*, diakses dari http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/in_depth/china_politics/government/html/1.stm pada 18 Juni 2018

Di dalam sistem politik Cina, pihak-pihak yang dapat berpengaruh dan terlibat di dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri antara lain adalah pemerintahan dan partai tingkat tinggi, kementerian luar negeri, kementerian ekonomi dan perdagangan luar negeri, dan kementerian pertahanan.⁹² Hampir seluruh anggota dalam badan-badan terkait dengan pengimplementasian kebijakan merupakan anggota dari CPC (*Communist Party of China*). Kekuasaan dari politburo partai CPC sangat penting, partai ini memiliki kedudukan lebih tinggi dari seluruh sektor badan pemerintahan.⁹³ Presiden, Perdana Menteri, dan Ketua NPC (*National People's Congress*) merupakan pejabat senior CPC. Politburo ini membuat kebijakan berdasarkan keputusan konsensus dan tidak transparan.⁹⁴

Badan tertinggi dalam birokrasi pemerintahan Cina yang menjadi badan yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan setelah CPC adalah *State Council* atau Dewan Negara. Dewan negara bertugas mengusulkan kebijakan dan menentukan tujuan kebijakan utama. Dewan negara diketuai oleh *state premier* yang memiliki kesamaan peran dengan perdana menteri, dengan bantuan beberapa wakil *state premier* dan anggota dewan untuk mengawasi sistem pemerintahan. Selain itu Dewan Negara juga berhak membentuk *Leading Small Group* (LGS) untuk mengoordinir penyusunan kebijakan di kementerian.⁹⁵

Badan lainnya yang menjadi penting dalam pembuatan kebijakan adalah *National People's Congress* (NPC). NPC merupakan entitas parlementer yang

⁹² Robert L. Worden, Andrea Matles Savada and Ronald E. Dolan, *China: A country Study Foreign Policy Decisions Making and Implementation*, Washington: GPO for the library of Congress, 1987, Online, diakses dari <http://countrystudies.us/china/126.htm> pada 12 Juni 2018

⁹³ Linda Jakobson dan Ryan Manuel, *How foreign policy decisions made in China?*, 2016, Asia and the Pacific Policy Studies, hal. 2.

⁹⁴ Kreab Gavin Anderson, *How foreign policy are made in China*, Hongkong.

⁹⁵ Linda Jakobson dan Ryan Manuel, op.cit, hal 3.

secara prinsip bertugas untuk mengawasi Dewan Negara. Namun dalam pelaksanaannya, seringkali NPC dibayangi oleh Dewan Negara dalam proses perizinan kebijakan. Di dalam pembuatan kebijakan luar negeri, NPC memberikan suara pada setiap langkah awal kebijakan-kebijakan penting seperti restrukturisasi pemerintahan dan *five-year plans*.⁹⁶ Setelah kebijakan diusulkan, kemudian dikonsepskan dan diimplementasikan oleh Kementerian. Kementerian mampu memprakarsai kebijakan dalam cakupan yang lebih kecil. Kemudian kebijakan tersebut harus diajukan ke Dewan Negara untuk mendapatkan persetujuan.⁹⁷

Dalam pembuatan kebijakan luar negeri, terdapat tiga badan yang memiliki peran paling penting dalam isu-isu kebijakan luar negeri yang krusial adalah CPC, *Politburo Standing Committee* (PSC), dan PSC bertugas untuk mengawasi kebijakan-kebijakan penting yang mempengaruhi hubungan Cina dengan beberapa negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, Rusia, dan Korea Utara. PSC juga berurusan dengan keadaan darurat dan krisis internasional. Walaupun setiap isu strategis ditangani oleh anggota PSC seperti Wang Qishan yang menangani hubungan Cina – Amerika Serikat, Li Keqiang pada Uni Eropa, dan Zhang Dejiang pada Korea Utara, namun seluruh tanggungjawab khusus kebijakan luar negeri berada di tangan ketua PSC Xi Jinping.⁹⁸

Di dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri Cina, bisa dibilang prosesnya cukup rumit dan seringkali terjadi tumpang tindih dalam proses pembuatannya. Semua aktor kebijakan luar negeri menyatakan bahwa mereka menjalankan kebijakan luar negeri atas nama kepentingan nasional Cina, dan

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Kreab Gavin Anderson, op.cit.

⁹⁸ Linda Jakobson dan Ryan Manuel, op.cit, hal 3.

hampir seluruh tindakan dapat dibenarkan. Sebagian besar aktor dalam sistem kebijakan luar negeri ini memiliki kedudukan yang sejajar, sehingga mereka tidak dapat mengeluarkan perintah satu sama lain. Hanya perintah dari badan yang lebih tinggi yang dapat menentukan keputusan. Oleh karena itu banyak aktor dalam sistem kebijakan luar negeri Cina yang bersaing untuk mendapatkan kemurahan hati dari badan yang berkedudukan lebih tinggi, dalam hal ini ialah Sekretaris Jenderal Partai, Xi Jinping. Maka Xi Jinping menjadi aktor pengambil keputusan yang paling berpengaruh di dalam kebijakan luar negeri Cina.⁹⁹

Dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri Cina tentang larangan impor limbah padat, adanya *The 34th meeting of the Central Leading Group for Comprehensively Deepening Reforms* pada 18 April 2017 berpengaruh terhadap National People Congress Cina pada 18-24 Oktober 2017 yang pada akhirnya terdapat pemberlakuan pelarangan impor limbah padat jenis tertentu.

⁹⁹ Ibid, hal.6

BAB V

ANALISIS PROSES PENGAMBILAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI CINA DALAM PELARANGAN IMPOR LIMBAH PADAT CINA PADA JANUARI 2018

Pada bab V ini penulis akan membahas mengenai bagaimana proses pengambilan kebijakan Cina dalam melarang impor limbah padat dalam memberikan larangan terhadap jenis atau kategori limbah padat tertentu pada tahun 2018. Impor limbah padat Cina sudah dimulai sejak 1980-an hingga akhirnya munculah masalah-masalah yang disebabkan oleh impor itu. Cina merupakan negara pengimpor utama limbah padat dunia saat ini. Menjadi negara pengimpor utama menjadikan pemerintah Cina sadar akan kerusakan di wilayahnya, bahwa limbah padat yang dikirim ke Cina tidak sepenuhnya limbah bahwa terdapat limbah yang dengan sengaja dicampur atau bahkan terkontaminasi. Pemerintah Cina mulai mengeluarkan langkah-langkah kebijakan untuk menanggulangi masalah yang mengganggu wilayah negaranya.

Terdapat tiga alternatif utama yang menjadi proses kebijakan luar negeri Cina yang akan dibahas oleh penulis yang dilihat melalui tingkah laku aktor utama. Alternatif pertama adalah tetap menerima keseluruhan limbah padat ke Cina. Alternatif kedua adalah menerima sebagian limbah padat impor agar masuk ke Cina dan melakukan inspeksi *Green Fence Operation*. Dan alternatif ketiga adalah tidak menerima sama sekali impor limbah padat dari negara lain atau dikenal dengan serangkaian *National Sword Policy*. Ketiga alternatif memiliki implikasi masing-masing apabila diterapkan, hal tersebut bisa dipengaruhi oleh berbagai dimensi. Aktor utama dalam proses pengambilan kebijakan ini adalah Presiden Xi Jinping selaku pemimpin elite utama negara tersebut. Presiden Xi Jinping mempunyai

pengaruh besar dalam *Chinese Communist Party*, Polituburo, serta dalam Kongres Nasional yang dilakukan setahun sekali.

Kemudian dengan adanya fenomena tersebut penulis akan menguji argumen utama dengan menggunakan teori poliheuristik yaitu *decision making process* dari level individu milik Alex Mintz. Dimana pada teori poliheuristik terdapat 2 proses utama yaitu proses pertama mengidentifikasi *decisions matrix* dari pembuat kebijakan dan proses kedua mengaplikasikan kalkulasi poliheuristik ke dalam matriks kebijakan. Pada proses pertama terdapat 3 variabel utama yaitu melihat alternatif, dimensi dan implikasi kebijakan-kebijakan lain sebelum pada akhirnya muncul variabel *ultimate decisions* sebagai pilihan akhir dari berbagai alternatif yang ada dan mempunyai kalkulasi yang sesuai.

5.1 Identifikasi *decisions matrix* dari pembuat kebijakan

Matriks keputusan Cina sehubungan dengan alternatif kebijakan untuk memberikan pelarangan impor limbah padat bisa dilihat pada bagan matriks kebijakan. Matriks kebijakan ini dilihat dari tiga alternatif kebijakan dan tiga dimensi kebijakan. Tiga dimensi kebijakan yang digunakan dapat dilihat dari dimensi lingkungan, ekonomi dan politik yang dilihat dari penelitian lain tentang pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Analisis untuk setiap dimensi terdiri dari studi literatur dari fakta dan isu-isu lingkungan, ekonomi, dan politik yang terkait khusus dengan kasus ini. Di awal pemerintah Cina tampak bahwa pemerintah Cina dihadapkan dengan pilihan bahwa dengan adanya masalah sampah impor yang mencemari lingkungannya, pemerintah Cina melakukan usaha-usaha alternatif untuk mengurangi limbah berkualitas rendah melakukan inspeksi di pelabuhan. Selain itu, pemerintah Cina memiliki lebih dari sekedar dua pilihan utama. Penulis melihat bahwa pemerintah Cina memiliki 3 alternatif tindakan yang

tersedia untuk itu sebagai reaksi atas tercemarnya lingkungan Cina dan kesehatan masyarakatnya. Masing-masing dari tiga alternatif potensial pada dasarnya independen dari yang lain, meskipun beberapa elemen tumpang tindih. Ketiga alternatif akan dijelaskan pada sub-bab selanjutnya.

5.1.1 Alternatif

Alternatif adalah tindakan yang memiliki beberapa pilihan untuk menyelesaikan sebuah masalah dan memiliki tujuan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Cina. Alternatif pertama adalah tetap menerima keseluruhan limbah padat ke Cina. Pemerintah Cina secara tidak langsung mempunyai pilihan untuk tetap menerima limbah padat ke Cina, diakibatkan oleh tuntutan industri daur ulang domestik yang membutuhkan jenis-jenis limbah padat tertentu. Pemerintah Cina bisa saja mempertahankan hak-hak pebisnis atau industri daur ulang dalam negeri. Alternatif ini kemudian setara dengan kebijakan awalnya yaitu tetap menerima limbah ke dalam negeri. Hal ini dapat dilihat bahwa industri dalam negeri, mengatakan perusahaan-perusahaan daur ulang logam bekas apabila diberlakukan aturan baru tersebut. Bahwa sekitar 20 persen impor skrap tembaga disumbang dari impor bahan-bahan dari negara lain.¹⁰⁰

Alternatif kedua adalah menerima sebagian limbah saja. Hal ini dapat terlihat ketika menerapkan *Green Fence Operation*.

*“... checking containers of recyclables for waste must be a top priority for customs officials. Existing regulations limit the amount of non-recyclable materials in bales, but enforcement of these rules has been lax”.*¹⁰¹

¹⁰⁰ Muyu Xu Reuter Staff, Reuters, *China scrap metal firms face pressure from import curbs: official*, diakses dari <https://www.reuters.com/article/us-china-metals-scrap/china-scrap-metal-firms-face-pressure-from-import-curbs-official-idUSKBN1HX0MK> pada 28 Juni 2018

¹⁰¹ Jerry Powell, *Resource Recycling*, diakses dari <http://resource-recycling.com/node/3679>

Presiden Xi Jinping pada tahun 2013 menerapkan kampanye itu dengan melakukan pemeriksaan terhadap kontainer-kontainer yang membawa limbah padat yang diimpor ke Cina. Lima bulan pertama Cina menerapkan operasi tersebut berhasil 68.000 ton limbah agar tidak masuk ke negaranya.¹⁰² Dengan cara menolak ratusan kontainer limbah yang mengandung limbah padat yang telah terkontaminasi. Pihak pemerintah Cina mempunyai tujuan untuk mencegah impor limbah yang terkontaminasi masuk ke Cina, dengan cara mengurangi nilai bahan yang dapat di daur ulang.¹⁰³

Selain itu, Presiden Xi Jinping melanjutkan kampanye *National Sword* dengan memberikan pembatasan impor dengan tujuan mengurangi muatan limbah dan bahan skrap yang terkontaminasi. Hal ini termasuk dalam *partial ban* karena pemerintah Cina masih secara tidak langsung menerima limbah padat yang tidak terkontaminasi. Meskipun pihak berwenang Cina terus melakukan pemeriksaan tambahan di 26 pelabuhan utama Cina yang menyebabkan terhambatnya barang impor masuk dalam kurun waktu tiga hingga enam bulan.

Pemerintah Cina juga mendapatkan tekanan dari industri dalam negeri misalnya perusahaan-perusahaan daur ulang logam bekas apabila diberlakukan aturan baru tersebut. Bahwa sekitar 20 persen impor skrap tembaga disumbang dari impor bahan-bahan dari negara lain. Pemerintah Cina sebelumnya telah menyetujui pendirian sejumlah perusahaan daur ulang besi tua di wilayah pesisir seperti Tianjin, Fujian, dan Guangdong. Namun salah satu ketua pusat pengumpulan impor

¹⁰² Caroline Berk, New York, *China's new Green Fence puts pressure on US recyclables*, Online, diakses dari China Daily USA http://usa.chinadaily.com.cn/epaper/2013-09/13/content_16967949.htm pada 27 Juni 2018

¹⁰³ Kelly Rooney, Director of Recycling, *China's Green Fence Changed Recycling What Does It Mean For You?*, Online, diakses dari <https://www.advanceddisposal.com/whywasteblog/chinas-green-fence-changed-recycling-what-does-it-mean-for-you-2/> pada 27 Juni 2018

benda padat yaitu Shang, hal ini akan memberikan tekanan besar terhadap perusahaan karena mengakibatkan kurangnya bahan baku.¹⁰⁴ Tekanan itu mendorong perusahaan Cina untuk pindah ke negara Asia tenggara untuk mencari bahan mentah.¹⁰⁵ Apabila Cina menerima sebagian limbah, maka Cina akan tetap mendapatkan nilai impor yang hanya berkurang sebagian dan bisa memasok kebutuhan produsen dalam negeri.

Alternatif ketiga adalah tidak menerima sama sekali. Presiden Xi Jinping pada saat *The 34th meeting of The Central Leading Group for Comprehensively Deepening Reform* 18 April 2017, ia menjelaskan bahwa harus ada reformasi lingkungan. Setelah adanya usulan dari Presiden eksekutif Asosiasi Plastik Cina yaitu Steve Wong yaitu pembuatan daftar larangan impor bahan-bahan tertentu dalam usaha reformasi pengelolaan limbah padat yang baru.¹⁰⁶

Pada kongres nasional yaitu National People Congress menambahkan *special inquiry* agenda dalam membahas *Winning the Battle on Solid Waste Pollution*. Dipimpin oleh Zhand Dejiang yaitu menjabat sebagai ketua komite Tetap NPC yang melakukan penyelidikan tentang penegakan hukum UU pengendalian limbah padat dengan Dewan Negara. Menurutnya, untuk menunjang tujuan utama Kongres Partai ia menyatakan :

“We must realize that lucid waters and lush mountains are invaluable assets”.

¹⁰⁴ Muyu Xu Reuter Staff, Reuters, *China scrap metal firms face pressure from import curbs: official*, Online, diakses dari <https://www.reuters.com/article/us-china-metals-scrap/china-scrap-metal-firms-face-pressure-from-import-curbs-official-idUSKBN1HX0MK> pada 28 Juni 2018

¹⁰⁵ Ibid.

¹⁰⁶ Colin Staub, *Resource Recycling*, diakses dari <https://resource-recycling.com/recycling/2017/04/25/chinese-reform-committee-considers-restricting-imports/> pada 30 Juni 2018

“We encourage green and harmonious development between human being and nature in modern society, so as to meet people’s ever-growing demand for a better environment”.¹⁰⁷

Pemerintah Cina melalui Kementerian Perlindungan Lingkungan Cina mulai mengunjungi pabrik domestik dan menutup banyak pabrik yang tidak memenuhi standar lingkungan Cina, hal ini tercantum dalam *Environmental Protection Control Standard for Imported Solid Wastes as Raw Materials*. Melalui Menteri Perlindungan Lingkungan Cina yaitu Li Ganjie menyatakan bahwa :

“ We will tighten the regulation over imported waste processors. In 2018, the waste import permits will be issued more discreetly and in a smaller amount. We will conduct rigid on-site inspection over applicant companies and forbid falsification. We will continue to strengthen environmental protection and make sure the processing of imported wastes do not pollute the environment or harm the human health.”

“ First, we should align our thoughts and awareness with the Central authorities. We will make sure the reform measures are effectively implemented, significantly cut down the import volume, and strive to overachieve the objectives set forth in the plan”.¹⁰⁸

Cina bisa melihat faktor standar internasional yang ia pakai ketika ingin tidak menerima sama sekali limbah padat melihat dasar standar internasional yang ditandatangani oleh Cina yaitu Konvesi Basel atau *Basel Convention* tentang pengendalian pergerakan lintas batas limbah dan pembuangannya. Bahwa ekspor

¹⁰⁷ NPC Issue 4.2017, *Setting the Course*, diakses dari <http://www.npc.gov.cn/npc/zgrdzz/site1/20180213/00016cd0abbd1becca5b03.pdf> hal 40-41 pada 28 Juni 2018

¹⁰⁸ Steve Eminton, *Lets Recycle*, diakses dari <https://www.letsrecycle.com/news/latest-news/chinas-environment-minister-speaks-out-on-waste-imports/> pada 1 Juli 2018

limbah berbahaya dan limbah lainnya seharusnya tidak diizinkan jika negara bagian impor tidak menyetujui pengiriman limbah padat.¹⁰⁹

Hal ini sesuai pula dengan diskusi pada saat pertemuan pemimpin dan pejabat senior Cina pada *The 34th meeting of the Central Leading Group for Comprehensively Deepening Reforms* pada 18 April 2017 yang menekankan reformasi keseluruhan di Cina. Pada akhirnya akan mempengaruhi Communist Party Congress pada 18-24 Oktober 2017. Pada saat kongres Presiden Xi menyampaikan dialog yang panjang mengenai tujuan nasional saat ini yang komprehensif, termasuk pada sektor lingkungan. Hal ini dianggap sebagai *mother of all report* oleh pengamat kebijakan bahwa itu merupakan laporan pemikiran atau ideologi Xi Jinping dalam lima tahun kedepan. Menurutnya reformasi dalam bidang lingkungan adalah hal yang saat ini akan menekan dunia khususnya dalam perpolitikan dengan AS, yaitu Presiden Xi ingin menunjukkan bahwa negara berkembang terbesar di dunia memiliki kebijakan lingkungan yang jelas. Pemikiran ini sering disebut sebagai *Ecological Civilization*. Pada tahun lalu, Kementerian Perlingkungan Lingkungan dan Komisi Disiplin Pusat telah melakukan inspeksi provinsi yang mempunyai banyak pelanggaran dalam sektor lingkungan. Intinya adalah bahwa pendekatan lingkungan sekarang di masukkan dalam agenda Konstitusi Cina.¹¹⁰

Tetapi dengan adanya alternatif ini memungkinkan hubungan Cina dengan negara pengekspor akan berubah. Hal ini terlihat ketika akan dimulainya pelarangan impor limbah padat, salah satunya AS meminta Cina untuk mencabut larangannya.

¹⁰⁹ Ibid.

¹¹⁰ Dimitri de Boer, China dialogue, *Opinion : What does Xi's Thought mean for the environment?* Diakses dari <https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/10235-Opinion-What-does-Xi-s-Thought-mean-for-the-environment-> pada 1 Juli 2018

Hal ini disebutkan oleh juru bicara AS di Dewan WTO untuk sesi perdagangan barang, ia memberikan argumen bahwa pembatasan tersebut malah akan menyebabkan gangguan mendasar dalam rantai pasokan global untuk bahan bekas, merusak proses daur ulang yang selama ini sudah ada dan akhirnya akan berakhir di TPA saja. *Trade War* antara Cina dan AS dapat dilihat bahwa argumen juru bicara AS ke dewan WTO muncul tepat setelah Presiden Donald Trump memerintahkan Perwakilan Dagang AS (USTR) untuk memungut tarif setidaknya 50 miliar US \$ impor Cina. Hal ini menuai respon tegas dimana Cina akan memberikan tarif impor pula terhadap 128 produk impor AS. Menurut AS apabila Cina memberlakukan pelarangan tersebut, maka pusat daur ulang AS akan menyewa tenaga kerja yang jauh lebih mahal dan mengharuskan domestik AS memilah sampah mereka sendiri. Pilihan lain adalah mengalihkan aliran limbah padat AS ke negara dunia ketiga yang mana tidak memiliki fasilitas untuk daur ulang yang aman serta meningkatkan kekhawatiran tentang potensi kerusakan lingkungan menurut perwakilan Uni Eropa.¹¹¹

Dilihat dari tahun 2013 hingga tahun 2017 Presiden Xi Jinping mempunyai 2 fokus kebijakan yaitu menerima sebagian limbah dan menolak keseluruhan impor limbah padat ke Cina. Kedua alternatif kebijakan memiliki keuntungan dan kerugian yang berdampak pada dimensi-dimensi tertentu. Pada aspek selanjutnya akan dijelaskan bagaimana dimensi-dimensi seperti ekonomi, politik dan lingkungan dapat mempengaruhi kedua alternatif utama.

¹¹¹ Fred Prouser, Reuters : *US demands China reconsider catastrophic ban on importing foreign garbage and recyclables*, Online, diakses dari <https://www.rt.com/news/422255-us-china-garbage-recyclables-import/> pada 1 Juli 2018

5.1.2 Dimensions

Pada indikator kedua dalam tahapan pertama, kita mencoba mengidentifikasi dimensi yang relevan dalam mengevaluasi alternatif dalam matriks. Dalam kasus larangan impor limbah padat Cina terdapat tiga dimensi utama yang dapat penulis analisa dari perilaku Presiden Xi Jinping selaku aktor utama dalam pengambilan kebijakan Cina.

1. Dimensi Diplomatik

Cina di awal komitmennya mengikuti Konferensi PBB tentang *Human Environment* pada tahun 1972, sejak awal komitmennya di bidang lingkungan Cina memulai mengadakan pertemuan pertama tentang perlindungan lingkungan dan mengadopsi strategi nasional tentang perlindungan lingkungan. Pada tahun 1978 Cina mengakui pentingnya perlindungan lingkungan dalam Konstitusinya diikuti dengan implementasi UU Perlindungan Lingkungan setahun kemudian.¹¹²

Selama empat dekade berikutnya, Cina secara bertahap membangun kerangka hukum yang komprehensif tentang perlindungan lingkungan. Prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan dalam UU Perlindungan Lingkungan diberlakukan pada tahun 1989 ditambahkan banyak hukum tambahan untuk mengatasi masalah lingkungan tertentu seperti *ocean protection* atau perlindungan laut tahun 1982, *enviromental noise* atau polusi suara tahun 1996, *air pollution* tahun 2000, *cleaner production* tahun 2002, *environmental impact assesment* tahun 2002, *radioactive pollution* tahun

¹¹² Henry Gao, 2017, *China's evolving approach to environmental and labour provisions in regional trade agreements*, Online, diakses dari <https://www.ictsd.org/opinion/china-3> pada 8 Juli 2018.

2003, *solid waste* tahun 2004, *renewable energy* tahun 2005, *energy conservation* tahun 2007, *water pollution* tahun 2007, dan *circular economy* tahun 2008.¹¹³

Setidaknya Cina harus tunduk dan patuh terhadap kesepakatan-kesepakatan yang Cina ratifikasi atau tandatangani baik dalam level regional maupun internasional sebagai konsekuensi politik. Khususnya dalam kesepakatan-kesepakatan lingkungan. Tidak heran Cina mendapatkan kecaman dari masyarakat internasional ketika banyak bermunculan masalah lingkungan di Cina. Salah satunya adalah masalah *electronic waste* di salah satu kawasan di provinsi Guangdong Cina, Guiyu merupakan salah satu tempat pembuangan limbah elektronik terbesar di dunia. Di tempat pembuangan limbah Guiyu itu alat-alat elektronik lama dibuang dari negara-negara maju dan menyebabkan kerusakan lingkungan maupun pekerja sektor informal.¹¹⁴

Selain limbah-limbah padat, polusi udara di Cina telah menjadi masalah setiap tahunnya. Cina menerima kecaman dari masyarakat internasional. Salah satunya dari *Greenpeace* mengatakan bahwa pada tahun 2016 ambang batas polusi udara di Beijing memasuki tingkat paling rawan atau sering disebut sebagai *red alert*. Hal tersebut disebabkan oleh industri-industri besar yang menggunakan batu bara di provinsi sekitar Beijing. Asap-asap telah memenuhi langit di daerah penghasil baja di

¹¹³ Ibid.

¹¹⁴ Ibid.

selatan Beijing.¹¹⁵ Kecamatan-kecamatan tersebut mengganggu urusan politik Cina dalam mengambil suatu kebijakan mengenai lingkungan.

2. Dimensi Ekonomi

Bagi Cina sampah memiliki nilai ekonomis yaitu salah satunya digunakan menjadi bahan baku daur ulang beberapa industri daur ulang di Cina. Limbah-limbah padat yang diimpor ke Cina memiliki nilai kerugian ketika limbah yang dikirim mengandung barang lain atau zat-zat berbahaya yang menyebabkan kontaminasi. Pertumbuhan ekonomi di Cina berjalan sangat masif sampai pada akhirnya dibutuhkan langkah-langkah untuk menangani dampak lingkungan yang terjadi. Pembangunan yang begitu cepat merupakan salah satu alasan mengapa terdapat polusi udara, air, dan tanah yang serius di Cina dalam beberapa tahun terakhir.¹¹⁶

Dari awal 1990-an, perkembangan pesat perekonomian Cina menghasilkan sisa-sisa limbah padat seperti peralatan rumah tangga, *e-waste*, besi tua dan limbah plastik. Karena pada saat itu Cina tidak memiliki teknologi informasi dan memakai masyarakat (sektor informal) untuk mengolahnya, maka individu-individu itu yang mendaur ulang limbah-limbah padat seperti jerami, kaleng dan botol. Mereka mengambil dengan cara konvensional yaitu menggunakan tangan dan tidak ada pemikiran dari sektor informal untuk meminimalkan polusi. Pendekatan yang konvensional pada saat itu menyebabkan beberapa masalah ketika sektor informal mulai

¹¹⁵ Zhang Kai, 2016, *Red alert : whats happening with beijing's air pollution?*, Online diakses dari <http://www.greenpeace.org/eastasia/news/blog/red-alert-whats-happening-with-beijings-air-p/blog/58325/> pada 8 Juli 2018

¹¹⁶ Kenji Someno, 2015, *Recycling and Economic Growth in China's Interior*, diakses dari <http://www.tokyofoundation.org/en/articles/2014/recycling-in-china-interior> pada 2 Juli 2018

membongkar limbah yang mengandung logam berat dan bahan kimia hingga ditumpuk di lahan kosong begitu saja. Hal seperti ini yang menjadi masalah dan menyebabkan pencemaran lingkungan yang serius.¹¹⁷

Pemerintah Cina mengeluarkan rencana aksi untuk meningkatkan industri daur ulang di tengah upaya pemerinah untuk mempromosikan *green and sustainable growth*. Rencana pemerintah Cina yaitu 14 lembaga pemerintah ingin meningkatkan nilai output industri daur ulang sumber daya menjadi 3 triliun yuan (434,8 miliar dolar AS) tahun 2020 mendatang.¹¹⁸ Rasio produktivitas sumber daya harus naik sebesar 15 persen dari tingkat 2015, dan rasio pemanfaatan daur ulang limbah utama domestik harus meningkat mencapai 54,6 persen pada tahun 2020.¹¹⁹ Melalui upaya tersebut Cina berharap mengembangkan model pembangunan ramah lingkungan untuk *green modernisation* seperti yang dikatakan oleh Presiden Xi Jinping :

*“ A sound eco-environment is the basic foundation for the sustainable development of humans and society.. our environmental protection and rehabilitation efforts should focus on solving obvious issues that harm people’s health ”.*¹²⁰

Pemerintah Cina tertarik terhadap sirkulasi ekonomi yang tumbuh dalam beberapa dekade terakhir ini bahwa tingkat konsumsi sumberdaya saat ini tidak berprinsip berkelanjutan atau *sustainability*. Pergeseran ke model pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan membutuhkan

¹¹⁷ Ibid.

¹¹⁸ Xinhua, *China to boost recycling industry for greener growth*, diakses dari http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-05/04/content_29208191.htm pada 3 Juli 2018

¹¹⁹ Ibid.

¹²⁰ CCICED secretariat, CCICED UPDATE, diakses dari http://english.sepa.gov.cn/Resources/publications/CCICED_updates/ pada 2 Juli 2018

sirkular ekonomi dimana produk-produk seharusnya di daur ulang kembali, di perbaiki atau digunakan kembali (*recycled, repaired, or reused*) dan limbah bisa digunakan menjadi produk baru. Hal ini juga tercantum pada *Paris Climate Agreement* dan SDGs yang menekankan pada pendekatan yang bersifat transformatif dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dan penggunaan sumber daya. Membutuhkan pendekatan yang hati-hati dalam mengelola potensi dalam sirkular ekonomi ini, termasuk dalam daur ulang dari “limbah ke energi” dengan cara membakar sampah untuk menghasilkan listrik. Cina memiliki peran dalam memainkan kebijakan yang diambil dalam agenda ekonomi domestik, yaitu pada kebijakan dagang dan investasi luar negeri yang mempunyai dampak cukup besar. Cina mengembangkan energi yang ramah lingkungan bertujuan untuk menopang energi Cina agar tidak memakai energi yang tidak dapat diperbaharui.

Sebagai pengelola limbah utama dunia Cina mendapati krisis seperti kematian pekerja dalam tanah longsor di *disposal*, ketergantungan pada proses berkualitas rendah dan adanya protes-protes penduduk atas proyek insinerasi. Pemerintah Cina mengambil tindakan, yaitu mempromosikan *circular economy* atau ekonomi melingkar yang tertuang dalam Rencana Lima Tahun ke-12 dan ke-13. Banyak negara berkembang yang mempelajari cara Cina mengelola limbah.

Kebijakan Cina baru-baru ini mengenai larangan impor limbah padat dari negara lain memiliki efek *knock-on*. Bahwa contohnya di Inggris menunjukkan bahwa tanpa adanya opsi mengirim limbah ke Cina lagi maka

akan terjadi pembakaran di dalam negeri. Akibatnya ekspor limbah dari Inggris ke negara Asia telah meningkat seperti Malaysia.

Cina terus meningkatkan strategi ekonomi sirkularnya di domestik dan juga mencari peluang untuk mempromosikan agenda di level global.¹²¹ Dengan cara melakukan kerjasama perdagangan proyek investasi infrastruktur dibawah *Belt and Road Initiative*. Melihat dimensi ekonomi Cina terlihat bahwa Pemerintah Cina melalui kebijakan tersebut memiliki kesempatan untuk membantu negara-negara berkembang lainnya masuk dalam sirkulasi ekonomi Cina.¹²² Data-data mengenai pertumbuhan ekonomi negara berkembang lain akibat adanya kebijakan larangan impor limbah padat Cina akan dikemukakan pada sub-bab selanjutnya. Dengan adanya proses daur ulang limbah padat di Cina, limbah dapat digunakan menjadi suatu energi alternatif tetapi hal tersebut juga menuai pro dan kontra.

3. Dimensi Lingkungan

Dalam melihat dimensi lingkungan Cina, latar belakang lingkungan Cina saat ini ingin mencapai tujuan nasional nya yaitu membuat Cina menjadi peradaban ramah lingkungan atau *ecological civilization*. Hal ini tertuang dalam *blueprint* Energy Development Strategy Action Plan (2014-2020).¹²³ Pada awal 2017, Cina mengumumkan akan menginvestasikan 360

¹²¹ Ibid.

¹²² Johanna Lehne, Opinion : *China will be key to creating a global circular economy*, diakses dari China Dialogue <https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/10298-Opinion-China-will-be-key-to-creating-a-global-circular-economy> pada 2 Juli 2018

¹²³ Daniel de Oliveeira, The Diplomat : *The Stumbling Blocks to China's Green Transition*, Online diakses dari <https://thediplomat.com/2018/04/the-stumbling-blocks-to-chinas-green-transition/> pada 3 Juli 2018

milyar USD dalam bidang energi terbarukan tahun 2020 nanti dan membatalkan rencana untuk membangun 85 pembangkit listrik tenaga batubara.¹²⁴ Cina melalui the National Energy Administration meluncurkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan pada batubara. Cina berharap bisa menjadi pemimpin global di bidang lingkungan salah satunya Cina sudah menginvestasikan lebih dari 100 miliar dolar AS per tahunnya.¹²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa pada dimensi lingkungan memang Cina ingin mengembangkan peradaban yang ramah lingkungan.

Oleh karena itu, ketika limbah padat yang berasal dari negara lain masuk ke Cina dan membuat kontaminasi terhadap sungai, air, dan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat maka diperlukan kebijakan yang bisa menanggulangi masalah nasional tersebut. Seperti disebutkan pada sebuah artikel bahwa Cina mencari langkah-langkah untuk memperbaiki cara mendaur ulang dan membuang limbah padat, seperti batu bata dan beton, mencegah pembuangan limbah ilegal.¹²⁶

Pemerintah Cina melalui Kementerian Perlindungan Lingkungan yaitu Lie Ganjie dalam suatu Press Conference memberikan pendapat bahwa :

“To implement the Central Committee’s policies timely ... some policies are implemented in a short period”.

“It may result in chaos in society.”

“During the whole process, we’ve taken multiple problems into consideration,”

¹²⁴ Ibid.

¹²⁵ Jiang Kejo, Acuity : *China’s renewable energy revolution*, diakses dari <https://www.acuitymag.com/opinion/chinas-renewable-energy-revolution> pada 3 Juli 2018

¹²⁶ South China Morning Post, *China Pollution*, 25 Mei 2018 diakses dari <http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2147770/chinas-war-pollution-takes-aim-solid-waste-recycling> pada 1 Juli 2018

“And we’ve left the transition time and period before the policy and action plan. For more specific problems, we also timely coordinate with relevant parties and solve it, so there was no great impact.”

“I think now the most important thing is that not only China, but any other foreign country should implement the spirit of the Basel Convention and try to reduce, dispose of and consume the hazardous waste and other garbage they produced, which will be conducive to promoting a global green low-carbon recycling development and building a clean, beautiful world,”¹²⁷

Sebagai representasi Xi Jinping ia menyatakan bahwa ia mengintegrasikan kebijakan ini sesuai dengan penerapan kebijakan Komite Sentral dan memang pasti akan menyebabkan kekacauan di masyarakat global khususnya pasar internasional negara-negara pengekspor. Ia juga menyatakan bahwa melihat dari keseluruhan proses yang dijalani telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum pada akhirnya kebijakan tersebut muncul.

Ia mengemukakan kembali bahwa semua negara yang menyetujui Konvensi Basel atau *Basel Convention* harus mencoba untuk mengurangi, membuang dan mengkonsumsi limbah berbahaya dan sampah lain yang mereka hasilkan. Selain itu, mereka juga sudah sepantasnya untuk mempromosikan pembangunan berbasis daur ulang dan membangun dunia global yang bersih dan indah. Konvensi Basel adalah sebuah perjanjian internasional yang dibuat untuk mengurangi pergerakan limbah berbahaya di antara negara-negara dan secara khusus untuk mencegah pengalihan

¹²⁷ CCTV on Press Conference : *China’s solid waste imports decline 12 pct in 2017 – Minister*, diakses dari <http://www.cctvplus.com/news/20180317/8076178.shtml#!language=1> pada 1 Juli 2018

limbah berbahaya dari negara maju ke negara-negara berkembang di ratifikasi pada 22 Maret 1989 dan mulai berlaku pada 5 Mei 1992.¹²⁸

Para pemimpin elite politik Cina akan berusaha mencapai mewujudkan tujuan nasional Cina yaitu *Ecological Civilization*. Hal ini sudah tercantum dalam speech Presiden Xi Jinping seperti dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Berikut adalah pidato Xi Jinping saat kongres nasional tahun 2017 :

“ We will get everyone involved in improving the environment and address environmental issues at the root. We will continue our campaign to prevent and control air pollution to make our skies blue again. We will speed up prevention and control of water pollution, and take comprehensive measures to improve river basins and offshore areas. We will strengthen the control of soil pollution and the restoration of polluted soil, intensify the prevention and control of agricultural pollution from non-point sources, and take measures to improve rural living environments. We will improve the treatment of solid waste and garbage”.

“ We will enforce stricter pollutants discharge standards and see to it that polluters are held accountable. We will improve our systems for credibility assessment based on environmental protection performance, for mandatory release of environmental information, and for imposing severe punishment for environmental violations. We will establish an environmental governance system in which government takes the lead, enterprises assume main responsibility, and social organizations and the public also participate. We will get actively involved in global environmental governance and fulfill our commitments on emissions reduction”.

Dari pernyataan Presiden Xi Jinping dapat dikatakan bahwa komitmen Cina dalam reformasi lingkungan akan dilakukan melalui memperbaiki lingkungan domestik terlebih dahulu. Salah satunya dengan

¹²⁸ Ibid.

kampanye dalam menanggulangi polusi udara di Cina dengan membuat menjadi lebih berwarna biru. Dan menjadi *highlight* penulis dimana pemerintah Cina juga ingin meningkatkan perawatan limbah padat dan sampah. Pada kalimat terakhir poin tersebut, Xi Jinping juga menjelaskan bahwa Cina akan terlibat aktif dalam tata kelola lingkungan global dan memenuhi komitmen kami pada pengurangan emisi. Bahkan apabila dikalkulasikan Xi Jinping menyebutkan *environment* atau lingkungan sebanyak 89 kali dalam pidatonya.¹²⁹

5.1.3 Implications

Dalam indikator ketiga dalam tahapan pertama, kita dapat melihat bahwa setiap tindakan alternatif yang dimiliki oleh Presiden Xi Jinping memiliki implikasi pada setiap dimensi. Berikut di bawah ini merupakan penjelasan dimana setiap alternatif mempunyai implikasi di masing-masing dimensi. Alternatif tindakan yang dilakukan oleh Cina adalah pertama menerima keseluruhan limbah ke negara Cina. Alternatif kedua adalah dengan menerima hanya sebagian limbah dari negara pengekspor dan melakukan inspeksi di pelabuhan. Alternatif ketiga adalah melarang impor limbah padat dari negara pengekspor dengan cara memberikan *list of solid waste ban* berlaku untuk seluruh negara pengekspor.

5.1.3.1 Cina memilih untuk menerima impor seluruh impor limbah padat (*No Ban*)

Dalam melihat implikasi diplomatik pada alternatif pertama dapat dilihat dari perilaku negara pengekspor limbah. Karena tidak adanya larangan atau *no ban* maka tidak akan ada yang berpengaruh terhadap

¹²⁹ Sean Calles, CGTN, diakses dari <https://america.cgtn.com/2017/12/26/china-vs-us-on-climate-change-policy-going-into-2018> pada 2 Juli 2018

hubungan negara Cina dengan negara pengekspor limbah lainnya. Dalam artian tidak ada perubahan yang signifikan atau dapat dikatakan sebagai *status quo* seperti keadaan sebelumnya. Dapat dilihat menurut Data, Cina telah mengambil sepertiga limbah Inggris untuk di daur ulang dan seluruh limbah kertas dari kawasan barat AS untuk di daur ulang.¹³⁰ Jadi tidak terlalu berpengaruh terhadap implikasi dimensi diplomatik jika Cina menerapkan *no ban*, dampaknya tidak akan berpengaruh secara signifikan dalam hubungan diplomatik.

Sedangkan melihat implikasi ekonominya, pemerintah Cina tetap membiarkan industri-industri daur ulang di Cina untuk mendapatkan keuntungan dari alternatif I ini. Dilihat dari data yang ditunjukkan pada penjelasan aspek dimensi ekonomi bahwa industri daur ulang Cina telah menggunakan bahan baku sekitar 50% dari adanya impor limbah.¹³¹ Hal ini merupakan keuntungan yang didapatkan oleh industri-industri daur ulang di Cina apabila tidak ada larangan impor limbah padat baik sebagian maupun total. Selain itu, implikasi ekonomi lainnya adalah Cina tetap mempunyai total nilai impor dari industri daur ulang limbah Cina secara keseluruhan. Hal ini merupakan benefit atau keuntungan yang dimiliki dari alternatif *no ban*.

Dalam melihat implikasi lingkungan, apabila diterapkan alternatif I ini tetap menunjang kerusakan wilayah-wilayah di Cina apabila tempat pembuangan limbah itu menumpuk sampah yang tidak kunjung di daur

¹³⁰ Anonim, Fact and Details : *Garbage and Recycling in China*. Online. Diakses dari <http://factsanddetails.com/china/cat10/sub66/item1111.html>

¹³¹ Becky Davis.Op.cit,

ulang. Pemerintah Cina mengatakan bahwa TPA ilegal di Cina menyebabkan lahan dan sumber air telah terkontaminasi oleh bahan kimia dan logam berat berbahaya.¹³² Menurut penelitian Kementerian Lahan dan SDA Cina pada tahun 2015 sebanyak 100.000 perusahaan industri telah ditutup atau direlokasi karena menyebabkan adanya limbah yang terbengkalai dan tidak ditangani. Sekitar 8 persen lahan subur di Cina telah terkontaminasi oleh logam berat.¹³³ Jadi implikasi lingkungan jika Cina menerapkan *No Ban* adalah Cina akan tetap mengalami kerusakan lingkungan akibat dari impor limbah padat maupun industri daur ulang yang tidak bertanggung jawab.

5.1.3.2 Cina memilih untuk menerima sebagian limbah padat tetapi juga melakukan inspeksi di pelabuhan terhadap kontainer yang membawa barang terkontaminasi (*Partial Ban with Inspection*)

Dalam melihat implikasi diplomatik apabila Cina menerapkan alternatif II, implikasi yang terjadi berdasarkan perilaku Presiden Xi Jinping salah satunya adalah *trade war* antara Cina dengan AS. AS bergantung pada Cina dalam hal mengimpor sampah dan ketika kebijakan tersebut dikeluarkan AS merasa prihatin pada lingkungan Cina, tetapi menurut AS pendekatan Beijing dikatakan tampak memiliki efek berlawanan dengan apa yang dimaksudkan dan membuat aturan yang terlalu cepat berubah. AS juga menuduh Cina melanggar kewajibannya di bawah naungan WTO, dengan memperlakukan limbah

¹³² South China Morning Post. *China's war on pollution takes aim at solid waste recycling, illegal dumping*. 25 Mei 2018. Online diakses dari <https://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2147770/chinas-war-pollution-takes-aim-solid-waste-recycling>

¹³³ Ibid

domestik dan asing secara berbeda dan menggunakan kebijakan yang sangat membatasi perdagangan.

“We request that China immediately halt implementation and revise these measures in a manner consistent with existing international standards for trade in scrap materials, which provide a global framework for transparent and environmentally sound trade in recycled commodities.”

Permintaan ini disampaikan sehari setelah Presiden Trump memerintahkan perwakilan dagang AS untuk menarik tarif setidaknya 50 miliar \$ impor Cina. Meskipun USTR diberikan waktu 15 hari oleh Trump untuk mengusulkan daftar atau list produk Cina yang akan di targetkan untuk diajukan ke WTO, kementerian perdagangan Cina mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap AS melalui WTO.

Sedangkan respon Kementerian Luar Negeri Cina yaitu menjelaskan bahwa negara Cina memiliki cara untuk melakukan *trade war* yang berpotensi merusak hubungan dengan AS, maka dari itu Cina juga mendesak AS agar mempertimbangkan kembali kebijakan ekonomi AS yang agresif. Menteri luar negeri Cina mengingatkan bahwa :

“The American consumers and enterprises will bear the brunt” of a trade war with China.

“You can tell from the 19th CPC Congress and the Two Sessions just concluded that the Chinese government has clearly identified its goal for development going forward. We will

continue to unswervingly pursue the set goal and path and no external forces or incidents could disturb our pace.”¹³⁴

Kementerian Luar Negeri Cina memberikan *statement* bahwa pemerintah Cina jelas mengidentifikasi tujuan pembangunan ke depan Cina. Pemerintah Cina akan tetap gigih mengejar tujuan dan jalur yang di tetapkan.

Selain itu, pertemuan pemimpin-pemimpin elite di Cina dalam *The Central Leading group for Comprehensively Deepening Reforms* pada 18 April 2018 merupakan awal dari alternatif ketiga ini dikeluarkan. Ketika terdapat pembahasan khusus mengenai impor limbah padat Cina seperti yang dijelaskan pada bab 4 sebelumnya, bahwa pada saat pertemuan itu Presiden Xi Jinping mulai menyetujui peninjauan larangan impor limbah padat dalam mempromosikan reformasi pengelolaan limbah padat.¹³⁵ Pihak asosiasi dan pebisnis Steve Wong mengatakan saat pertemuan tersebut bahwa :

“This will strengthen the regulation on solid waste management for the development of the Chinese circular economy”.

Dengan adanya pembahasan dan persetujuan oleh Presiden Xi Jinping pada pertemuan tersebut berpengaruh terhadap agenda kongres nasional *Communist Party Congress* yang juga dipimpin oleh Xi Jinping pada 18-24 Oktober 2017. Ini merupakan cara bagaimana Xi Jinping merespon kecaman-kecaman internasional apabila ia mengambil resiko dengan memberlakukan alternatif ketiga.

¹³⁴ Foreign Ministry Spokesperson Hua Chunying's Regular Press Conference on March 23, 2018, diakses dari http://recife.china-consulate.org/por/wjbfyrth_8/t1545062.htm pada 3 Jul 2018

¹³⁵ Op.cit, Colin Staub.

Dalam implikasi ekonomi alternatif kedua pada tahun 2013 terdapat *Green Fence Operations*. *Green Fence Operations* merupakan cara pemerintah Cina mengubah tingkat kontaminasi dari 3 dan 10 hingga 1,5 persen. Limbah yang terkontaminasi adalah setiap limbah baik dalam bentuk *bale* maupun sepotong koran di dalam bal karton. Selain itu kontaminan lain seperti pecahan kaca, bahan organik seperti sisa makanan dan potongan rumput, intinya adalah barang yang dapat di daur ulang lalu tercampuri oleh barang kontaminan selama proses pengumpulan dan pemisahan.

Pabrik-pabrik di Cina pada saat itu mengubah praktek manajemen limbah dan berdampak pada permintaan dan harga pasar.¹³⁶ Karena dampak dari biaya pemrosesan atau pengolahan yang meningkat dan harga pasar yang turun atau merendah, banyak perusahaan daur ulang yang mencoba bertahan dalam industri ini.¹³⁷ Hal ini menimbulkan *cost* ketika pemerintah Cina menerapkan alternatif II. Implikasi ekonomi dalam alternatif kedua yaitu munculnya implikasi negatif atau kerugian yaitu mengakibatkan *cost* lebih tinggi dan harga pasar turun. Salah satunya dilihat dari menumpuknya Limbah Padat di Hongkong sebagai titik transit impor limbah.

Dalam melihat implikasi lingkungan pada alternatif II, muncul implikasi dimana Hongkong sebagai *entry point* limbah-limbah padat merasakan dampak yang cukup terlihat. Sampah-sampah asing

¹³⁶ Kelly Rooney, Op.cit.

¹³⁷ Ibid.

terpaksa ditumpuk di pelabuhan dan akan dibuang ke tempat pembuangan sampah atau *disposal*.¹³⁸ Selain itu data menunjukkan bahwa Hongkong harus menangani 1.500 metrik ton limbah padat asing setiap bulannya, hal ini juga menimbulkan beban berlebih di tempat pembuangan sampah atau *disposal*.¹³⁹ Dari sini terlihat bahwa Hongkong mengeluarkan *demurrage* atau biaya lebih waktu berlabuh untuk menangani limbah yang menumpuk di pelabuhan. Hong kong merupakan salah satu sumber FDI atau *foreign direct investment* Cina. Pada Juni 2011 tercatat ada 2.752 kantor pusat regional dan kantor regional perwakilan perusahaan induk mereka. Dan dari 81 persen perusahaan itu bertanggung jawab untuk bisnis-bisnis di Cina, oleh karena itu Hong kong adalah sebagai *entry point* Cina.¹⁴⁰ Maka dari itu ketika Hong kong mengeluarkan beban tambahan untuk kapal-kapal kontainer akan berdampak kepada perekonomian Cina.

Implikasi dalam dimensi lingkungan jika Cina menerapkan *partial ban with inspection* atau alternatif II yaitu dapat dilihat ketika tahun 2013 pemerintah Cina melalui Bea dan Cukai Cina melakukan inspeksi terhadap kapal-kapal kontainer yang membawa limbah padat, maka tetap ada limbah padat yang diizinkan masuk ke dalam negara Cina. Ketika sudah masuk ke dalam negara, belum tentu limbah tersebut di olah dengan manajemen pengelolaan yang baik. Bahkan

¹³⁸ Anonim, *SUN is amazed : foreign garbage abandons the countryside and stinkc Hong Kong* diakses dari http://the-sun.on.cc/cnt/news/20130315/00410_097.html pada 2 Juli 2018

¹³⁹ Ibid.

¹⁴⁰ Melissa Kaye Pang, 2013, *Hong kong as a base for doing business in mainland China*, Online diakses dari https://www.americanbar.org/publications/blt/2013/06/01_pang.html pada 11 Juli 2018.

terdapat limbah-limbah yang memang sengaja dibuang ke tempat pembuangan sampah tanpa di daur ulang.¹⁴¹ Hal ini tetap merusak lingkungan Cina, tetapi pemerintah Cina sudah berusaha mengurangi masuknya limbah ke wilayah lain di Cina itu sendiri.

5.1.3.3 Cina Tidak Menerima Sama Sekali Impor Limbah Padat dari negara lain (*Partial Ban*)

Dalam melihat implikasi diplomatik pada alternatif kedua Presiden Xi Jinping mendapatkan kecaman dari masyarakat internasional mengenai tindakan Cina yang tidak tunduk dan patuh terhadap perjanjian atau konvensi-konvensi yang ia ikuti. Akibatnya Presiden Xi Jinping mulai menekankan bahwa ia tak akan lagi mengorbankan lingkungan untuk pertumbuhan ekonomi sementara ini, ia menyerukan berbagai upaya untuk melestarikan sumber daya dan menghilangkan polusi pada saat awal ia menjabat tahun 2013.¹⁴²

“We have to understand that to protect the environment is to preserve our productivity and to improve the environment is to develop our productivity. Such concepts should be deeply rooted”.

Presiden Xi Jinping mengatakan bahwa konsep tersebut harus diperbaiki dari akarnya, tidak hanya dipermukaan saja.¹⁴³ Pada awal 2013 kepemimpinan Xi Jinping, sehingga ketika menolak sebagian dari sampah setidaknya ada janji-janji politik sudah sebagian dipenuhi. Bahkan ia bersumpah untuk mengaturnya secara ketat dan mengamati

¹⁴¹ Ibid.

¹⁴² CCICED Secretariat, Issue 6 of 2013, diakses dari http://english.sepa.gov.cn/Resources/publications/CCICED_updates/201606/P020160601415968232223.pdf pada 1 Juli 2018

¹⁴³ Ibid Hal. 2

red lines lingkungan di tengah arus urbanisasi yang cepat. Dari pernyataan yang dikemukakan oleh Xi Jinping, seharusnya Cina lebih masif dalam mencegah limbah padat yang terkontaminasi ke negaranya karena ia menekankan bahwa reformasi lingkungan yang masif.¹⁴⁴

Dimensi diplomatik dalam alternatif *partial ban* ketika Presiden Xi Jinping memberikan respon atas kecaman internasional melalui bea cukai dan departemen lainnya menerapkan inspeksi sebatas limbah padat yang terkontaminasi saja, maka komitmen Presiden Xi Jinping pasti masih dipertanyakan dalam memimpin peradaban ekonomi yang ramah lingkungan. Tapi setidaknya terdapat upaya Xi Jinping untuk memenuhi komitmen politik di awal kepemimpinannya.

Keikutsertaan Cina dalam lingkungan global dapat dilihat dari para pemimpin elite politik Cina yang akan berusaha mencapai mewujudkan tujuan nasional Cina yaitu *Ecological Civilization*. Hal ini sudah tercantum dalam speech Presiden Xi Jinping seperti dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Berikut adalah pidato Xi Jinping saat kongres nasional tahun 2017 :

“ We will get everyone involved in improving the environment and address environmental issues at the root. We will continue our campaign to prevent and control air pollution to make our skies blue again. We will speed up prevention and control of water pollution, and take comprehensive measures to improve river basins and offshore areas. We will strengthen the control of soil pollution and the restoration of polluted soil, intensify the prevention and control of agricultural pollution from non-point sources, and take measures to improve rural living environments. We will improve the treatment of solid waste and garbage”.

¹⁴⁴ Ibid.

“ We will enforce stricter pollutants discharge standards and see to it that polluters are held accountable. We will improve our systems for credibility assessment based on environmental protection performance, for mandatory release of environmental information, and for imposing severe punishment for environmental violations. We will establish an environmental governance system in which government takes the lead, enterprises assume main responsibility, and social organizations and the public also participate. We will get actively involved in global environmental governance and fulfill our commitments on emissions reduction ”.

Dari pernyataan Presiden Xi Jinping dapat dikatakan bahwa komitmen Cina dalam reformasi lingkungan akan dilakukan melalui memperbaiki lingkungan domestik terlebih dahulu. Salah satunya dengan kampanye dalam menanggulangi polusi udara di Cina dengan membuat menjadi lebih berwarna biru. Dan menjadi *highlight* penulis dimana pemerintah Cina juga ingin meningkatkan perawatan limbah padat dan sampah. Pada kalimat terakhir poin tersebut, Xi Jinping juga menjelaskan bahwa Cina akan terlibat aktif dalam tata kelola lingkungan global dan memenuhi komitmen kami pada pengurangan emisi. Bahkan apabila dikalkulasikan Xi Jinping menyebutkan *environment* atau lingkungan sebanyak 89 kali dalam pidatonya.¹⁴⁵

“ We should accelerate the reform of the environmental protection system and build a beautiful China. Man and nature are in the community of life. Mankind must respect nature, conform to nature, protect nature ”.

Komitmen Cina dapat dilihat dalam kepemimpinannya dalam memimpin Paris Climate Agreement, apalagi setelah AS keluar dari

¹⁴⁵ Sean Calles, CGTN, diakses dari <https://america.cgtn.com/2017/12/26/china-vs-us-on-climate-change-policy-going-into-2018> pada 2 Juli 2018

perjanjian tersebut.¹⁴⁶ Kedua negara tersebut berbeda dalam arah lingkungan. Xie Zhenhua perwakilan khusus Cina dalam *Climate Change Affairs* mengatakan bahwa :

*“China will 100% surely honor its own commitments and implement the Paris Agreement”.*¹⁴⁷

Dari sini terlihat keuntungan Cina ketika ia memang akan berkomitmen dalam lingkungan global, disaat itu pula AS mengundurkan diri dari perjanjian tersebut. Hal seperti ini mempengaruhi perpolitikan global dalam melihat Cina sebagai salah satu aktor yang ingin berpartisipasi dalam masalah lingkungan meskipun negaranya telah menyumbang sebagian besar polusi global.¹⁴⁸

Cina didukung pula oleh Perdana Menteri Inggris yang mana pada saat kunjungan bilateral Theresa May ke Cina ia bertemu secara langsung dengan Presiden Xi Jinping saat *tea ceremony*¹⁴⁹. Theresa May mengatakan bahwa negaranya akan bertanggung jawab atas penggunaan plastik seperti kebijakan yang diberlakukan oleh Cina dalam pelarangan impor limbah padat. Theresa juga menekankan pentingnya perjanjian perubahan iklim Paris dalam pertemuannya

¹⁴⁶ Daniel, *The Stumbling Blocks to China's Green Transition* : The Diplomat April 21st 2018, diakses dari <https://thediplomat.com/2018/04/the-stumbling-blocks-to-chinas-green-transition/> pada 2 Juli 2018

¹⁴⁷ Ibid.

¹⁴⁸ Jackson Ewing, *The Diplomat : Tough Tasks for China's New Environment Ministry*. Online diakses dari <https://thediplomat.com/2018/03/tough-tasks-for-chinas-new-environment-ministry/> pada 9 Agustus 2018

¹⁴⁹ Jessica Elgot, *Theresa May presses Xi Jinping on plastic waste at Beijing Talks*, diakses dari <https://www.theguardian.com/politics/2018/feb/01/theresa-may-china-xi-jinping-beijing> pada 2 Juli 2018

dengan Xi Jinping, bahkan ia juga memberikan satu set kotak serial BBC Blue Planet II.¹⁵⁰

Selain itu, dalam dimensi diplomatik juga alternatif ini mempunyai keuntungan yang mana muncul berbagai reaksi negara-negara pengekspor. Negara pertama AS meskipun AS meminta Cina untuk tidak mengimplementasikan larangan impor tersebut tetapi AS menyebut *ban* itu sebagai *golden opportunity* untuk menstimulasi bisnis daur ulang baru dan menguatkan kampanye daur ulang di AS.¹⁵¹ Selain AS terdapat Inggris yang telah mencoba mengurangi volume ekspor limbah padat ke Cina semenjak Cina memberikan notifikasi terhadap WTO pertengahan tahun 2017. Adanya serial dokumenter “Blue Planet” David Attenborough semakin meningkatkan Inggris akan masalah limbah, bahkan hal ini diumumkan ke Buckingham Palace sebagai komitmen Inggris dalam mengurangi limbah plastik.¹⁵²

Sedangkan respon Uni Eropa yaitu pembuat kebijakan dan sektor pebisnis merespon kebijakan Cina dengan sebutan “*a wake up call*”.¹⁵³ Keputusan Cina di respon positif oleh Presiden Federasi Eropa dalam bidang Pengelolaan Limbah dan Jasa Lingkungan bahwa :

¹⁵⁰ Ibid

¹⁵¹ Elizabeth Daigneau, Governing : *China's Foreign-Waste Ban Could Have Recycling Repercussions in America*, Online, diakses dari <http://www.governing.com/topics/transportation-infrastructure/gov-china-ban-scrap-paper-plastic-recycling.html> pada 5 Juli 2018

¹⁵² Sarah Knapton, The telegraph : *The Queen declares war on plastic after David Attenborough documentary*, diakses dari <https://www.telegraph.co.uk/news/2018/02/11/queen-declares-war-plastic-david-attenborough-documentary/> pada 5 Juli 2018

¹⁵³ Paola Tamma, EURACTIV : *Chinese waste ban wake up call for European recycling*, Online, diakses dari <https://www.euractiv.com/section/circular-economy/news/httpwww-euractiv-comsectioncircular-economynewschinese-ban-on-plastic-waste-imports-could-see-uk-pollution-rise/> pada 5 Juli 2018

“The Chinese decision forces us to ask ourselves whether we wouldn’t be interested in making processing plants in Europe so as to export products rather than waste”.

Parlemen Eropa saat ini sedang membuat skema daur ulang domestik yang lebih ketat dan ambisius. Uni Eropa telah mengumumkan strategi dalam inisiatif daur ulang limbah plastik dengan target akan mendaur ulang seluruh plastik di tahun 2030.¹⁵⁴

Alternatif ini juga didukung oleh *United Nation Environment Programme* bahwa Larangan Impor Limbah Padat Cina adalah sinyal bahwa negara kaya harus meningkatkan daur ulangnya sendiri dan memotong atau mengurangi konsumsi produk yang tidak penting.¹⁵⁵ Bahwa kebijakan itu seharusnya dipakai untuk mencari kesempatan dalam memikirkan kembali penggunaan plastik daripada mencari tempat pembuangan di negara selain Cina.

*“We should see the Chinese decision – I heard some complaints from Europeans – as a great service to the people of China and a wake-up call to the rest of the world”.*¹⁵⁶

Respon pihak internasional terhadap kebijakan Cina dapat menjadi transformasi perubahan sikap pengelolaan limbah domestik maupun internasional.¹⁵⁷ Jadi implikasi diplomatik jika Cina menerapkan *partial ban* adalah masyarakat internasional mulai percaya dalam

¹⁵⁴ Yanzhu Zhang, *China’s ban on foreign waste imports is a wake-up call for developed countries to rethink sustainability*, Online, diakses dari <http://blogs.bsg.ox.ac.uk/2018/04/30/chinas-ban-on-foreign-waste-imports-is-a-wake-up-call-for-developed-countries-to-rethink-sustainability/> pada 5 Juli 2018

¹⁵⁵ Alister Doyle, Reuters : *China’s Plastic Trash Ban is spur to recycle : UN Environment*, Online, diakses dari <https://www.reuters.com/article/us-environment-plastics/chinas-plastic-trash-ban-is-spur-to-recycle-u-n-environment-idUSKBN1FI2E2> pada 4 Juli 2018

¹⁵⁶ Ibid.

¹⁵⁷ Yanzhu Zhang, BSG ALUMNI University of Oxford : *China’s ban on foreign waste imports is wake up call for developed countries to rethink sustainability*, Online, Diakses dari <http://blogs.bsg.ox.ac.uk/2018/04/30/chinas-ban-on-foreign-waste-imports-is-a-wake-up-call-for-developed-countries-to-rethink-sustainability/>

melihat komitmen dan fokus kepemimpinan Cina dalam level domestik dan global dalam *ecological civilization*.

Dalam melihat implikasi ekonomi pada alternatif II, alternatif ini mempunyai benefit akan membantu pemerintah Cina mencoba mengintegrasikan antara *Belt and Road Initiative* dan kebijakan larangan impor tersebut. Hal ini ditunjukkan melalui data bahwa setelah adanya wacana tentang kebijakan tersebut, terdapat peningkatan impor limbah padat ke negara-negara Asia tenggara. Berikut adalah data yang menunjukkan data tersebut :



Tabel 5.1 Data peningkatan impor limbah padat AS ke kawasan Asia

PE (metric tons)	Country	2016 (Jan-Nov)	2017 (Jan-Nov)	% Change
	Thailand	1,041	10,153	876%
	Vietnam	16,845	44,716	166%
	Malaysia	16,277	37,778	132%
	India	58,747	88,155	50%
	Taiwan	14,063	16,575	18%

PET (metric tons)	Country	2016 (Jan-Nov)	2017 (Jan-Nov)	% Change
	Vietnam	7,759	18,384	137%
	Turkey	2,807	5,354	91%
	Malaysia	8,341	13,551	63%
PVC (metric tons)	India	3,477	5,101	47%
	Country	2016 (Jan-Nov)	2017 (Jan-Nov)	% Change
	Malaysia	1,679	8,521	407%
	Thailand	880	2,006	128%
	Vietnam	3,040	4,584	51%
Mixed Plastics (metric tons)	Mexico	7,959	10,763	35%
	Canada	6,433	7,037	9%
	Country	2016 (Jan-Nov)	2017 (Jan-Nov)	% Change
	Spain	606	5,014	727.90%
	Malaysia	9,604	37,694	292.50%
	Thailand	3,642	9,114	150.20%
	Mexico	12,968	24,386	88.00%

Sumber : Resource Recycling

Menurut data diatas menunjukkan bahwa limbah padat yang akan di daur ulang AS di ekspor ke Asia Tenggara dimana *reclaimer* dan pabrik secara dramatis meningkatkan pembelian karena Cina menutup pintu untuk impor limbah. Dilihat dari data tersebut Malaysia hampir empat kali kenaikannya dalam impor plastik dari AS, awalnya 9.600 metrik ton tahun 2016 menjadi 38.000 setahun kemudian. Seperti halnya Thailand, Vietnam dan India.¹⁵⁸ Selain kebijakan larangan barang atau limbah padat tertentu, juga terdapat batas kontaminasi 0,5 % impor plastik dan kertas. Peningkatan di Vietnam sebagian besar disebabkan

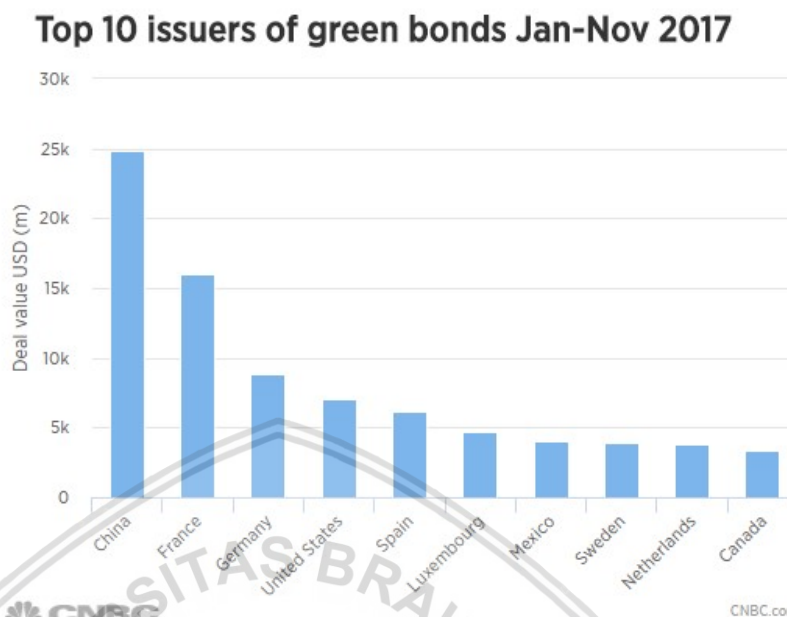
¹⁵⁸ Colin Staub, *Where exports displaced from China are finding a home*, Online diakses dari <https://resource-recycling.com/recycling/2018/01/16/exports-displaced-china-finding-home/> 4 Juli 2018

oleh perusahaan Cina yang memindahkan operasinya ke negara terdekat. Sementara India kemungkinan sudah memiliki sebagian besar infrastruktur di New Delhi dan hanya membeli limbah untuk mengisi kapasitas yang ada. Dilihat dari perpindahan operasi perusahaan daur ulang Cina ke negara terdekat terlihat bahwa Cina tetap bisa mendaur ulang sampah di negara lain dan Cina mendapat keuntungan yaitu tidak perlu mengolah sampah di negaranya dilihat dari tujuan nasional Cina yang *ecological civilization* dengan melindungi lingkungan dan masyarakatnya. Hal ini bisa disebut untuk menunjang *circular economy* Cina dengan membuka pasar daur ulang baru di Asia Tenggara.

Tetapi *cost* yang Cina dapatkan secara tidak langsung akan mempengaruhi hilang atau bahkan berkurangnya nilai impor limbah padat Cina. Meskipun nilai impor limbah Cina hilang, hal tersebut dapat digantikan dengan menunjang kebijakan *Belt and Road Initiative* Cina itu sendiri.

Dalam melihat aspek lingkungan dalam alternatif ketiga, apabila pemerintah Cina memilih alternatif ketiga maka terlihat komitmen Cina dalam kepemimpinannya dalam bidang lingkungan di level domestik. Memang sudah terdapat keselarasan antara Kementerian Perlindungan Lingkungan Cina dan Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan masalah limbah ini. Hal ini dibuktikan dengan data bahwa Cina menjadi pencetus utama *green bonds* di level global tahun 2017.

Diagram 5.1 Daftar 10 negara *green bonds* utama dunia pada tahun 2017



Sumber : CNBC¹⁵⁹

Dari data diatas terlihat bahwa China telah mendominasi penerbitan obligasi hijau atau *green bonds* selama dua tahun berturut-turut. Trend tersebut kemungkinan akan terus berlanjut sampai negara Cina yang notabene adalah pemicu emisi karbon terbesar di dunia memainkan peran yang besar dalam *climate change* di dunia. Cina sebagai ekonomi raksasa di kawasan Asia memulai menerbitkan *green bonds* dan menjadi yang pertama di tahun 2016 dan memberikan pinjaman ke negara lain untuk membiayai kegiatan yang bertema lingkungan.¹⁶⁰

¹⁵⁹ Yan Nee Le, *Trying to fight pollution, China is now the world's largest issuer of green bonds*, Online diakses dari <https://www.cnbc.com/2017/12/26/climate-change-china-is-the-worlds-biggest-green-bond-issuer.html> 5 Juli 2018

¹⁶⁰ Ibid.

Akhir November 2017 Cina memimpin penerbitan *green bonds* dengan total transaksi yaitu 66 dengan total nilai sekitar 24,89 miliar dolar AS.¹⁶¹ Dominasi Cina terus meningkat ketika tahun 2016 ia mendapatkan 43 transaksi senilai 33,17 miliar dolar AS yang mana ia telah berada di atas pembiayaan *green bonds* AS dan Perancis.¹⁶²

Jadi implikasi dimensi lingkungan jika Cina menerapkan alternatif ketiga adalah tidak adanya impor limbah lagi yang masuk ke Cina dan tidak menyebabkan kontaminasi lahan maupun sungai secara berkelanjutan. Implikasi dimensi lingkungan lainnya adalah lingkungan Cina tidak lagi tercemari zat-zat kandungan berbahaya dari impor limbah negara lain.

5.2 Pengaplikasian kalkulasi Poliheuristik ke dalam matriks kebijakan

Dalam proses tahap kedua teori poliheuristik ada pengaplikasian kalkulasi poliheuristik ke dalam matriks kebijakan Cina dalam masalah impor limbah padat yang dirangkum dalam suatu tabel yang akan dijelaskan dibawah ini.

¹⁶¹ Ibid.

¹⁶² Ibid.

5.2.1 Ultimate Decisions

Tabel 5.2 Tabel *Decisions Matrix* Kebijakan Impor Limbah Padat Cina

Dimensi/Alternatif	No Ban	Inspection	Partial Ban
Dimensi Diplomatik	<ul style="list-style-type: none"> • Status Quo 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecaman dari negara pengeksport karena adanya inspeksi / green fence operation • <i>Trade War</i> dengan negara pengeksport, misal AS 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh politik domestik dalam mendorong larangan impor limbah padat • Respon baik atas komitmen Cina dalam level global baik dari negara maupun organisasi internasional (UK, EU, The United Nation of Environment Programme) karena rentang waktu dan program yang jelas
Dimensi Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Industri daur ulang tetap mendapatkan pasokan limbah dan mendapat untung 	<ul style="list-style-type: none"> • Menimbulkan <i>cost</i> yang lebih tinggi dan harga pasar yang turun secara tiba-tiba dalam industri daur ulang • Menambah <i>demmurage</i> Hong kong dalam mengelola penumpukan limbah 	<ul style="list-style-type: none"> • Menunjang <i>circular economy</i> Cina yaitu salah satu kebijakan ekonomi Cina <i>Belt and Road Initiative</i> (membuka arus peluang pasar bagi <i>market</i> di Asia Tenggara).
Dimensi Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Kerusakan lingkungan semakin tercemar karena tidak adanya tindakan khusus 	<ul style="list-style-type: none"> • Menumpuknya limbah padat di <i>entry point</i> atau tempat transit kapal-kapal kontainer yaitu di Pelabuhan Hong Kong • Masih adanya barang atau limbah yang masuk ke wilayah Cina, apabila lolos dalam inspeksi oleh Bea dan Cukai 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerusakan lingkungan tidak melebar dan dapat di cegah

Sumber : Diolah penulis

Tabel 5.3 Kalkulasi *cost* dan *benefit* dari *decision matrix*

Dimensi / Alternatif	No Ban		Partial Ban (Inspection)		Partial Ban	
Diplomatik	0	0	-1	0	0	1
Ekonomi	0	1	-1	1	-1	1
Lingkungan	-1	0	-1	1	0	1
Total	0		-1		2	

Sumber : Olahan penulis

Dari angka kalkulasi di atas dapat dilihat bahwa 0 merupakan perhitungan penulis dalam melihat tidak adanya *cost* maupun *benefit*. Sedangkan -1 adalah ketika dimana implikasi berada dalam kolom *cost* dengan artian mempunyai kerugian tertentu. Dan 1 adalah ketika dimana perilaku negara mempunyai keuntungan tertentu. Data diatas merupakan kalkulasi penerapan *decision matrix* kebijakan impor limbah padat Cina tahun 2018 dilihat dari data dan fakta yang penulis dapatkan dari perilaku pemerintah Cina yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping.

Secara politis, presiden Xi Jinping mempunyai kekuatan di dalam pemerintahan terpusat di Cina. Oleh karena itu salah satu prinsip dari Teori Poliheuristik adalah non-kompensatori, merupakan pertimbangan individu Xi Jinping dalam mengevaluasi alternatif dengan prinsip menghindari kerugian secara politik. Presiden Xi akan membuang alternatif yang berpotensi membahayakan para pemimpin negara. Dalam kasus Cina, Xi Jinping mempunyai kekuasaan yang kuat baik dalam parlemen atau partai, oleh karena itu dalam prinsip non kompensatori itu kasus kebijakan larangan impor limbah padat memang didukung oleh parlemen dan departemen lainnya, hal ini karena tujuan nasional Xi Jinping dalam mengembangkan peradaban yang modern berbasis lingkungan. Hal itu sudah

terlihat sejak awal ia melihat masalah impor limbah padat atau *foreign garbage* pada tahun 2013.

“We should be fully aware of the urgency and difficulty of protecting the environment and reducing pollution as well as the significance and necessity of improving the environment”.

“We should take the responsibility for the sake of our people and our children”¹⁶³

Di antara 3 alternatif dalam melihat masalah impor limbah padat Cina, masalah itu merupakan masalah yang mengganggu *vital political* atau *national security* Cina. Dalam teori poliheuristik juga menekankan bahwa masalah yang ada merupakan masalah atau *problems* yang mengganggu keamanan nasional Cina yang tidak lain adalah kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat baik dewasa maupun anak-anak. Dalam hal tersebut alternatif I akan dihilangkan karena apabila dilihat dari masalah yang dihadapi oleh pemerintah Cina, tujuan yang ingin di capai adalah mengurangi zat-zat berbahaya dari impor limbah padat negara lain maka alternatif *no ban* akan dihilangkan terlebih dahulu oleh si pembuat kebijakan.

Pada alternatif kedua merupakan percobaan dimana Cina merespon masalah keamanan nasionalnya. Pertama, memutuskan alternatif I mempunyai implikasi dalam aspek diplomatik, ekonomi dan lingkungan. Di masa depan apabila Cina hanya mengandalkan inspeksi di pelabuhan maka masih banyak limbah-limbah padat yang masuk ke Cina padahal pengelolaan limbah padat di Cina masih konvensional dan terdapat sektor informal dalam pengelolaannya. Dengan teknologi konvensional, akan sangat tidak efektif apabila Cina terus

¹⁶³ CCICED Secretariat, Op.cit.

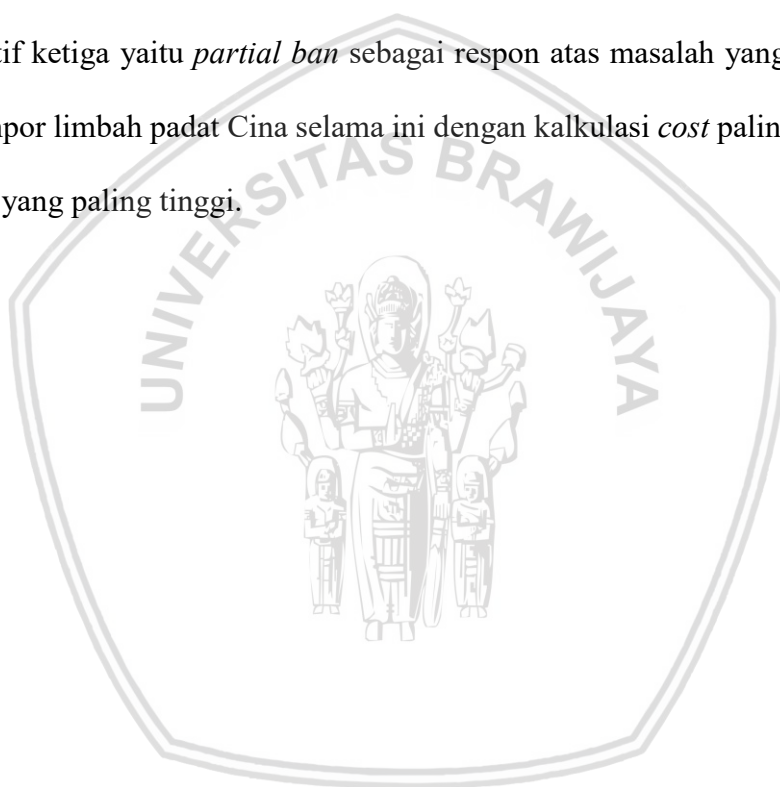
melakukan impor dan merusak lingkungan serta kesehatan masyarakatnya meskipun notabene sudah sejak lama Cina melakukan impor *foreign garbage* dari negara lain. Oleh karena itu pilihan alternatif I masih mempunyai kerugian yang lebih banyak dibandingkan keuntungannya.

Sedangkan alternatif ketiga merupakan respon pemerintah Cina dalam melihat keamanan nasionalnya dengan cara yang lebih masif dan progresif. Presiden Xi Jinping bersama parlemen dan partainya melihat lebih dalam bagaimana cara Cina berkomitmen dalam memimpin di bidang lingkungan baik dalam level domestik maupun lokal. Kedua, implikasinya tinggi ketika dimensi ekonomi yaitu dengan adanya kebijakan ini dapat menunjang *circular economy* Cina dalam *belt and road initiative* di negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand. Ketiga, alternatif II juga mempunyai keuntungan dimana Cina membuktikan bahwa ia berkomitmen dalam *Paris Climate Agreement* maupun tujuan SDGs (*sustainable development goals*) PBB dan didukung oleh negara-negara lain.

Telah dipaparkan diatas dan juga dikaitkan dengan tujuan nasional Pemerintah Cina untuk melindungi wilayah polusi Cina dan kesehatan masyarakatnya yang pada akhirnya pemerintah Cina menerapkan kebijakan *total ban* yang progresif dengan cara tidak menerima atau melarang impor limbah padat. Dikarenakan perilaku Xi Jinping menunjukkan respon yang mereformasi keseluruhan aspek lingkungan dalam melindungi keamanan nasionalnya. Dengan adanya alternatif kedua maka memberikan keuntungan tersendiri bagi Cina dalam berbagai aspek dan dimensi. Hal ini telah penulis lakukan tinjauan dari perilaku

pemerintah Cina dan data yang menunjang setelah kebijakan tersebut diwacanakan.

Melalui tahap kedua proses pengaplikasian *decisions matrix* teori poliheuristik bahwa aktor utama Presiden Xi Jinping sebagai pengambil keputusan yang dominan menimbang alternatif kebijakan dan menghitung pengaplikasian kalkulasi yang mempunyai implikasi paling rendah dengan menggunakan prinsip non kompensasi dan melihat *vital political*, memilih alternatif ketiga yaitu *partial ban* sebagai respon atas masalah yang diakibatkan oleh impor limbah padat Cina selama ini dengan kalkulasi *cost* paling rendah dan *benefit* yang paling tinggi.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pada 1 Januari 2018 Cina mengeluarkan kebijakan untuk melarang sebagian impor limbah padat ke Cina yaitu sebanyak 24 jenis limbah padat tertentu. Melalui analisis kebijakan luar negeri dalam level individu yaitu teori poliheuristik, dapat dilihat ada 2 proses pengambilan kebijakan luar negeri tersebut. Proses yang pertama adalah mengidentifikasi aspek alternatif, aspek dimensi dan aspek implikasi. Pada kasus Cina ini terdapat 3 alternatif utama yaitu *no ban*, *inspection* dan *partial ban*. Dalam aspek dimensi terdapat 3 dimensi utama yang berhubungan dengan kebijakan Cina yaitu dimensi diplomatik, dimensi ekonomi dan dimensi lingkungan. Dalam aspek implikasi, setiap alternatif mulai dari alternatif pertama hingga ketiga mempunyai implikasi pada setiap dimensinya. Setelah mengidentifikasi tiga aspek utama dalam tahapan pertama teori poliheuristik, pembuat kebijakan mulai menyeleksi alternatif yang dianggap kurang menguntungkan apabila dilihat dalam posisi pemimpinnya. Dalam tahapan pertama kita dapat merumuskan alternatif kebijakan ke dalam suatu tabel *decisions matrix*.

Pada tahapan kedua, pembuat kebijakan atau Presiden Xi Jinping akan melihat pilihan alternatif yang sekiranya mempunyai nilai *cost* paling rendah dan *benefit* yang tinggi. Kebijakan Cina *partial ban* untuk melarang impor sebagian limbah padat agar tidak masuk ke Cina merupakan keputusan yang dianggap menguntungkan karena dengan adanya kebijakan baru tersebut menunjang sirkulasi ekonomi Cina di bawah *Belt and Road Initiative* nya. Terdapat respon positif dari negara-negara lain sampai organisasi internasional dalam melihat arah kebijakan

Cina di bidang lingkungan sehingga dengan adanya respon-respon positif tersebut juga menunjang kebijakan Cina. Komitmen Cina dalam bidang lingkungan juga dapat dilihat melalui keikutsertaan Cina dalam organisasi, perjanjian atau konvensi mengenai lingkungan misalnya *Paris Agreement* dan UNFCCC. Dari analisis penulis tersebut pilihan kebijakan *partial ban* adalah pilihan yang paling rasional untuk diambil oleh Cina dengan kalkulasi *cost* paling rendah dan *benefit* yang paling tinggi.

Selain kesimpulan utama dari penelitian tentang proses pengambilan kebijakan luar negeri Cina, penulis mendapatkan temuan bahwa Cina merupakan negara yang pengambilan kebijakannya terpusat. Sebagaimana dijelaskan pada struktur pengambilan di Cina bahwa hanya ada satu partai besar yang memonopoli perpolitikan Cina. Sebagian besar aktor kebijakan luar negeri memiliki kedudukan yang sejajar, sehingga mereka tidak bisa mengeluarkan perintah satu sama lain. Badan yang paling tinggi yang bisa memberikan perintah bagaimana kebijakan itu diputuskan, oleh karena itu Xi Jinping sebagai sosok presiden dan juga Sekretaris Jenderal Partai Komunis di Cina mempunyai kedudukan paling tinggi dan menjadi aktor pengambil keputusan yang paling berpengaruh.

6.2 Saran

Dalam penelitian untuk melihat tindakan suatu negara apabila negara memutuskan sebuah kebijakan maka penelitian disarankan menggunakan konsep kebijakan luar negeri di level individu. Teori Poliheuristik (Alex Mintz) merupakan teori dimana pemimpin suatu negara membuat keputusan dengan cara 2 tahap. Dengan cara menyederhanakan masalah dengan menggunakan kognisi atau dengan kata lain heuristik. Kemudian pemimpin negara mengevaluasi alternatif yang tersisa dengan menggunakan perhitungan keuntungan dan kerugian yang diperoleh.

Pertimbangan pada tahap pertama yang digunakan oleh para pemimpin adalah menghindari kerugian secara politik (prinsip non-kompensasi) dan membuang alternatif yang berpotensi membahayakan para pemimpin negara akan di hindari atau dibuang secara langsung. Lalu tahap kedua akan menggunakan aplikasian kalkulasi *decision matrix* terhadap alternatif yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2015. *Collective Responsibility, Plastic Waste in China*. The Collective, 25 November 2015, diakses dari <http://www.coresponsibility.com/plastic-waste-in-china/>
- Anonim. 2016. *Collective Data by WTO*, diakses dari <https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/line/hs92/import/chn/show/3915/1995.2016/>
- Anonim. 2016. *Collective Data by WTO*, diakses dari https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/chn/show/3915/2016/
- Anonim. 2017. Online. Diakses dari http://www.mep.gov.cn/xxgk/hjyw/201704/t20170419_411714.shtml
- Anonim. 2018. Resource Recycling. *From Green Fence to red alert : A China timeline*. 13 Februari 2018. Online. diakses dari <https://resource-recycling.com/recycling/2018/02/13/green-fence-red-alert-china-timeline/> diakses pada 5 Maret 2018
- Anonim. 2007. *China's Position Paper (Amended version)*, diakses dari <http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/135377.htm>.

Anonim. *SUN is amazed : foreign garbage abandons the countryside and stinks Hong Kong.* Online. diakses dari http://the-sun.on.cc/cnt/news/20130315/00410_097.html

Berk, Caroline. New York. *China's new Green Fence puts pressure on US recyclables.* Online diakses dari China Daily USA http://usa.chinadaily.com.cn/epaper/2013-09/13/content_16967949.htm

Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik.* 2002. hlm 34

Bussiness Time. 2018. *As China bans foreign trash, S-E Asia profits,* diakses dari <https://www.businesstimes.com.sg/government-economy/as-china-bans-foreign-trash-s-e-asia-profits>

Callebs, Sean. CGTN. diakses dari <https://america.cgtn.com/2017/12/26/china-vs-us-on-climate-change-policy-going-into-2018>

China Daily. 2017. *Full Text of Xi Jinping's report at 19th CPC National Congress.* 4 November 2017. Online. diakses dari http://www.chinadaily.com.cn/china/19thcpcnationalcongress/2017-11/04/content_34115212.htm

CCICED secretariat. CCICED UPDATE. diakses dari http://english.sepa.gov.cn/Resources/publications/CCICED_updates/

CCTV on Press Conference : *China's solid waste imports decline 12 pct in 2017* –

Minister, diakses dari

<http://www.cctvplus.com/news/20180317/8076178.shtml#!language=1>

CCICED Secretariat. Issue 6 of 2013. diakses dari

http://english.sepa.gov.cn/Resources/publications/CCICED_updates/201606/P020160601415968232223.pdf

Daniel. *The Stumbling Blocks to China's Green Transition : The Diplomat* April

21st 2018, diakses dari <https://thediplomat.com/2018/04/the-stumbling-blocks-to-chinas-green-transition/>



Daigneau, Elizabeth. *Governing : China's Foreign-Waste Ban Could Have Recycling Repercussions in America*. diakses dari <http://www.governing.com/topics/transportation-infrastructure/gov-china-ban-scrap-paper-plastic-recycling.html>

D, D. 2017. *Why Cina is sick of foreign garbage*, The Economist. Online. Diakses dari <https://www.economist.com/blogs/economist-explains/2017/08/economist-explains-8> diakses pada 17 Januari 2018.

Dokumen WTO. diakses dari https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=237688&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True

Eminton, Steve. *Lets Recycle*. diakses dari <https://www.letsrecycle.com/news/latest-news/chinas-environment-minister-speaks-out-on-waste-imports/>

Elgot, Jessica. *Theresa may presses Xi Jinping on plastic waste at Beijing Talks*. diakses dari <https://www.theguardian.com/politics/2018/feb/01/theresa-may-china-xi-jinping-beijing>

Flower, Will. 2016. *What Operation Green Fence has Meant for Recycling*. diakses dari <http://www.waste360.com/business/what-operation-green-fence-has-meant-recycling> pada 28 Mei 2018.

Foreign Ministry Spokesperson Hua Chunying's Regular Press Conference on March 23, 2018, diakses dari http://recife.china-consulate.org/por/wjbfyrth_8/t1545062.htm

Gao, Charlotte. 2017. *The Diplomat : Cina 'Urgently' Bans Foreign Trash Imports*. Diakses dari <https://thediplomat.com/2017/07/Cina-urgently-bans-foreign-trash-imports/>

Gordon, Susannah. 2008. *Foreign Policy Decision: New Zealand Involvement in East Timor 2000-2002*. Hal.5 diakses dari <http://ir.canterbury.ac.nz/handle/10092/4187>

Hara, Abubakar Eby. 2011. *Pengantar Analisa Politik Luar Negeri dari Realisme Sampai Konstruktivisme*, Bandung: Nuansa, 2011, Hal.15

Holsti, K.J. *National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy*. University of British Columbia, 2012. Hal. 222.

Kai, Zhang. 2016. *Red alert : whats happening with beijing's air pollution?*. Online diakses dari <http://www.greenpeace.org/eastasia/news/blog/red-alert-whats-happening-with-beijings-air-p/blog/58325/>

Knapton, Sarah. *The telegraph : The Quenn declares war on plastic after David Attenborough documentary*. diakses dari <https://www.telegraph.co.uk/news/2018/02/11/queen-declares-war-plastic-david-attenborough-documentary/>

Kejo, Jiang. *Acuity : China's renewable energy revolution*. diakses dari <https://www.acuitymag.com/opinion/chinas-renewable-energy-revolution>

Hoorweg, Daniel and Perinaz Bhada-Tata. 2012. *Urban Development Series Knowledge Paper*. diakses dari https://siteresources.worldbank.org/.../Resources/.../What_a_Waste2012_Final.pdf

L, Zheng, Wu K, Li Y, et al. 2008. *Blood lead and cadmium levels and relevant factors among children from an e-waste recycling town in China [J]*. Environmental Research. 2008, 108(1): 15-20

Liangyu. 2017. *China intensifies waste management*. diakses dari http://www.xinhuanet.com/english/2017-12/29/c_136860097.htm

Mansbach, Richard W dan Kristen L. Rafferty. 2010. Pengantar Politik Global:
Introduction to Global Politics, terj. Asmat Asnawi, 2010. Bandung: Nusa
Media, hal. 411.

Mark R, Amstutz. *International Conflict and Cooperation: A Introduction to World
Politicts*. Dubuque, Brown dan Benchmark. Hal. 146.

MEP. 2011. *Solid Waste Import Management Measures*. 8 April 2011. Online.
diakses dari
http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/bl/201105/t20110520_210978.htm

MEP. 2014. *Strengthen the system of construction and clean up the 'pass'*. 3 April
2014. Online. diakses dari
http://jcj.mep.gov.cn/mtgz/201403/t20140303_268671.html

Minter, Adam. 2017. *Cina's War on Foreign Garbage*. Bloomberg View on
Environment. Online. Diakes dari
<https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-07-20/Cina-s-war-on-foreign-garbage> diakses pada 17 Januari 2018.

Mintz, Alex. 2005. *International Studies Perspectives, Utilizing Poliheuristic
Theory to Explain and Predict Foreign Policy and National Security
Decisions*. Online, diakses dari
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1528-3577.2005.00195.x/>

Mintz, Alex. 2014. *Journal of Conflict Resolution*, Vol. 48, No 1 *How do leaders make decisions? : A polyheuristic theory*. Feb 2004. Online diakses dari www.jstor.org/stable/3176265

Ministry of Commerce. 2007. *Law of the People's Republic of China on Prevention and Control of Environmental Pollution by Solid Waste*. diakses dari <http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/policyrelease/internationalpolicy/200703/20070304471567.html>

NPC Issue 4. 2017. *Setting the Course*. diakses dari <http://www.npc.gov.cn/npc/zgrdzz/site1/20180213/00016cd0abbd1becca5b03.pdf>

Pang, Melissa Kaye. 2013. *Hong kong as a base for doing business in mainland China*. Online diakses dari https://www.americanbar.org/publications/blt/2013/06/01_pang.html

Peng, Seng Li. 2017. *China's plastic demand to rise as foreign garbage ban to curb recycled supply*. Environment, Reuters. Online. diakses dari <https://www.reuters.com/article/us-china-plastics-demand/chinas-plastic-demand-to-rise-as-foreign-garbage-ban-to-curb-recycled-supply-idUSKCN1BO0J8>

Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochmad Yani. 2011. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA. Hlm. 48-49

People's Daily Online. 2018. *China's an on imported waste to have huge impact on global recycling industry.* diakses dari <http://en.people.cn/n3/2018/0103/c90000-9311150.html>

People's Daily Online. 2018. *China firmly says no to foreign waste.* diakses dari <http://en.people.cn/n3/2018/0328/c90000-9442858.html>

Powell, Jerry. 2013. *Operation Green Fence is deeply affecting export markets.* diakses dari <https://resource-recycling.com/recycling/2013/04/12/operation-green-fence-is-deeply-affecting-export-markets/>

Powell, Jerry. *Resource Recycling.* diakses dari <http://resource-recycling.com/node/3679>

Prouser, Fred. Reuters : *US demands China reconsider catastrophic ban on importing foreign garbage and recyclables.* online diakses dari <https://www.rt.com/news/422255-us-china-garbage-recyclables-import/>

Recycling Today Staff. 2013. ISRI Convention: *China's Green Fence*, Online diakses dari <http://www.recyclingtoday.com/article/isri-convention-2013-green-fence/>

Renewable Energy World. 2005. *China Passes Renewable Energy Law*. diakses dari <https://www.renewableenergyworld.com/articles/2005/03/china-passes-renewable-energy-law-23531.html>

Rooney, Kelly. *Director of Recycling, China's Green Fence Changed Recycling What Does It Mean For You?*. diakses dari <https://www.advanceddisposal.com/whywasteblog/chinas-green-fence-changed-recycling-what-does-it-mean-for-you-2/>

Scmitz, Rob. 2017. *The Burning Problems's of China Garbage*. National Public Radio, diakses dari <https://www.npr.org/sections/parallels/2017/02/20/515814016/the-burning-problem-of-Cinas-garbage> pada 01 Februari 2018

Shira, Dezan & Associates. *Prospect for China's Recycling Industry*. Online diakses dari <https://www.chinabusinessreview.com/trash-or-treasure-prospects-for-chinas-recycling-industry/>

Someno, Kenji. 2015. *Recycling and Economic Growth in China's Interior*. diakses dari <http://www.tokyofoundation.org/en/articles/2014/recycling-in-china-interior>

South China Morning Post. *China Pollution*. 25 Mei 2018 diakses dari <http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2147770/chinas-war-pollution-takes-aim-solid-waste-recycling>

Staub, Colin. *Resource Recycling*. diakses dari <https://resource-recycling.com/recycling/2017/04/25/chinese-reform-committee-considers-restricting-imports/>

Staub, Colin. *Where exports displaced from China are finding a home*. Online diakses dari <https://resource-recycling.com/recycling/2018/01/16/exports-displaced-china-finding-home/>

Velis, Costas. 2014. ISWA (International Solid Waste Association) : *Global recycling markets : plastic waste A story of one player-China*. Online diakses dari https://www.iswa.org/.../TFGWM_Report_GRM_Plastic_Chi...

Wei, Lin. 2012. Thesis. *Present status of e-waste disposal and recycling in China*. Online. diakses dari

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029612006081> pada
25 Februari 2018.

Willen, Jenny. Uppsala University, Department of Economics, *Thesis* :
International Trade with Waste. Diakses dari <https://www.diva-portal.org/smash/get/.../FULLTEXT01.pdf>

World Bank Report. *What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management*.
World Bank: 8-13. Urban Development. Online. Diakses dari
siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387-1334852610766/Chap3.pdf

World Bank. 2018. *Solid Waste Management*. diakses dari
<http://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/brief/solid-waste-management>

WRAP. *The facts: China's tighter restriction on waste imports*. diakses dari
<http://resource.co/sites/default/files/China%20-%20fact%20sheet.pdf>

Xinhua. *China to boost recycling industry for greener growth*. diakses dari
http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-05/04/content_29208191.htm

Xu, Muyu Reuter Staff. Reuters : *China scrap metal firms face pressure from import curbs: official*. diakses dari <https://www.reuters.com/article/us-china-metals-scrap/china-scrap-metal-firms-face-pressure-from-import-curbs-official-idUSKBN1HX0MK>.

Zhangrui. CCTV. *Xi demands enhanced supervision over reform efforts*. diakses dari <http://english.cctv.com/2017/04/18/ARTINHuQg6O5QNBAvLXALW8P170418.shtml>

Zhang, Yanzhu. BSG ALUMNI University of Oxford : *China's ban on foreign waste imports is wake up call for developed countries to rethink sustainability*. Diakses dari <http://blogs.bsg.ox.ac.uk/2018/04/30/chinas-ban-on-foreign-waste-imports-is-a-wake-up-call-for-developed-countries-to-rethink-sustainability/>.